



**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2011**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2011 - 2015**



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 - 2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur dan Wakil Bupati Lampung Timur;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Lampung Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Lampung Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015;
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Lampung Timur adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Lampung Timur sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Lampung Timur dan memperhatikan RPJM Nasional memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi pedoman bagi:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);

- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Pasal 3

RPJMD Kabupaten Lampung Timur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2011

Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 39

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
Bab 1 Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I – 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I – 3
1.4. Sistematika Penulisan	I – 4
1.5. Maksud dan Tujuan	I – 5
Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Lampung Timur	
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II – 1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II – 1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II – 20
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana.....	II – 23
2.1.4. Demografi	II – 24
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 29
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II – 29
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II – 33
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	II – 40
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II – 41
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	II – 41
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II – 53
2.4. Aspek Daya Saing	II – 62
2.4.1. Jaringan Jalan.....	II – 62
2.4.2. Air Bersih.....	II – 65
2.4.3. Jaringan Irigasi	II – 66
2.4.4. Jaringan Telepon.....	II – 67
2.4.5. Jaringan Listrik	II – 67
2.4.6. Jaringan Pipa Gas Negara	II – 68
2.4.7. Jaringan Drainase.....	II – 68
Bab 3 Gambaran Pengelolaan Keuangan Serta Kerangka Pendanaan	
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III – 1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III – 2
3.1.2. Neraca Daerah	III – 3
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III – 6
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III – 6
3.2.2. Analisis Pembiayaan	III – 8
3.3. Kerangka Pendanaan	III – 11
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III – 11
3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan	III – 12

Bab 4 Analisis Isu-Isu Strategis

4.1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia IV – 1

4.2. Kualitas Pendidikan perlu Ditingkatkan IV – 2

4.3. Kualitas Kesehatan Masyarakat Masih Rendah IV – 2

4.4. Kualitas dan Akses Masyarakat terhadap Perumahan Rendah IV – 2

4.5. Kab. Lampung Timur Termasuk Kabupaten Tertinggal IV – 2

4.6. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan IV – 3

4.6.1. Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura IV – 3

4.6.2. Perkebunan dan Kehutanan IV – 3

4.6.3. Peternakan IV – 3

4.6.4. Perikanan dan Kelautan..... IV – 4

4.7. Pariwisata dan Budaya IV – 4

4.8. Pertambangan IV – 4

4.9. Kurangnya Optimalnya Pengembangan UMKM IV – 4

4.10. Rendahnya Investasi Masyarakat dalam Pembangunan IV – 5

4.11. Industri dan Perdagangan IV – 5

4.12. Terbatasnya Infrastruktur Penunjang IV – 5

4.13. Menurunnya Kualitas Lingkungan..... IV – 5

Bab 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5.1. Visi V – 1

5.2. Misi V – 3

5.3. Tujuan dan Sasaran V – 6

Bab 6 Strategi dan Arah Kebijakan

Bab 7 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab 8 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab 9 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Bab 10 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

10.1 Pedoman Transisi X - 1

10.2 Kaidah Pelaksanaan X - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Kabupaten Lampung Timur Dirinci per Kecamatan ..	II	-	3
Tabel 2.2.	Rata-rata Curah Hujan di Kabupaten Lampung Timur (2004-2009)	II	-	4
Tabel 2.3.	Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng Di Kabuapten Lampung Timur	II	-	7
Tabel 2.4.	Susunan Stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur	II	-	8
Tabel 2.5.	Kawasan Hutan di Kabupaten Lampung Timur	II	-	14
Tabel 2.6.	Kondisi Lahan Kritis di Kabupaten Lampung Timur.....	II	-	16
Tabel 2.7.	Daerah Irigasi Wewenang Kabupaten Lampung Timur	II	-	18
Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Timur 2006 - 2010	II	-	25
Tabel 2.9.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur	II	-	26
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Kepala Keluarga	II	-	27
Tabel 2.11.	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Timur	II	-	28
Tabel 2.12.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 S.d 2010 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Timur	II	-	29
Tabel 2.13.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 S.d 2010 atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Lampung Timur	II	-	30
Tabel 2.14.	Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) tahun 2000 dari tahun 2007 s.d. tahun 2010 Kabupaten Lampung Timur.....	II	-	30
Tabel 2.15.	Perbandingan Perkembangan PDRB kabupaten/kota Tahun 2006 - 2009 atas Dasar Harga Konstan di Propinsi Lampung	II	-	31
Tabel 2.16.	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2006 – 2011 Kabupaten Lampung Timur	II	-	31
Tabel 2.17.	Jumlah Penduduk Pra Sejahtera dan Sejahtera	II	-	32
Tabel 2.18.	Angka Kriminalitas Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008-2010.	II	-	32
Tabel 2.19.	Indeks Komponen IPM Kabupaten Lampung Timur	II	-	33
Tabel 2.20.	Perbandingan Nilai dan Rangking IPM di Provinsi Lampung, 2008-2010	II	-	34
Tabel 2.21.	Komponen Indeks Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung 2009 - 2010	II	-	35
Tabel 2.22.	APK dan APM SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Lampung Timur 2007-2010	II	-	38
Tabel 2.23.	Penduduk Usia Lebih dari 10 Tahun Menurut Ijasah Tertinggi yang Dimiliki 2007-2010.....	II	-	39
Tabel 2.24.	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur, 2007-2010	II	-	40
Tabel 2.25.	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008 s.d 2009	II	-	42
Tabel 2.26.	Rasio Jumlah Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	II	-	42
Tabel 2.27.	Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit di Kabupaten Lampung Timur 2007-2010.....	II	-	43
Tabel 2.28.	Jenis Keluhan Kesehatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur, 2008 - 2010	II	-	43
Tabel 2.29.	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Di Kabupaten Lampung Timur 2007-2010.....	II	-	44

Tabel 2.30.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Lampung Timur	II - 45
Tabel 2.31.	Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama Untuk Memasak.....	II - 46
Tabel 2.32.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Lampung Timur 2008 dan 2009.....	II - 47
Tabel 2.33.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, 2007 - 2010	II - 48
Tabel 2.34.	Banyaknya Tempat Peribadatan di Kabupaten Lampung Timur	II - 48
Tabel 2.35.	Jumlah Desa dan Rata-rata Penduduk/Desa pada Setiap Kecamatan.....	II - 50
Tabel 2.36.	Data PNS Kabupaten Lampung Timur 2008-2010.....	II - 51
Tabel 2.37.	Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010	II - 52
Tabel 2.38.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Timur 2005 – 2008	II - 52
Tabel 2.39.	Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Jam Kerja Di Kabupaten Lampung Timur 2008-2010	II - 53
Tabel 2.40.	Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Tahun 2008-2009...	II - 54
Tabel 2.41.	Luas panen, Produksi, dan Produktivitas Sayur-sayuran dan Buah-buahan Semusim	II - 54
Tabel 2.42.	Luas panen, Produksi, dan Produktivitas Sayur-sayuran dan Buah-buahan Tahunan	II - 55
Tabel 2.43.	Luas Areal dan Produksi Perkebunan Tahun 2008-2009	II - 56
Tabel 2.44.	Perkembangan Populasi Ternak tahun 2006-2010.....	II - 57
Tabel 2.45.	Perkembangan Populasi Unggas (ekor) tahun 2006-2010.....	II - 58
Tabel 2.46.	Perkembangan Produksi Daging dan Telur Kabupaten Lampung Timur (ton)	II - 58
Tabel 2.47.	Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Lampung Timur (Ton)	II - 59
Tabel 2.48.	Banyaknya Armada dan Alat Tangkap Perikanan Kabupaten Lampung Timur	II - 59
Tabel 2.49.	Potensi Bahan Tambang dan Lokasi Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur	II - 60
Tabel 2.50.	Perkembangan Industri di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2006-2010	II - 61
Tabel 2.51.	Pasar yang Dikelola oleh Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Lampung Timur	II - 61
Tabel 2.52.	Nama Objek Wisata dan Lokasi di Kabupaten Lampung Timur	II - 62
Tabel 2.53.	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan Di Kab. Lampung Timur	II - 64
Tabel 2.54.	Kondisi Jalan Beraspal di Kabupaten Lampung Timur	II - 64
Tabel 2.55.	Jenis Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Lampung Timur	II - 64
Tabel 2.56.	Banyaknya Air Bersih Yang Disalurkan di Kabupaten Lampung Timur (m ³)	II - 66
Tabel 2.57.	Data Jenis dan Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009	II - 66
Tabel 2.58.	Tingkat Pelayanan Sarana Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur	II - 67

Tabel 3.1.	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2006-2010	III - 2
Tabel 3.2.	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2008-2010	III - 3
Tabel 3.3.	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Lampung Timur	III - 5
Tabel 3.4.	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2008-2010	III - 6
Tabel 3.5.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lampung Timur.....	III - 7
Tabel 3.6.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Lampung Timur	III - 7
Tabel 3.7.	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Timur	III - 9
Tabel 3.8.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Timur	III - 10
Tabel 3.9.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lampung Timur	III - 10
Tabel 3.10.	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lampung Timur	III - 12
Tabel 3.11.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur	III - 13
Tabel 3.12.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur	III - 14
Tabel 5.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kabupaten Lampung Timur	V - 7
Tabel 6.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Lampung Timur	VI - 2
Tabel 7.1	Perumusan Program Prioritas Pada Misi Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	VII - 2
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Daerah dan Target Capaian Setiap Tahun.....	VIII - 3
Tabel 9	Matriks Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	IX - 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan Antar RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I	-	4
Gambar 2.1. Letak Lokasi Wilayah Kabupaten Lampung Timur	II	-	1
Gambar 2.2. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur	II	-	2
Gambar 2.3. Peta Sebaran Struktur Geologi Di Kabupaten Lampung Timur	II	-	9
Gambar 2.4. Peta Sebaran Jenis Tanah Di Kabupaten Lampung Timur	II	-	10
Gambar 2.5. Peta Tutupan Lahan Di Kabupaten Lampung Timur	II	-	13
Gambar 2.6. Peta Sebaran Daerah Irigasi Di Kabupaten Lampung Timur	II	-	19
Gambar 2.7. Peta Rencana Kawasan Strategis Di Kabupaten Lampung Timur ..	II	-	21
Gambar 2.8. Wilayah Rawan Bencana Di Kabupaten Lampung Timur	II	-	24
Gambar 2.9. Indeks Kelangsungan Hidup Kabupaten Lampung Timur 2007-2010.....	II	-	35
Gambar 2.10. Indeks Pengetahuan Kabupaten Lampung Timur 2007-2010	II	-	36
Gambar 2.11. Indeks Daya Beli Kabupaten Lampung Timur 2007-2010.....	II	-	37
Gambar 2.15. Peta Sistem Transportasi Kabupaten Lampung Timur	II	-	65
Gambar 3.1. Grafik Realisasi Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2008 – 2010	III	-	9

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 - 2015**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah ditetapkan proses pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar-daerah, antar daerah dengan propinsi dan antar daerah dengan nasional tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis yang tanggap terhadap perkembangan zaman.

Menurut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan pula bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJMD Propinsi (Renstrada Prop) dan RPJM Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJMD tersebut antara lain memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pemberi arah bagi semua lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya, dunia usaha, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat luas, maka dalam proses penyusunannya juga telah mencerminkan keterlibatan pihak-pihak terkait. Adapun asas dan tujuan perencanaan tersebut dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi/pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 – 2015 adalah dokumen perencanaan tahap kedua RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur periode 2010 –

2015, dimana memuat keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005 – 2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010 – 2014, dalam upaya mewujudkan visi dan misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, yaitu “Lampung Timur Sejahtera, Berdaya Saing, Religius, dan Berkelanjutan”.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2015 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005 –2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, RPJMD mempunyai hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dalam Sistem Perencanaan pembangunan Nasional. Kedudukan antara RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 – 2015 dengan dokumen lain dalam sistem perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

- (1) RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 – 2015 merupakan penjabaran dari Visi Misi kepala daerah terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur tahun 2005 – 2025 dengan memperhatikan RPJP Provinsi Lampung dan RPJP Nasional.
- (2) RPJMD Kabupaten Lampung Timur merupakan dokumen perencanaan yang bersifat taktis strategis, dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mempedomani Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur dan mengacu pada arah pembangunan RPJM Nasional Tahun 2009 – 2014 serta RPJMD Provinsi Lampung tahun 2009 – 2014.
- (3) RPJMD Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 - 2015 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 – 2015.

Secara skematis hubungan antar RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan
1.3.	Hubungan Antar Dokumen
1.4.	Sistematika Penulisan
1.5.	Maksud dan Tujuan
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2.1.	Aspek Geografi dan Demografi
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3.	Aspek Pelayanan Umum
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
3.3.	Kerangka Pendanaan
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
5.1.	Visi
5.2.	Misi
5.3.	Tujuan dan Sasaran

BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB IX	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
	10.1. Pedoman Transisi
	10.2. Kaidah Pelaksanaan

1.5. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 - 2015 ini disusun dengan maksud sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 - 2015 menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2015 adalah :

- (1) Menjabarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur periode 2010 – 2015 yang memuat gambaran umum kondisi daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya, analisis isu-isu strategis, strategi dan arah kebijakan, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan penetapan indikator kinerja daerah.
- (2) Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) di Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (3) Menyediakan satu acuan dasar sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2011-2015.
- (4) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
- (5) Dalam rangka mendesign *output* dan *outcome* yang diharapkan dalam 5 tahun kedepan secara bertahap dalam setiap tahunnya. Tahapan tersebut dapat diukur keberhasilannya secara kuantitatif sehingga sasarannya diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

M BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Lampung Timur kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar 15% dari total luas wilayah Provinsi Lampung (total luas wilayah Provinsi Lampung 35.376 km²). Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Sukadana. Ibukota Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Sukadana. Selain wilayah daratan Kabupaten Lampung Timur juga memiliki pulau-pulau kecil yang antara lain:

- a) Pulau Gosong Sekopong
- b) Pulau Segama Besar
- c) Pulau Segama Kecil
- d) Pulau Batang Besar
- e) Pulau Batang Kecil

Gambar 2.1 Letak Lokasi Wilayah Kabupaten Lampung Timur.



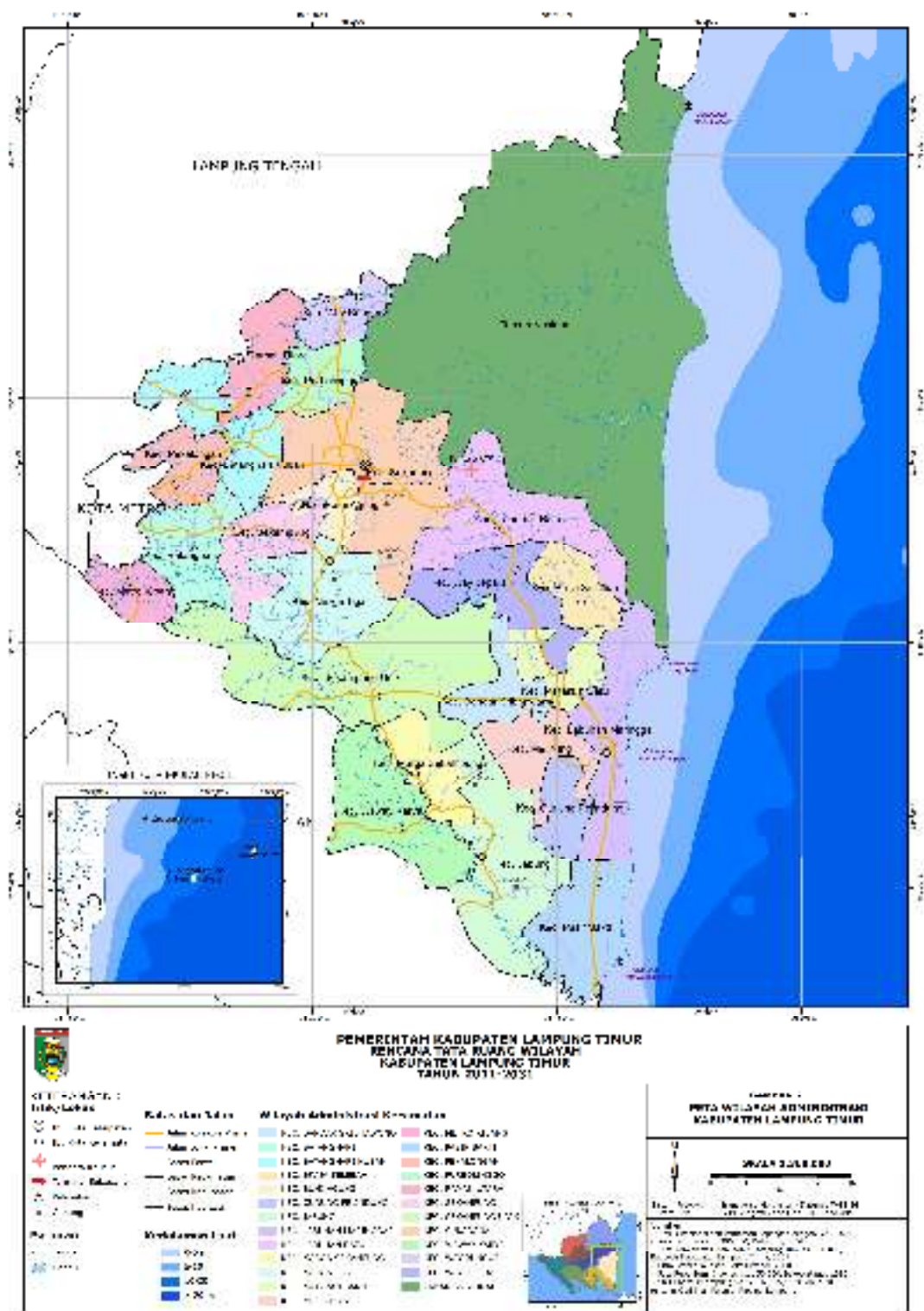
Sumber : Bappeda Propinsi Lampung, 2009

Secara astronomis wilayah Kabupaten Lampung Timur terletak antara 105°15' BT – 106°20' BT dan 4°37' LS – 5°37' LS, dan secara geografis batas wilayah Kabupaten Lampung Timur berbatasan langsung dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Timur, dan Kecamatan Metro Utara, Kota Metro dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 2.2 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Timur.



Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011 - 2031

Pembentukan administrasi pemerintahan Kabupaten Lampung Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pusat pemerintahan di Sukadana. Pemda Kabupaten Lampung Timur meliputi 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa.
- b) Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, sebanyak 2 kecamatan pembantu yakni Kecamatan Pembantu Marga Tiga dan Kecamatan Pembantu Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian maka jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif, 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.
- c) Setelah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang pembentukan 11 kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2. 1
Luas Wilayah Kabupaten Lampung Timur Dirinci per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah		Luas Area (Ha)
			Desa	Kel.	
1	Metro Kibang	Margototo	7	-	7.677,83
2	Batanghari	Banar Joyo	17	-	14.887,95
3	Sekampung	Sumber Gede	17	-	14.834,39
4	Marga Tiga	Tanjung Harapan	13	-	25.072,94
5	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	15	-	33.912,45
6	Jabung	Negara Batin	15	-	26.784,54
7	Pasir Sakti	Mulyo Sari	8	-	19.393,83
8	Waway Karya	Sumberrejo	11	-	21.107,32
9	Marga Sekampung	Peniangan	8	-	17.732,34
10	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	11	-	19.498,73
11	Mataram Baru	Mataram Baru	7	-	7.956,11
12	Bandar Sribhawono	Saribhawono	7	-	18.570,67
13	Melinting	Wana	6	-	13.929,74
14	Gunung Pelindung	Negeri Agung	5	-	7.852,25
15	Way Jepara	Braja Sakti	15	-	22.926,92
16	Braja Selebah	Braja Hajosari	7	-	24.760,68
17	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	11	-	48.551,22
18	Sukadana	Sukadana	20	-	75.675,50
19	Bumi Agung	Donomulyo	8	-	7.317,47
20	Batanghari Nuban	Sukaraja Nuban	13	-	18.068,84
21	Pekalongan	Pekalongan	12	-	10.012,81
22	Raman Utara	Kota Raman	11	-	16.136,91
23	Purbolinggo	Taman Fajar	12	-	22.203,37
24	Way Bungur	Tambah Subur	8	-	37.638,19
Jumlah			264	-	532.503,00

Sumber: Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Secara administratif wilayah perencanaan terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan/laut dengan ketentuan keseluruhan meliputi:

- a) Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Lampung Timur yang terbagi dalam 24 kecamatan dan 264 desa (Tabel 2.1).

- b) Wilayah perairan/laut yang mencakup wilayah sepanjang 4 mil laut dari garis pantai seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Hukum Laut.
- c) Wilayah udara adalah ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia. Ruang udara beserta sumber daya yang terkandung didalamnya merupakan sumber daya milik bersama (*common resources*), yang berdasarkan sifat fisik alamiahnya tidak mengenal batas, serta aset negara bernilai ekonomis dan sosial yang terkait erat dengan kepentingan pertahanan keamanan negara. Jika terjadi pembagian atau pemilahan penguasaan terhadap ruang udara, maka dapat terjadi konflik kepentingan bersama (*tragedy of common*) terhadap ruang udara, yang pada akhirnya berdampak kepada keutuhan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 6 ayat 5 UU No.26 Tahun 2007).

(1) Iklim

Kondisi iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan klasifikasi iklim Oldeman (1979), ditemukan satu jenis tipe agroklimat, yaitu tipe C2 dengan jumlah bulan basah 5-6 bulan dan bulan kering 2-3 bulan. Sedangkan berdasarkan klasifikasi iklim Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 24-34°C. Curah hujan rerata tahunan sebesar 1.500 - 2.500 mm. Rata-rata intensitas penyinaran matahari selama tahun 2004-2009 berkisar 55,42 - 63,68 % tiap tahunnya, hal ini berarti efektifitas lama penyinaran yang terjadi di Kabupaten Lampung timur berkisar sampai 17-19 hari tiap bulannya. Dalam lima tahun terakhir, intensitas penyinaran terendah terjadi pada tahun 2007 dan tertinggi pada tahun 2004. Intensitas penyinaran tertinggi terjadi pada bulan Oktober tahun 2009 sebesar 92,6%. Hal ini berarti pada bulan Oktober, hampir satu bulan penuh mendapat penyinaran matahari. Sebaliknya pada bulan Januari 2009 intensitas penyinarannya berada pada titik terendah yaitu 31,1% serta dengan efektivitas 10 hari penyinaran (Tabel 2.2).

Tabel 2.2.
Rata-rata Curah Hujan di Kabupaten Lampung Timur (2004-2009)

No	Bulan	Curah Hujan (mm)					
		2004	2005	2010	2007	2008	2009
1	Januari	177	459	290	290	311	411
2	Februari	249	297	217	217	378	441
3	Maret	264	291	249	249	345	374
4	April	180	179	180	180	166	163
5	Mei	160	106	135	135	85	76
6	Juni	75	58	103	103	86	94
7	Juli	28	109	100	100	45	70
8	Agustus	21	26	94	94	2	3
9	September	114	33	34	34	2	1
10	Oktober	145	46	75	75	13	10
11	Nopember	143	112	100	100	55	44
12	Desember	271	282	131	131	170	162
Jumlah		1827	1998	1708	1708	1658	1849

Sumber: Lampung Timur Dalam Angka, 2010

(2) Hidrologi

a. Sungai

Satuan Wilayah Sungai utama yang mengalir di Kabupaten Lampung Timur yaitu SWS Seputih – Sekampung. Ketersediaan air terutama untuk pengairan areal persawahan dapat digambarkan dengan banyaknya aliran sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Perbedaan rasio debit sungai pada musim penghujan dan musim kemarau pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lampung Timur umumnya menunjukkan angka yang besar, yaitu lebih dari 50, yang berarti terjadi kelebihan air pada musim penghujan dan kekurangan air pada musim kemarau yang disebabkan menurunnya fungsi hidrologis kawasan hutan lindung. Hal ini tentunya berdampak terhadap ketersediaan air untuk irigasi, khususnya pada musim kemarau. Bahkan dari data terakhir disebutkan bahwa Way Sukadana telah mengalami penyempitan akibat tingginya sedimentasi di daerah hulu, sehingga secara periodik hal tersebut menyebabkan banjir di bagian hilir.

Way sekampung adalah salah satu sungai terbesar yang mengalir di bagian paling selatan Kabupaten Lampung Timur. Aliran sungai ini memisahkan Kabupaten Lampung Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan. Di Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat banyak aliran sungai yang bermuara di Way Sekampung. Aliran sungai tersebut antara lain Way Ngisen, Way Capang, Way Curup, Way Nibung, Way Buyut, Way Sipin, Way Bekarang, Way Kandis Besar, Way Ulan, Way Bakun, Way Rupuyuh, Way Samping, Way Kenali dan Way Galih. Way Sekampung berhulu sungai di kaki bukit Gunung Rindingan, Kabupaten Tanggamus dan bermuara di Laut Jawa, dengan total panjang aliran hulu hingga Laut Jawa sepanjang 265 km.

Way Sekampung mempunyai karakteristik fisik bentuk sungai berkelok-kelok (*meandering*), dengan jumlah cabang sungai sebanyak 12 buah, permukaan sungai di bagian hulu hingga tengah memiliki lebar berkisar 50-60 meter, kedalaman bervariasi 3,2 – 4,5 meter, kecepatan aliran rata-rata umumnya rendah, kurang dari 0,2 m/detik. Adapun di bagian hilir hingga muara sungai memiliki lebar permukaan 70 hingga 144 meter, dan mulut muara sungai memiliki lebar hingga 1.285 meter.

b. Danau

Danau di Kabupaten Lampung Timur berfungsi sebagai sumber pengairan teknis dan daerah wisata. Fungsi irigasi teknis dapat terlihat di kawasan Danau Jepara dengan luas genangan 220 hektar dan mempunyai aliran tiga sungai yaitu Way Abar, Way Jepara, Way Jejawai. Aliran irigasi dari danau Jepara meliputi Kecamatan Way Jepara, Braja Selebah, dan Labuhan Ratu.

Sumber air danau berasal dari air hujan yang turun saat musim hujan tiba. Selain Danau Jepara, terdapat pula Danau Beringin/ Way Kawat, yang letaknya berada di Kecamatan Sukadana, Danau Beringin berfungsi sebagai obyek wisata alam yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Keberadaan Danau Beringin masih perlu penataan kembali untuk menarik wisatawan. Sumber atau pasokan air danau berasal dari sungai di atasnya yang memiliki saluran atau cabang menuju danau, sumber utama berasal dari air hujan. Sumber lainnya berasal dari buangan air dari danau yang berdekatan lokasinya. Adanya morfologi cekungan memudahkan air hujan membentuk genangan. Di sekitar danau di

beberapa tempat terdapat penambangan pasir. Adanya danau sama halnya dengan sumber air sungai mempunyai fungsi ruang antara lain:

- Adanya kawasan pertanian dan perkebunan
- Adanya kawasan permukiman baik di desa maupun di kota
- Adanya kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan pelayanan jasa.
- Adanya kawasan perikanan darat.

c. Rawa

Rawa berada pada kawasan yang selalu tergenang air yaitu di daerah belakang pesisir pantai dengan jenis pantai bermangrove. Daerah rawa mempengaruhi daerah disekitarnya menjadi tergenang air jika topografi disekitarnya lebih rendah sehingga memudahkan aliran air mengalir ke tempat yang lebih rendah.

Sebaran rawa antara lain berada hampir di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Timur terutama rawa dengan vegetasi mangrove antara lain di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai. Selain itu terdapat wilayah dengan morfologi rawa bervegetasi rendah yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Bandar Sribhawono, Way Jepara dan Braja Selehah. Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat daerah rawa yang terbentuk karena limpasan air dari daerah sekitarnya. Rawa ini hanya bersifat sementara dan sering disebut dengan rawa belakang, yang terbesar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Melinting dan Gunung Pelindung.

Daerah rawa belakang biasanya merupakan daerah potensi banjir dengan jenis tanahnya adalah tanah-tanah organik (gambut) dengan kedalaman tanah 90 cm yang mempunyai kandungan air permukaan banyak dan menunjukkan drainase yang jelek. Banjir dapat terjadi karena morfologinya yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian muka tanah lebih rendah atau sama dengan elevasi muka air laut pasang rata-rata.

d. Air Tanah

Air tanah sebagai sumber air di dalam tanah menjadi potensi sumberdaya air satu-satunya yang lebih baik secara kualitas daripada air permukaan (sungai), dimana sungai mudah tercemar. Produktifitas air tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi dari sebaran litologi dan sistem akuifernya. Batuan penyusunnya yang sebagian besar adalah andesit, mempunyai sifat tidak mampu untuk menyimpan dan meloloskan air. Pada daerah dengan tingkat pelapukan tinggi maka batumannya kini mampu untuk bertindak sebagai akuifer.

Berdasarkan hasil survei mengenai kondisi air tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Labuhan Maringgai, dengan melakukan pengamatan sumur gali penduduk setempat. Dari 47 buah sumur gali yang diteliti yang tersebar di seluruh Kecamatan Labuhan Maringgai ada beberapa sumur gali yang kedalamannya lebih dari 20 meter dan selebihnya kedalaman sumur gali di daerah ini kurang dari 15 meter. Hal tersebut menandakan bahwa kedalaman sumur gali di daerah ini sangat tergantung pada kondisi topografi setempat.

Sumur gali yang terdapat pada elevasi antara 20 m — 30 m di atas permukaan laut, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 8 m — 14 m dengan muka air tanah bebas sangat bervariasi antara 7 m — 13 m di bawah permukaan tanah setempat. Tebal air sumur pada

daerah elevasi ini berkisar antara 0,7 m — 3 m. Pada musim kemarau air sumur umumnya tidak kering. Mutu air sumur gali berdasarkan pengukuran pH berkisar antara 6 — 7, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus dan kondisi mutu air sumur gali umumnya jernih dan tidak berbau. Sumur gali penduduk di daerah elevasi ini sangat terbatas jumlahnya karena batuan yang ditembus sangat keras dan tanah pucuknya cukup tebal.

Sumur gali yang terdapat pada elevasi kurang dari 20 meter dari permukaan laut yaitu daerah dataran rendah dan pematang pantai, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 0,8 m — 7 m, dengan muka air tanah bebas (TKA/static water level) berkisar antara 0,2 m — 4 m. Pada musim kemarau air sumur tidak kering sama sekali, terutama di daerah pematang pantai. Mutu air sumur berdasarkan hasil pengukuran pH umumnya menghasilkan nilai 6, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus umumnya agak keruh. Air tanah dapat juga tercemar antara lain oleh aktivitas pemboran tanah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Pola penggunaan lahan seperti permukiman di perkotaan yang tidak memperhatikan arah gerakan air tanah dan jaraknya dalam penempatan *septic tank*. Pencemaran lainnya adalah intrusi air laut yang akan menyebabkan kadar salinitas tinggi dan tidak dapat digunakan sebagai sumber air minum lagi.

(3) Topografi

Pada umumnya wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25-55 meter diatas permukaan laut (mdpl), kecuali Kecamatan Pasir Sakti, Braja Selehah, dan Bumi Agung yang hanya berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan sebaran tingkat kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari kelas lereng datar (kelerengan 1-3 %) yaitu seluas 96.627 Ha, kelas lereng landai (3- 8 %) yaitu seluas 198.248 Ha, kelas lereng bergelombang (8-15%) yaitu seluas 213.911 Ha, dan kelas lereng berbukit (15 – 40 %) yaitu seluas 16.039 Ha. Adapun data selengkapnya untuk masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Luas Lahan Berdasarkan Kelas Lereng Di Kabupaten Lampung Timur

No.	Kecamatan	Kelerengan				Jumlah
		0-3 %	0-8 %	8-15 %	15-30 %	
1	Metro Kibang	-	987,17	6.690,83		7.678
2	Batanghari	1.459,82	8.297,18	5.131,00		14.888
3	Sekampung	1.410,08	4.443,04	8.980,88	-	14.834
4	Marga Tiga	1.677,69	8.946,66	13.638,79	809,86	25.073
5	Sekampung Udik	3.227,24	20.813,20	6.979,62	2.891,94	33.912
6	Jabung	13.422,29	10.506,23	2.779,30	77,18	26.785
7	Pasir Sakti	19.394,00	-	-	-	19.394
8	Wawai Karya	5.004,34	12.916,44	3.186,22	-	21.107
9	Marga Sekampung	1.950,94	6.324,17	7.672,52	1.784,37	17.732
10	Labuhan	15.376,42	1.055,45	1.783,33	1.283,80	19.499
	Maringgai					
11	Mataram Baru	4.139,34	1.947,73	1.835,46	33,47	7.956

No.	Kecamatan	Kelerengan				Jumlah
		0-3 %	0-8 %	8-15 %	15-30 %	
12	Bandar Sribhawono	1.767,59	1.090,58	12.031,67	3.681,16	18.571
13	Melinting	1.681,87	1.065,54	9.740,65	1.441,94	13.930
14	Gunung Pelindung	3.430,54	585,86	3.835,60	-	7.852
15	Way Jepara	6.551,00	3.637,90	12.738,10		22.927
16	Braja Selebah	8.290,69	83,15	16.387,16	-	24.761
17	Labuhan Ratu	-	3.955,15	44.582,64	13,21	48.551
18	Sukadana		36.978,82	35.069,35	3.627,83	75.676
19	Bumi Agung		5.627,97	1.689,03	-	7.317
20	Batanghari Nuban		11.940,17	5.734,27	394,57	18.069
21	Pekalongan		6.917,30	3.095,70	-	10.013
22	Raman Utara	120,54	15.642,22	374,24		16.137
23	Purbolinggo	-	22.137,20	65,8	-	22.203
24	Way Bungur	7.722,59	13.335,99	16.579,42	-	37.638
	Jumlah	96.626,99	198.247,95	213.910,74	16.039,32	532.503

Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur, 2011-2031

(4) Geologi

Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur berbentuk bentang alam rendah dan menggelombang lemah. Bentang alam datar, khususnya daerah sungai-sungai bermeander, sesuai untuk endapan aluvium Kuartar. Daerah bertimbulan rendah sampai sedang, dengan bukit bukit bulat menggelombang sesuai untuk satuan sedimen yang berumur tersier dan kuartar. Tabel 2.4. memperlihatkan susunan stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2.4
Susunan Stratigrafi Wilayah Kabupaten Lampung Timur

Batuan Kwartar	
(Qal)	Alluvium : bongkah, kerikil, pasir, tanah, lumpur, dan lempung
(Qbs)	Basalt Sukadana basalt berongga
(Qak)	Pasir Kuarsa : pasir kuarsa halus
(Qs)	Endapan Rawa: pasir, lanau, lumpur, lempung, mengandung sisa tanaman
Batuan Tersier	
(Qpt)	Formasi Terbanggi : batu pasir dengan sisipan batu lempung
(Qty)	Formasi Lampung : tuffa berbatu apung, tuffa riolitik

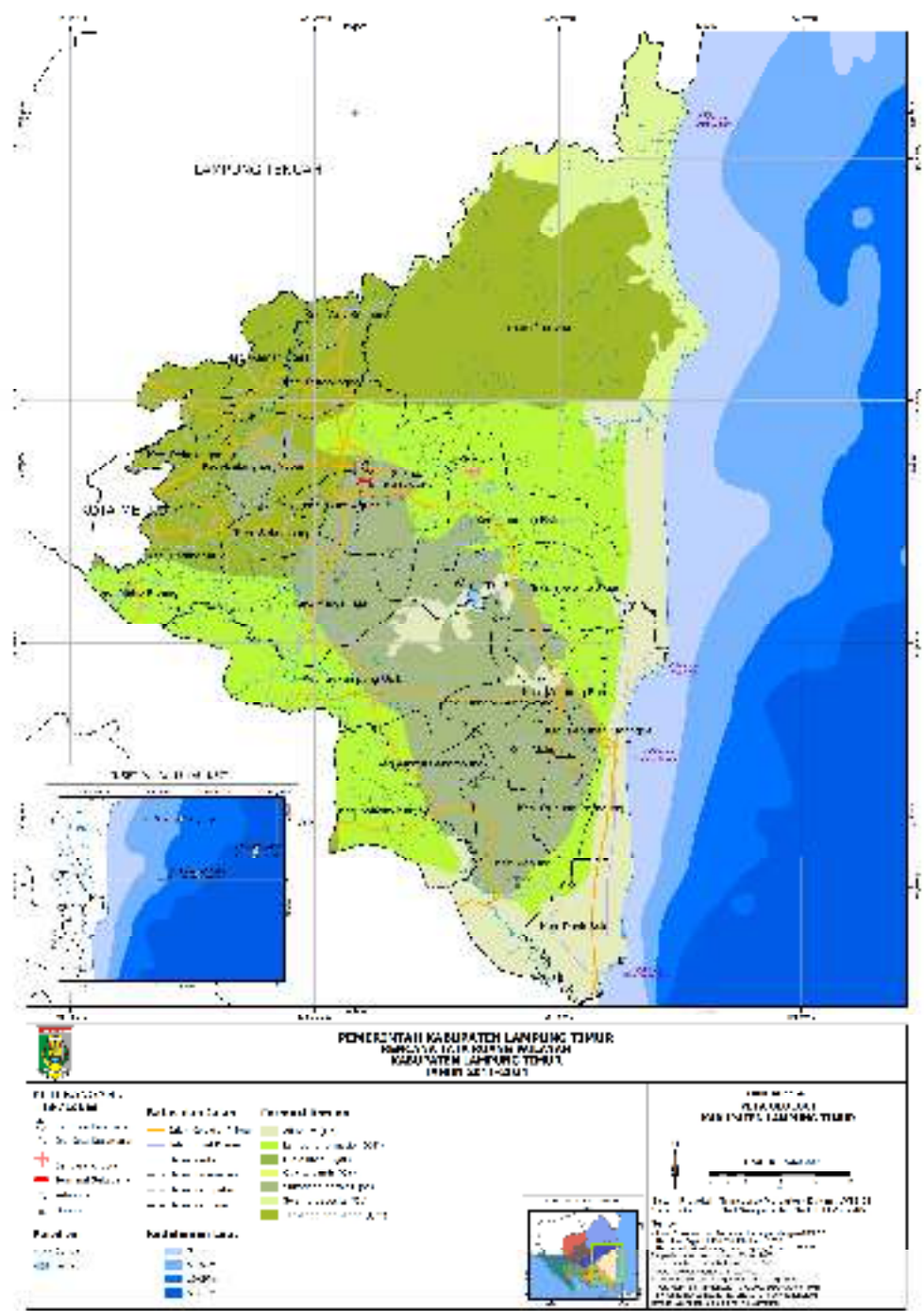
Sumber : RTRW Kabupaten Lampung timur, 2011-2031

Lapisan batuan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh batuan sedimen. Berdasarkan lithologinya Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

- a) Endapan Permukaan (alluvium) seluas 74.470,58 Ha (13,79% luas wilayah) yang terdiri dataran rawa pasang surut yang terbentuk dari sedimen holosen yang mengandung liat marine, endapan sungai dan rawa serta endapan pasir pantai. Karakteristik geologi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Pasir Sakti (18.869,23 hektar) yang berada didaerah pesisir dan muara sungai.

- b) Batuan gunung api (Formasi Lampung) yang terbentuk dari endapan gunung api (Qhw), tufa Lampung (Qlv), dan andesit tua (Tov). Formasi batuan gunung api ini seluas 122.405,34 Ha (22,98% luas wilayah), meliputi hampir seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur dimulai dari bagian barat hingga timur berbatasan dengan endapan holosen. Luas terbesar terdapat pada kecamatan Labuhan Ratu yakni 33.340,90 Ha dan luas terkecil pada Kecamatan Raman Utara (22,26 Ha).
- c) Batuan sedimen (Formasi Terbanggi) yang terdiri dari batuan gamping koral (Qg), formasi Telisa (Tmtp), sebagian besar formasi Baturaja (Tmbg) dan formasi lingsing (Kls). Formasi ini seluas 173.181,19 Ha (32,52% luas wilayah) berarti bahwa batuan sedimen banyak terdapat di sebagian besar di bagian utara dan sedikit selatan, dengan dominasinya terdapat di Kecamatan Way Bungur (37.638 Ha).

Gambar 2.3 Peta Sebaran Struktur Geologi Di Kabupaten Lampung Timur



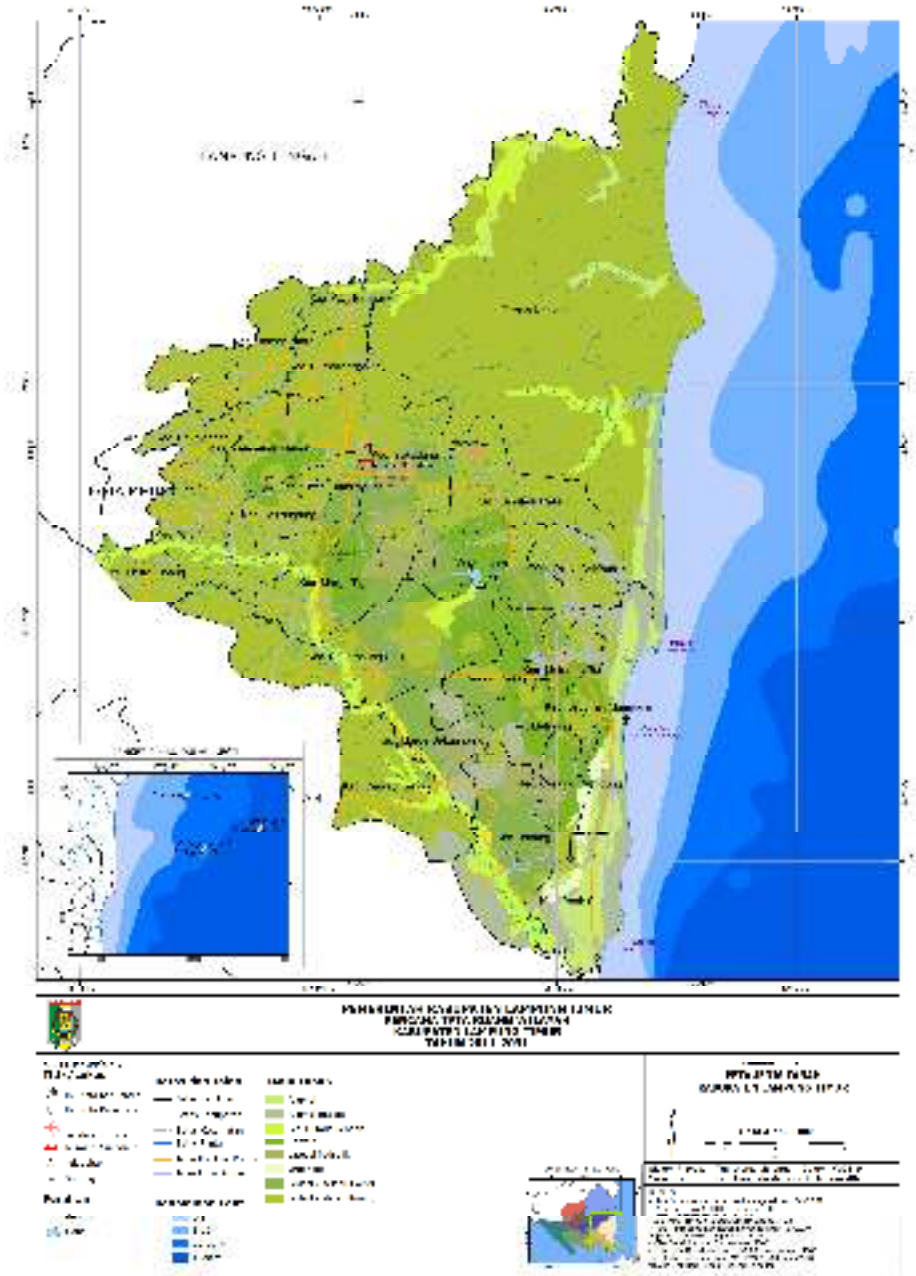
Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011 – 2031

d) Batuan beku (Basalt Sukadana) yang terbentuk dari basalt Sukadana (Qb), batuan terobosan miosen seperti granit (Tmgr) dan granodiorit (Tmgd). Formasi batuan beku Kabupaten Lampung Timur seluas 163.445,9 Ha (30,69% luas wilayah), dengan luas terbesar terdapat di Kecamatan Sukadana (27.528,42 ha) dan luasan terkecil terdapat di Kecamatan Wawai Karya (75,77 Ha).

(5) Jenis Tanah dan Kemampuan Lahan

Jenis tanah di Wilayah Kabupaten Lampung Timur umumnya didominasi oleh tanah jenis podsolik merah kuning, podsolik kekuning-kuningan, latosol cokelat kemerahan, latosol merah, hidromof kelabu, alluvial hidromof, regosol cokelat kekuningan, alluvial cokelat kelabu dan latosol merah. Adapun peta sebaran jenis tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Peta Sebaran Jenis Tanah Di Kabupaten Lampung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011 - 2031

Klasifikasi kemampuan lahan (*land capability classification*) merupakan penilaian komponen- komponen lahan secara sistematis dan pengelompokannya kedalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaan secara lestari. Adapun kriteria klasifikasi kemampuan lahan sebagai berikut :

- **Kelas 1** : Wilayah baik sekali, hampir tidak memiliki penghambat dalam pengelolaannya, dapat digunakan untuk segala macam aktivitas.
- **Kelas 2** : Wilayah baik, ada sedikit penghambat, dapat digunakan untuk berbagai aktivitas dan khusus untuk budidaya pertanian perlu diatasi dalam usaha pertanian.
- **Kelas 3** : Wilayah sedang, beberapa hambatan perlu diatasi dalam usaha pertanian.
- **Kelas 4** : Wilayah jelek, berbagai penghambat alam membatasi penggunaan lahan untuk pertanian biasa, baik untuk tanaman tahunan, hutan produksi, dan perternakan.
- **Kelas 5** : Wilayah amat jelek, faktor-faktor alam tidak memungkinkan untuk suatu usaha pertanian, hanya baik untuk hutan lindung atau margasatwa.

Wilayah dengan nilai skor tinggi menunjukkan bahwa area tersebut memiliki keterbatasan atau faktor penghambat yang cukup besar untuk mengembangkan wilayah perkotaan. Untuk wilayah perkotaan diharapkan untuk memiliki nilai keterbatasan yang cukup kecil karena daya tampung aktivitasnya yang relative besar. Seperti pada kemampuan lahan kelas 1 (sangat baik) yang menunjukkan tingginya tingkat kesetabilan lereng, ketersediaan air yang banyak, tidak peka terhadap erosi, dan memiliki tingkat yang aman terhadap bencana alam lainnya.

Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam klasifikasi kemampuan lahan sangat baik (kelas 1) seluas 88.308,39 Ha atau 16,58% dari luas wilayah yang meliputi Kecamatan Batanghari, Braja Selehah, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Marga Sekampung, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Pasir Sakti, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Waway Karya, dan Way Bungur. Tidak menutup kemungkinan bagi kelas 1 diperuntukan bagi aktivitas budidaya pertanian lahan basah atau sawah karena faktor ketersediaan air yang banyak dan tingkat drainasenya terhambat sehingga kebutuhan air untuk areal persawahan dapat terpenuhi dengan maksimal. Namun bila diperuntukan bagi aktivitas perindustrian, perlu dipertimbangkan faktor kemampuan lahannya, antara lain faktor kesetabilan lereng dan tingkat erosivitas lahan.

Daerah dengan klasifikasi kemampuan lahan baik (kelas 2) dengan beberapa faktor penghambat. Keterbatasan kondisi fisik alam yang terjadi kendala antara lain tingkat erosifitasnya yang lebih peka dibandingkan dengan kelas kemampuan lahan yang rendah. Luas wilayah dengan kriteria lahan baik adalah 101.859,32 Ha setara dengan 19,13% luas wilayah kabupaten Lampung Timur yang meliputi Kecamatan Bandarsribhawono, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana dan Way Jepara. Lahan kelas 2 masih dapat digunakan untuk menampung aktifitas manusia tetapi bagi aktivitas budidaya pertanian perlu adanya sedikit usaha untuk intensifikasi (mekanisasi pertanian) untuk meminimalisasi faktor pembatas tersebut. Namun bila faktor pembatas tersebut diabaikan, pada umumnya tidak berakibat fatal terhadap aktifitas lainnya.

Kabupaten Lampung Timur dengan tingkat klasifikasi kemampuan lahan sedang (kelas 3) seluas 70.411,50 Ha (13,22% dari luas wilayah) terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari, Batnghari Nuban, Gunung Pelindung, Labuhan Ratu, Mataram Baru, Metro Kibang, Pekalongan Purbolinggo, Waway Karya dan Way Bungur. Faktor pembatas yang dihadapi

cenderung lebih banyak, sehingga perlu penanganan terlebih dahulu sebelum melakukan budidaya pertanian. Faktor pembatas tersebut diantaranya tingkat erosivitas yang cenderung peka dan tingkat drainasenya agak cepat, bila digunakan untuk budidaya lebih sesuai untuk tanaman perkebunan karena tidak membutuhkan air yang cukup banyak. Selain itu, dengan adanya tanaman keras dapat untuk membantu menopang badan tanah sehingga efek erosi tanah dapat ditekan.

Klasifikasi kemampuan lahan jelek (kelas 4) memiliki banyak pembatas alam diantaranya tanah yang lebih bersifat peka terhadap erosi, tingkat drainase tanah tinggi, kesetabilan tanah mulai berkurang (agak stabil), dan ketersediaan airnya sedikit, sehingga apabila dipergunakan untuk kawasan permukiman atau aktifitas selain budidaya pertanian akan beresiko tinggi. Wilayah di Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam kriteria ini adalah kecamatan Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selehah, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Marga Sekampung, Marga Tiga, Melinting, Metro Kibang, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Jepara, dan Way Bungur, total luasnya mencapai 230.548,04 Ha atau 43,30% dari luas wilayah kabupaten.

Sedangkan sisanya, 7,77% dari luas wilayah Kabupaten Lampung Timur setara dengan 41.375,76 Ha merupakan lahan dengan klasifikasi kemampuan lahan amat jelek (kelas 5) dicirikan dengan besarnya jumlah faktor penghambat sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai areal budidaya. Faktor penghambat yang berpengaruh antara lain morfologi lereng yang relative curam dan tidak stabil sehingga tingkat drainasenya cepat dan apabila diterpa hujan yang cukup deras dapat menyebabkan erosi. Di samping itu, tingkat drainase yang cepat menyebabkan tanah tidak sempat menyimpan air. Wilayah dengan klasifikasi amat jelek dapat dijumpai dikecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, dan Sukadana. Kawasan eksklusif adalah Taman Nasional Way Kambas.

(6) Penggunaan Lahan

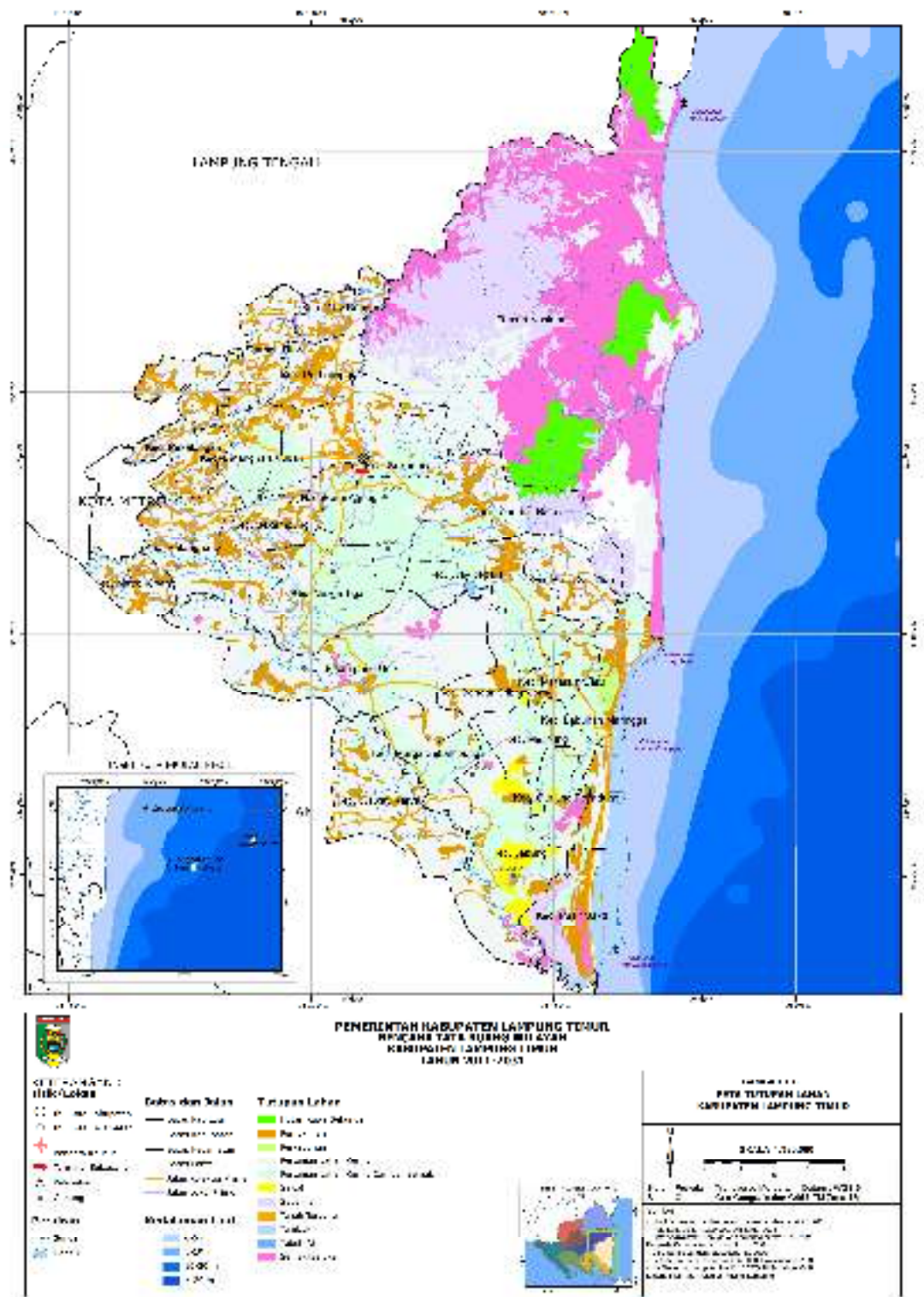
Lahan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Segala macam bentuk intervensi manusia secara sekilas dan permanen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat materiil maupun seprituil yang berasal dari lahan tercakup dalam pengertian penggunaan lahan, atau *land use*.

Penggunaan lahan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh hutan seluas 162.577,16 Ha atau 30,53% dari luas wilayah kabupaten. Sedangkan untuk kawasan budidaya, lokasi penggunaan untuk lahan sawah merupakan alokasi penggunaan yang paling luas yaitu seluas 94.884,10 hektar, setara dengan 17,82% dari luas wilayah kabupaten. Hal ini mencerminkan bahwa kawasan budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Lampung Timur adalah budidaya pertanian. Kemudian diurutan berikutnya adalah penggunaan lahan untuk permukiman dan tempat kegiatan penduduk dengan luas 63.742,81 hektar. Dengan demikian, Kabupaten Lampung Timur dapat dikatakan sebagai daerah agraris, yang ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Untuk lebih jelasnya, tutupan lahan di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Adanya hutan berkaitan erat dengan tersedianya kawasan resapan air serta sebagai habitat dan penjaga ekologi kehidupan binatang darat dan kehidupan biota laut, terutama yang berdekatan dengan terumbu karang. Hutan-hutan yang berada di wilayah daratan berupa hutan

yang secara natural tumbuh dan atau hutan dengan proses reboisasi (penghijauan). Menggunakan data hutan-hutan di wilayah daratan dapat dibedakan menurut status lahannya menjadi hutan lindung dan hutan produksi. Keberadaan hutan lindung di Kabupaten Lampung Timur saat ini telah mengalami pergeseran menjadi lahan budidaya, salah satunya dengan cara pembukaan hutan melalui penebangan untuk dijadikan sebagai ladang/tanaman lahan kering. Luas kawasan hutan lindung di wilayah daratan adalah 23.780,36 hektar atau hanya 4,47 % dari luas daratan wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Gambar 2.5 Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Lampung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 - 2031

Kasus pertanahan masih terjadi di Kabupaten Lampung Timur, meskipun demikian jumlah kasus cenderung menurun. Data pada tahun 2005 memperlihatkan adanya 8 kasus pertanahan, tahun 2007 menurun menjadi hanya 6 kasus. Pada tahun 2009 menurun kembali menjadi 5 kasus.

(7) Fungsi Kawasan

Sumber daya hutan mempunyai multi fungsi baik yang bersifat langsung (*tangible benefit*) seperti hasil hutan kayu dan non kayu, maupun yang tidak langsung (*intangible benefit*), seperti oksigen, kualitas lingkungan, ketersediaan air untuk irigasi (pengairan), dll. Sumber daya hutan di Kabupaten Lampung Timur dapat di analisa dari keberadaan kawasan-kawasan hutan yang ada, yaitu diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) :

- a) Hutan sebagai kawasan pelestarian alam, yaitu Taman Nasional Way Kambas
- b) Hutan-hutan yang mengisi wilayah darat (hutan lindung dan hutan produksi).
- c) Hutan-hutan yang mengisi wilayah pesisir/pantai (hutan mangrove).

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-11/2000, kawasan hutan di Kabupaten Lampung Timur ditetapkan **30,53 %** dari luas kabupaten. Sedangkan berdasarkan SK Gubernur Lampung Nomor G/283.A/B.IX/HK/2000 ditetapkan status tanah eks areal kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi areal penggunaan lain sebagai tanah negara, selanjutnya dalam SK Gubernur Lampung Nomor G/302/B.IX/HK/2000 ditetapkan sebagai eks areal HPK di Kabupaten Lampung Timur, meliputi Kawasan Way Rumbia (register 8), Muara Sekampung (register 15), Way Kibang (register 37), dan Gedong Wani (register 40), seperti pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Kawasan Hutan di Kabupaten Lampung Timur

Nama Kawasan	Nomor Register	Dasar Hukum	Hutan Lindung (Ha)	Hutan Konservasi (Ha)	Hutan Produksi (Ha)
1.Gunung Balak	38	Kep.Menhut No.72/KPTS-II/2000	22.292,50	-	-
2.Way Kambas	9	Kep.Menhut No.670/KPTS-II/1999	-	125.621,30	-
3.Muara Sekampung	15	Kep.Menhut No.256/KPTS-II/2000	1.488,36	-	-
4.Way Kibang	37	Kep.Menhut No.256/KPTS-II/2000	-	-	6.538,00
5.Gedung Wani	40	Kep.Menhut No.256/KPTS-II/2000	-	-	6.637,00
Jumlah	Jumlah/Total = 162.577,16 Ha		23.780,86	125.621,30	13.175,00

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Luas kawasan hutan di Kabupaten Lampung Timur mencapai 162.577,16 Ha atau 30,53% dari luas wilayah kabupaten. Berdasarkan fungsinya kawasan hutan terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 23.780,86 Ha, kawasan hutan konservasi seluas 125.621,30 Ha, dan kawasan hutan produksi seluas 13.175,00 Ha.

Kawasan hutan lindung Kabupaten Lampung Timur berada di Kawasan Gunung Balak (Reg. 38) dan Kawasan Muara Sekampung (Reg. 15) yaitu Kecamatan Jabung, Sekampung Udik, Way Jepara, Bandar Sribhawono, Marga Sekampung dan Melinting. Kawasan ini memberikan perlindungan bagi kawasan disekitarnya, sebagai daerah resapan air (*water catchment area*), penahan erosi, pencegahan banjir bagi daerah di bawahnya, dan area konservasi tanah. Sedangkan Kawasan hutan konservasi (Suaka Alam) yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur termasuk didalamnya adalah Taman Nasional Way Kambas. Way Kambas merupakan kawasan Suaka Nasional karena memiliki potensi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna dan berbagai tipe vegetasi khas serta merupakan perwakilan tipe ekosistem hutan daratan rendah, vegetasi hutan pantai, mangrove, hutan gambut, rawa pasang surut, dan rawa air tawar. Secara keseluruhan, Taman Nasional Way kambas merupakan kesatuan ragam alamiah yang mempesona bagi kegiatan wisata.

Hutan-hutan yang mengisi wilayah perairan/pesisir adalah hutan mangrove. Hutan mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi pantai dan tempat pemijahan, pembesaran dan tempat mencari makan berbagai macam biota laut. Hutan mangrove tersebar wilayah pesisir Kabupaten Lampung Timur meskipun tidak merata di sepanjang pesisir pantai. Luas total hutan mangrove adalah 3.202,516 Ha atau 0,6% dari luas wilayah daratan Kabupaten Lampung Timur, terdapat di Taman Nasional Way Kambas 1.835,8 ha dan sisanya 1.366,716 ha, tersebar di sepanjang pesisir pantai Timur, Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pasir Sakti.

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 256 Kpts-11/2000, terbagi kedalam beberapa wilayah diantaranya Way Kibang dan Gedong Wani. Pengelolaan kawasan hutan produksi sekitar kawasan lindung di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar sudah dilepas sehingga statusnya menjadi tanah masyarakat yang pembuatan sertifikat alih fungsinya telah diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan produksi yang dapat Dikonversi (HPK) di Provinsi Lampung. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian hak atas tanah kepada masyarakat dilaksanakan oleh Kanwil BPN Provinsi Lampung dengan pola pembuatan Sertifikat melalui Ajudikasi enam kabupaten yang terdapat lahan Eks HPKnya termasuk Kabupaten Lampung Timur.

Hutan sebagai penjaga keseimbangan ekologi bagi daerah sekitarnya dalam arti bila terjadi kerusakan hutan maka akan menyebabkan bencana bagi daerah di bawahnya. Sebagai contoh, kerusakan hutan di bagian hulu DAS dapat menimbulkan kekeruhan air pada wilayah DAS tersebut. Penyebab utama kerusakan kawasan lindung/konservasi antara lain:

- a) Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan.
- b) Rendahnya pengawasan terhadap kawasan lindung karena kurangnya sarana dan Sumber Daya Manusia.
- c) Kurangnya peranan masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung.
- d) Belum adanya batasan kawasan lindung berupa tanda batas permanen yang diakui oleh semua pihak.

Dalam hal ini, pola penggunaan lahan cenderung mengalami perubahan dari fungsi hutan menjadi kawasan budidaya di daerah Kabupaten Lampung Timur, sehingga luas kawasan hutan menurun dan menjadi lahan yang ditelantarkan. Fungsi hutan sebagai kawasan resapan air dan termasuk kawasan lindung menjadi terganggu secara kualitas dan kuantitasnya. Secara umum, indikator indikator gangguan lingkungan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Timur, antara lain:

- a) Alih fungsi hutan menjadi ladang karena adanya penebangan liar (perambahan hutan lindung), sehingga mengurangi fungsinya sebagai daerah tangkapan air.
- b) Terjadinya penebangan liar tanpa adanya penanaman kembali menyebabkan produktivitas lahannya menurun akibatnya muncul semak belukar. Selain itu, lahan yang ditinggalkan rawan untuk terjadinya erosi dan longsor terutama pada daerah perbukitan.
- c) Perubahan bentang alam dengan timbulnya kawah-kawah bekas galian yang tidak ditimbun kembali (reklamasi) sehingga menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitarnya.
- d) Adanya aktivitas penambangan pasir laut maupun budidaya perikanan air payau (tambak) berada di tepi pantai yang dapat merusak ekosistem kawasan hutan bakau (mangrove) sehingga menyebabkan rawan terjadinya abrasi.
- e) Hadirnya berbagai kawasan budidaya yang melahirkan ekosistem baru seperti Kawasan Perumahan, Kawasan industri, Kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta kawasan pelayanan umum lainnya. Kawasan tersebut memunculkan masalah lingkungan baru lainnya seperti pencemaran air dari limbah domestik, pencemaran udara dan kebisingan.

Keberadaan hutan lindung di Kabupaten Lampung Timur saat ini telah mengalami pergeseran menjadi lahan budidaya, salah satunya dengan cara pembukaan hutan melalui penebangan untuk dijadikan sebagai ladang/tanaman lahan kering. Beberapa bagian kawasan pesisir Kabupaten Lampung Timur, mulai dari Tanjung Penet hingga Ketapang di Kabupaten Lampung Selatan pada saat ini mengalami perubahan fungsi dari rawa-rawa dan hutan vegetasi mangrove menjadi lahan pertanian tanaman pangan dan tambak. Sebagian besar tambak yang diusahakan merupakan tambak tradisional dan sebagian kecil saja yang merupakan tambak semi-intensif dan intensif. Konversi lahan umumnya diawali dari pinggir pantai yaitu dengan penebangan vegetasi mangrove untuk difungsikan menjadi kegiatan pertambakan, kemudian berkembang ke arah daratan yang berakibat dapat mempercepat terjadinya abrasi di pantai Timur. Akibat dari kerusakan hutan dan lahan dapat menyebabkan kekritisan lahan di wilayah Kabupaten Lampung Timur seperti yang terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Kondisi Lahan Kritis di Kabupaten Lampung Timur

Nomor	Kelas Kekritisan Lahan	Luas (Ha)
1	Sangat Kritis	201,6
2	Kritis	28.458,7
3	Agak Keritis	122.472,0
	Total	151.132,3

Sumber : RTkRHL DAS Way Seputih Way Sekampung, 2009

Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya baik sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan – lahan tersebut antara lain adalah :

- a) Tanah gundul yang sudah tidak bervegetasi sama sekali.
- b) Ladang alang-alang atau tanah yang ditumbuhi semak belukar yang tidak produktif.
- c) Areal yang berbatu-batu, berjurang atau berparit sebagai akibat dari erosi tanah.

- d) Tanah yang keadaan solumnya sudah tipis sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik.
- e) Tanah yang tingkat erosinya melebihi erosi yang diperkenankan.

(8) Irigasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006, Pasal 18 Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a) Menetapkan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b) Melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota;
- c) Melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d) Memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;
- e) Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu kabupaten/kota;
- f) Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- g) Memfasilitasi penyelesaian sengketa antardaerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- h) Memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- i) Membentuk komisi irigasi kabupaten/kota;
- j) Melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
- k) Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan / atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu kabupaten/kota.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PP No. 20 Tahun 2006, berdasarkan KEPMEN No. 390 Tahun 2007, wilayah irigasi yang termasuk dalam lingkup wewenang Kabupaten meliputi wilayah irigasi dengan luas areal < 1000 ha. Daerah irigasi yang termasuk dalam wilayah pengelolaan wewenang Kabupaten Lampung Timur disajikan dalam Tabel 2.7. Adapun wilayah irigasi yang termasuk dalam lingkup wewenang pemerintah propinsi dan pemerintah meliputi wilayah irigasi dengan luas areal 1000-3000 ha dan > 3000 Ha. Daerah irigasi yang termasuk dalam wilayah pengelolaan pemerintah dan pemerintah propinsi yang berada di Wilayah Kabupaten Lampung Timur diuraikan sebagai berikut :

1) Daerah Irigasi Way Jepara

Daerah Irigasi Way Jepara terletak di Kecamatan Way Jepara dan Braja Selehah, Kab.Lampung Timur, yang berjarak ± 110 km dari Kota Bandar Lampung. Daerah Irigasi Way Jepara mempunyai luas potensial 6.230 ha dan fungsional 3.982 ha. Perbedaan nilai tersebut karena areal yang tidak dapat dikembangkan telah berubah fungsi menjadi pemukiman, perladangan

dan lain-lain. Bangunan utama berupa waduk dengan kapasitas waduk 35.000.000 m³ dan kapasitas efektif waduk 21.000.000 m³. Rencana pembangunan waduk sudah dimulai sejak tahun 1935 tetapi karena penempatan transmigran yang pertama gagal akibat terserang penyakit malaria, kemudian pada tahun 1957 dilakukan transmigrasi lagi berasal dari korban Gunung Merapi dan Gunung Agung Bali yang berjumlah 16.491 jiwa.

Tabel 2.7
Daerah Irigasi Wewenang Kabupaten Lampung Timur

No	Nama Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Lokasi (Kecamatan)	No	Nama Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Lokasi (Kecamatan)
1	Way Sumber Maju	200	Kec. Waway Karya	17	Way Rawa Tulung Sunt	50	Kec. Raman Utara
2	Way Bekarang Atas	500	Kec. Batang Hari	18	Way Bali	140	Kec. Raman Utara
3	Way Kemit	200	Kec. Marga Tiga	19	Way Rawa Kelinting	45	Kec. Raman Utara
4	Way Lehan	250	Kec. Sukadana	20	Way Pugung Raharjo	350	Kec. Purbolingo
5	Way Kawat	200	Kec. Sukadana	21	Way Rawa Perbatasan	200	Kec. Raman Utara
6	Way Ramayana	100	Kec. Pekalongan	22	Way Kerikil	250	Kec. Purbolingo
7	Way Bekarang Bawah	450	Kec. Bumi Agung	23	Way Rawa Ganefo	60	Kec. Raman Utara
8	Way Tangkit	276	Kec. Sukadana	24	Way Tulung Praja	266	Kec. Sukadana
9	Way Rawa Mangun	200	Kec. Pekalongan	25	Way Tambah Luhur II	10	Kec. Way Bungur
10	Way Tulang Pies	60	Kec. Sukadana	26	Way Tambah Luhur I	29	Kec. Way Bungur
11	Way Napal	175	Kec. Sukadana	27	Way Rawa Tanjung Kus	90	Kec. Way Bungur
12	Way Karang Anyar	325	Kec. Sukadana	28	Way Tegal Ombo	30	Kec. Sukadana
13	Way Rawa Sukoharjo	80	Kec. Purbolingo	29	Way Tegal Yoso I	25	Kec. Sukadana
14	Way Dono Mulyo	200	Kec. Sukadana	30	Way Batu Keting	374	Kec. Sekampung Udik
15	Way Sumbu Sari	35	Kec. Raman Utara	31	Way Andak	168	Kec. Sukadana
16	Way Handak	168	Kec. Purbolingo				
					Luas Total	5.506	

Sumber : KEPMEN No. 390 Th. 2007, dan Dinas PU Kabupaten Lampung Timur 2010

2) Daerah Irigasi Way Curup

Daerah Irigasi Way Curup terletak di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung. Lokasi terletak pada 3 desa yaitu Karang Anyar, Margasari dan Sriminosari. Jarak lokasi 130 km ke arah timur dari Bandar Lampung dan 80 km ke utara dari pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Daerah Irigasi Way Curup mempunyai luas potensial 5.116 ha dan fungsional 3.478 ha. Adanya perbedaan luas tersebut karena areal yang tidak dapat dikembangkan telah berubah fungsi menjadi pemukiman, perladangan dan lain-lain.

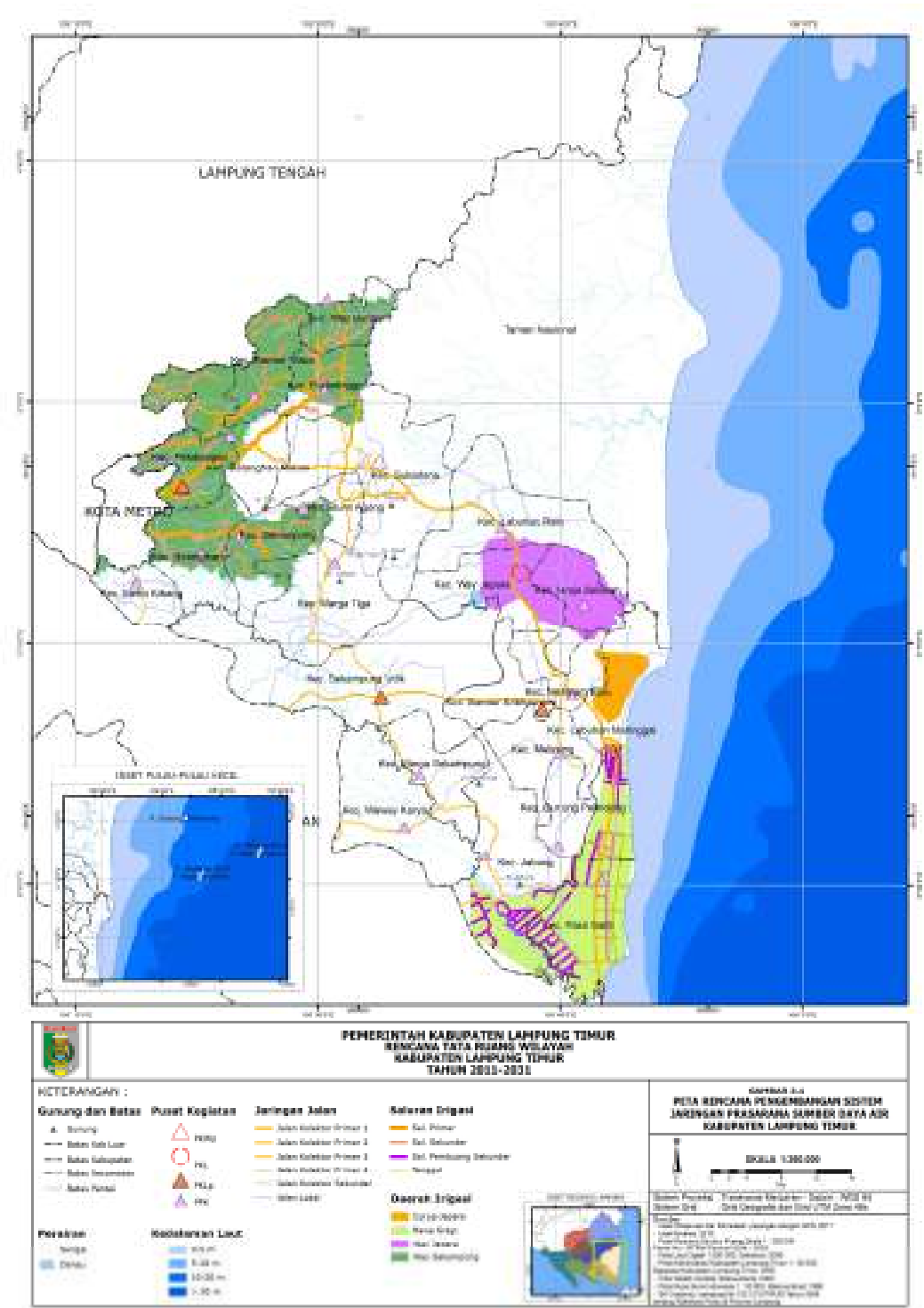
3) Daerah Irigasi Way Sekampung

Daerah irigasi Way sekampung terdiri dari : daerah irigasi Way Sekampung Bunut, daerah irigasi Way Sekampung Batanghari, dan daerah irigasi Way Sekampung Batanghari Utara. Daerah Irigasi Way Sekampung Bunut yang termasuk kedalam Sekampung Sistem, mendapat air dari Bendung Argoguruh pada Way Sekampung di Desa Tegineneng, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Daerah Irigasi Sekampung Bunut mempunyai luas potensi sawah 6.296 ha dan luas sawah fungsional 5.943 ha.

Daerah Irigasi Sekampung Batanghari, yang termasuk kedalam Sekampung System, mendapat air dari Bendung Argoguruh pada Way Sekampung di Desa Tegineneng, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, mempunyai luas potensi sawah 10.433 Ha dan luas sawah fungsional 10.137 Ha.

Daerah Irigasi Batanghari Utara, yang termasuk kedalam Sekampung System terletak di Kecamatan Probolinggo dan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, mempunyai luas potensi sebesar 6.230 Ha, dan luas sawah Irigasi fungsional sebesar 3.957 Ha. Daerah irigasi Batanghari Utara mendapat suplesi air dari Bendung Argoguruh melalui Feeder Canal I (Bangunan KH.2).

Gambar 2.6 Peta Sebaran Daerah Irigasi Di Kabupaten Lampung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011 - 2031

4) Daerah Irigasi Rawa Sragi

Daerah Irigasi Rawa Sragi direncanakan mendapat air dari Bendung karet Jabung. Lokasi daerah irigasi terletak di Kecamatan Jabung, dan Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Gambaran lokasi masing-masing daerah irigasi yang termasuk dalam Kabupaten Lampung Timur disajikan dalam Gambar 2.6.

2.1.2. *Potensi Pengembangan Wilayah*

Kawasan strategis wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan sebagai potensi bagi pengembangan wilayah dikarenakan mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup regional terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur adalah Kawasan Gunung Balak. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung, meliputi bagian wilayah 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Marga Sekampung, Kecamatan Sekampung Udik, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kecamatan Melinting, Kecamatan Way Jepara, dan Kecamatan Jabung. Secara fisik, kawasan ini merupakan kawasan bormorfologi perbukitan hingga bergunung dengan tingkat keterlereng tinggi dan merupakan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air yang menyuplai air untuk irigasi pada daerah irigasi Way Curup dan Way Jepara. Keberlangsungan system air yang ada di wilayah-wilayah tersebut sangat bergantung pada kondisi vegetasi di Gunung Balak. Namun pada saat ini telah terjadi perubahan fungsi lahan pada sebagian wilayah kawasan lindung menjadi kegiatan budidaya.

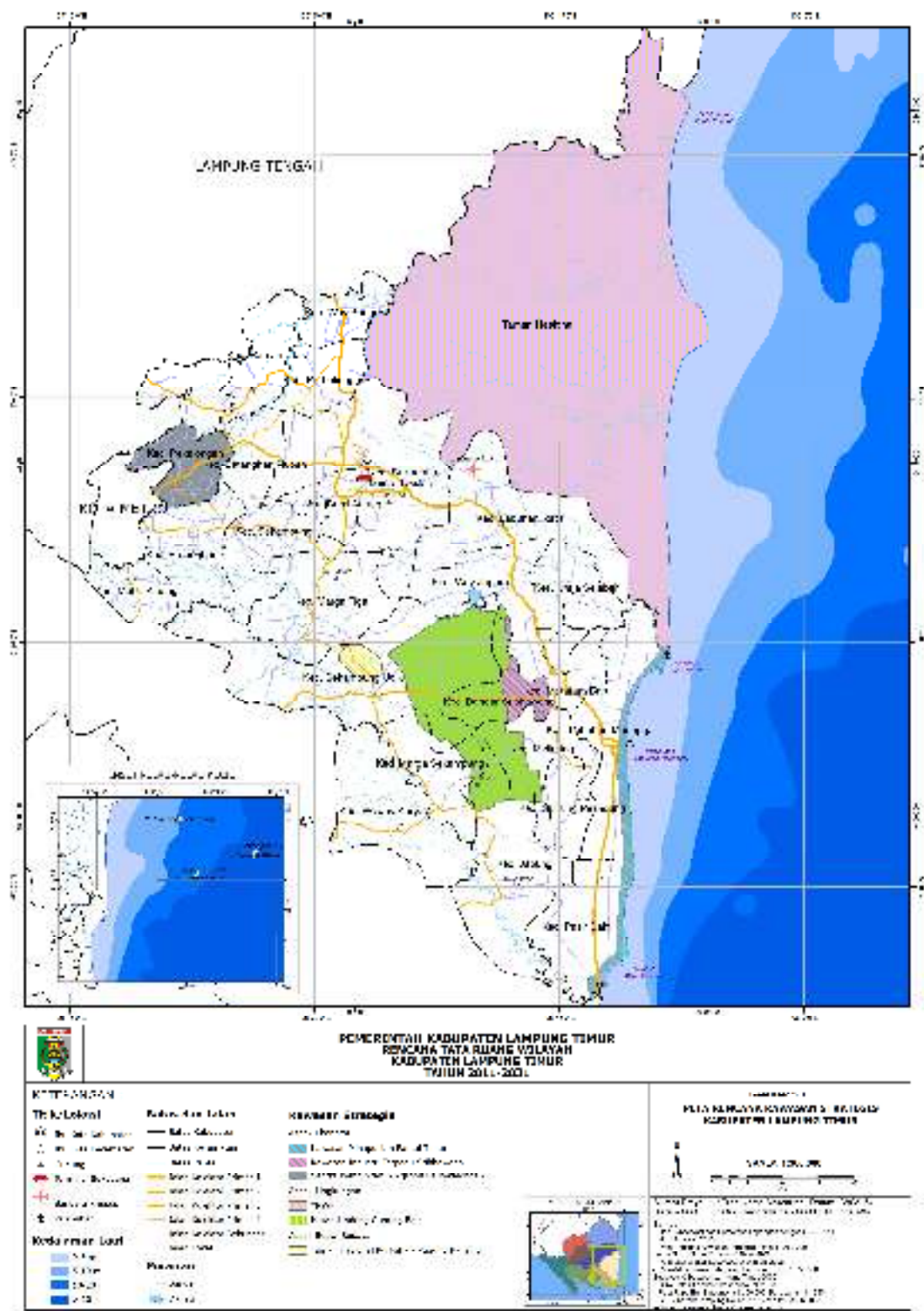
Sebagai salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat kawasan Labuhan Maringgai di Kecamatan Maringgai dan kawasan pelabuhan Way Sekampung di Kecamatan Pasir Sakti yang sebagian besar masyarakatnya berkecimpung di sektor kelautan dan perikanan terutama nelayan, pembudidaya, dan pengolahan ikan maka kawasan Kecamatan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti akan disiapkan untuk dikembangkan sebagai kawasan minapolitan. Minapolitan merupakan konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah. Untuk itu, pendekatan dalam pembangunan minapolitan dilakukan dengan sistem manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi.

Dalam membangun kawasan minapolitan di Labuhan maringgai Kecamatan Maringgai dan Way Sekampung di kecamatan Pasir Sakti dibutuhkan komitmen daerah melalui rencana strategis, alokasi dana melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan penetapan tata ruang yang seimbang. Kemudian mengembangkan sektor komoditas unggulan di kawasan Labuhan Maringgai dan Pelabuhan Way Sekampung seperti udang, patin, lele, tuna dan rumput laut untuk mendukung perkembangan kawasan minapolitan. Selain itu harus adanya fasilitas pendukung seperti keberadaan sarana dan prasarana seperti jalan, pengairan, serta listrik, dan adanya sistem mata rantai produksi dari hulu ke hilir, seperti lahan budi daya dan pelabuhan perikanan.

Ada sejumlah strategi dalam pengembangan kawasan minapolitan yakni pembangunan sistem dan usaha minabisnis berorientasi pada kekuatan pasar. Dengan ini, diharapkan dapat menembus batas kawasan kabupaten/kota, provinsi, dan Negara untuk menjangkau pasar global.

Selanjutnya pengembangan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan usaha komoditas unggulan berdasarkan kesesuaian lahan/perairan kondisi sosial, ekonomi, serta budaya setempat, selain itu peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perikanan yang diiringi dengan pengembangan usaha berbasis sistem minabisnis yang terintegrasi, mulai dari sektor hulu, hilir (pemasaran, pengolahan hasil, dan sebagainya) termasuk sektor jasa perbankan dan pendukung lainnya.

Gambar 2.7 Peta Rencana Kawasan Strategis di Kabupaten Lampung Timur



Apabila strategi yang diterapkan tercapai, maka kawasan Labuhan Maringgai di Kecamatan Maringgai dan Pelabuhan Way Sekampung di Kecamatan Pasir Sakti yang dikembangkan sebagai kawasan minapolitan dimana kawasan tersebut menjadi kawasan ekonomi atau sentra produksi maupun perdagangan komoditas kelautan dan perikanan dapat meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya, dan pengolahan ikan. Pada akhirnya, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti.

Sentra pembibitan buah-buahan dikembangkan di Pekalongan, sedang sentra pembibitan padi dikembangkan di Purbolinggo. Kedua wilayah ini dikembangkan menjadi sentra pembibitan untuk kegiatan pertanian di Kabupaten Lampung Timur dan wilayah lainnya. Sebagai salah satu lokasi bagi sentra penelitian tanaman komoditas unggulan, kawasan ini dapat menjadi salah satu daya tarik untuk pengembangan kawasan wisata agro.

Keberadaan jalur pergerakan yang terdapat di Bandar Sribhawono khususnya, secara keseluruhan sangat mempengaruhi kelancaran arus pergerakan baik yang keluar dari Kabupaten Lampung Timur maupun sebaliknya. Jalur pergerakan dengan kondisi baik saat ini dihubungkan oleh jaringan jalan yang menyatukan antara wilayah barat dan timur dan wilayah sekitarnya yang berada di bagian utara Kabupaten Lampung Timur.

Peranan sektor pertanian dalam pembentukan ekonomi wilayah Kabupaten Lampung Timur sangat dominan dibandingkan sektor industri dan jasa. Untuk itu, pengembangan sektor industri dan jasa dengan basis pada pengolahan hasil-hasil pertanian menjadi strategi untuk mengembangkan kawasan tersebut. Komoditas pertanian di daerah Kabupaten Lampung Timur umumnya merupakan produk-produk pertanian seperti kopi, lada, jagung, pisang, kakao, ubi kayu dan sebagainya. Dapat terlihat bahwa sektor-sektor industri sebenarnya sangat berkembang dengan mengolah produk-produk dari hasil pertanian yang diolah menjadi bahan baku, setengah jadi atau bahan jadi, sehingga secara keseluruhan kegiatan perekonomian makro Kabupaten Lampung Timur dapat dikatakan sangat tergantung pada produksi sektor pertanian dan pengolahannya.

Secara geografis Bandar Sribhawono berada pada koridor jalur jalan *feeder road* yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis provinsi seperti Pelabuhan Panjang, Kawasan Industri Tanjung Bintang yang menjadikannya sebagai salah satu simpul masuk dan keluar dari dan menuju Kabupaten Lampung Timur. Artinya bahwa Bandar Sribhawono menjadi dekat dengan pusat kegiatan di Provinsi Lampung sebagai pusat perekonomian dan sekaligus sebagai pusat bisnis dan pemerintahan.

Secara khusus Bandar Sribhawono memiliki potensi sumberdaya alam (SDA) yang besar seperti pertanian (padi, jagung, singkong), perkebunan (kopi, sawit dan lada). Potensi ini selayaknya memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian wilayah Kabupaten Lampung Timur dan menjadi kawasan yang dapat menyeimbangkan pertumbuhan kawasan-kawasan barat dan timur Kabupaten Lampung Timur.

Keberadaan prasarana wilayah di Bandar Sribhawono yang mendukung seperti jalan regional yaitu jalur Jalan Lintas Pantai Timur, dan jalur penghubung menjadi pendukung perkembangan wilayah ke depan. Keberagaman jalur alternatif yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Timur dan melalui Bandar Sribhawono mempengaruhi tingginya intensitas lalu lintas yang

ada. Koridor tersebut dapat menjadi jalur transportasi bagi kegiatan koleksi dan distribusi sentra industri-industri agro yang ada.

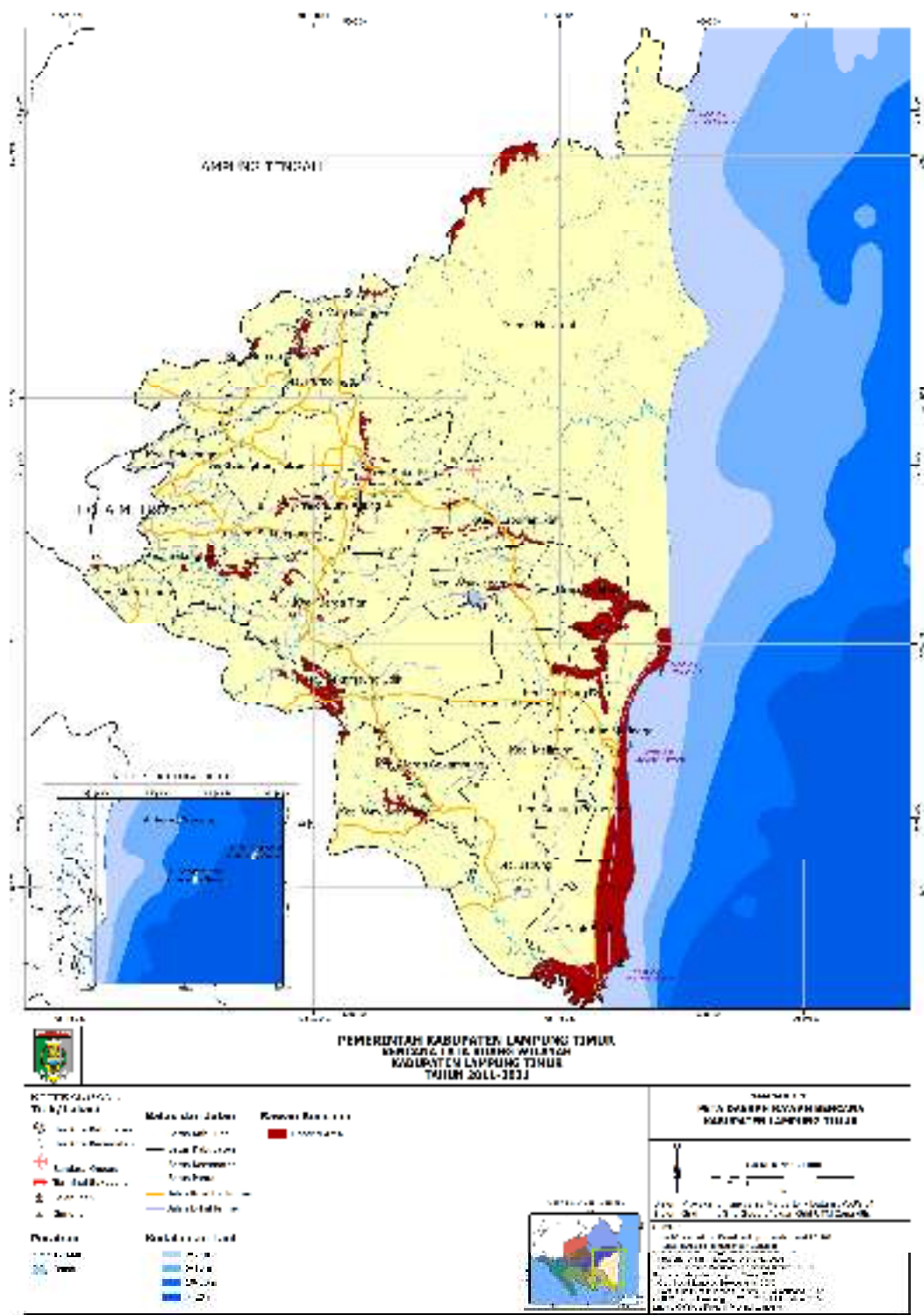
Kawasan yang memiliki nilai strategi dari sudut kepentingan sosial budaya di Kabupaten Lampung Timur adalah Taman Purbakala Pugung Raharjo. Taman Nasional Purbakala Pugung Raharjo merupakan kawasan cagar budaya di Kabupaten Lampung Timur. Pada lingkungan kawasan ini terdapat salah satu situs sejarah peninggalan megalitikum, Museum Budaya (bangunan tradisional peninggalan dari Sultan Kencana), Sesat Agung (bangunan Adat Lampung dengan luas kurang lebih 250 m²), dan Desa Tradisional Wana (arsitektur tradisional berupa rumah panggung khas masyarakat Lampung Melinting). Keberadaan Taman Nasional Purbakala Pugung Raharjo ini perlu dilestarikan sebagai kawasan cagar budaya dan dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata di Kabupaten Lampung Timur.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana diidentifikasi berupa kawasan yang secara keadaan fisik memiliki potensi terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh alam, maupun yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jenis bencana yang di sebabkan oleh alam diantaranya terjadinya gempa bumi, tanah longsor atau pergerakan tanah, puting beliung dan banjir. Sedangkan jenis bencana yang di akibatkan oleh perilaku manusia contohnya adalah kebakaran. Beberapa jenis bencana tersebut diatas tentunya menjadi pertimbangan dalam penataan ruang. Hal yang menjadi pertimbangan adalah hendaknya tidak menempatkan konsentrasi penduduk dalam jangka waktu lama pada kawasan – kawasan yang terdeliniasi sebagai kawasan rawan bencana. Artinya, beberapa aktivitas pada kawasan tersebut perlu diatur dan diawasi. Jika tidak cermat, kawasan ini bisa menjadi pembatas pertumbuhan ekonomi. Hanya ada beberapa aktivitas yang dapat diberlakukan pada kawasan ini. Aktivitas tersebut juga akan tergantung pada jenis bencana yang terjadi pada kawasan tersebut.

Jenis bencana yang terdapat di Kabupaten Lampung Timur yaitu hanya berupa banjir yang terjadi pada beberapa kecamatan di Lampung Timur. Beberapa kecamatan yang kerap digenangi banjir yaitu Kecamatan Braja Selehah, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Jabung, Waway Karya, Marga Sekampung, sekampung Udik, Sekampung, Batanghari, Raman Utara, Way Bungur, Sukadana, dan Bumi Agung. Terjadinya Banjir disebabkan oleh meluapkanya air sungai hingga menggenangi kawasan yang berada di sekitarnya. Untuk lebih jelasnya kawasan rawan bencana banjir ini dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8 Wilayah Rawan Bencana Di Kabupaten Lampung Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Timur 2011 - 2031

2.1.4. Demografi

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Salah satu ciri pokok penduduk di negara berkembang seperti Indonesia, selain jumlahnya besar, secara geografis penyebarannya tidak merata. Kabupaten Lampung Timur dengan luas wilayah sekitar 15% dari total wlayah Provinsi Lampung memiliki ciri yang sama. Persebaran penduduk yang tidak merata tidak terlepas dari adanya pengaruh geografis yaitu aspek kultur,

historis, dan ekologi, serta dukungan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Persebaran penduduk berorientasi pada potensi pertanian dan bergeser ke agroindustri. Sehingga terjadi pola pergeseran yang kurang ideal dengan kepadatan tertinggi pada daerah sentral daerah industri dan akses yang lebih baik.

Pada Tabel 2.8, tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur adalah sebesar 951.639 jiwa dengan tingkat kepadatan 179 jiwa/km². Kecamatan dengan jumlah penduduk yang terbesar adalah Kecamatan Sekampung Udik dengan jumlah penduduk sebesar 68.044 jiwa (7,15%) sedangkan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bumi Agung dengan jumlah penduduk 16.931 jiwa (1,78%). Jika dibandingkan tahun 2006 yang lalu, maka jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 11.658 jiwa. Artinya pertumbuhan penduduk rata-rata adalah sebesar 0,31% pertahun. Sehingga jika di proyeksikan hingga tahun 2015 maka jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Timur menjadi 966.481 jiwa. Salah satu faktor penyebab pertambahan penduduk di suatu wilayah disamping selisih kelahiran dan kematian adalah perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengalir dari daerah perdesaan ke perkotaan, dari daerah yang miskin ke daerah yang kaya yang pembangunannya berkembang pesat.

Tabel 2. 8
Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Timur 2006 – 2010

No	Kecamatan	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Metro Kibang	19.203	19.148	19.350	19.560	20.707
2	Batang Hari	51.891	51.743	52.290	52.858	54.601
3	Sekampung	58.451	58.284	58.900	59.540	59.819
4	Marga Tiga	44.709	44.581	45.052	45.541	43.395
5	Sekampung Udik	67.371	67.179	67.888	68.625	68.044
6	Jabung	45.916	45.785	46.269	46.771	46.550
7	Pasir Sakti	34.875	34.776	35.141	35.523	34.410
8	Waway Karya	36.443	36.339	36.724	37.123	34.454
9	Marga Sekampung	27.350	27.272	27.559	27.858	26.035
10	Labuhan Maringgai	64.838	64.653	65.335	66.044	65.750
11	Mataram Baru	26.819	26.743	27.026	27.319	26.672
12	Bandar Sribhawono	42.759	42.637	43.086	43.554	46.133
13	Melinting	25.800	25.726	25.998	26.280	24.630
14	Gunung Pelindung	21.815	21.753	21.981	22.220	21.052
15	Way Jepara	49.720	49.578	50.102	50.646	51.073
16	Braja Selehah	21.509	21.448	21.675	21.910	21.733
17	Labuhan Ratu	40.220	40.105	40.527	40.967	41.386
18	Sukadana	63.769	63.587	64.258	64.956	64.093
19	Bumi Agung	17.015	16.966	17.146	17.332	16.931
20	Batang Hari Nuban	41.165	41.048	41.481	41.931	40.992
21	Pekalongan	43.027	42.904	43.358	43.829	45.209
22	Raman Utara	35.343	35.242	35.614	36.001	35.760
23	Purbolinggo	38.661	38.551	38.960	39.383	40.152
24	Way Bungur	21.312	21.251	21.475	21.708	22.058
	Jumlah	939.981	937.300	947.193	957.479	951.639

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan berimplikasi langsung pada meningkatnya tingkat kepadatan suatu wilayah. Kepadatan penduduk mengindikasikan adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat dipandang sebagai modal dalam proses pembangunan. Berikut adalah kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2006 - 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.9

Berdasarkan data monografi penduduk di kecamatan Lampung Timur tahun 2010, terdapat sebaran kepadatan penduduk yang beragam antar kecamatan di Kabupaten Lampung Timur. Kepadatan penduduknya berkisar 59–452 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pekalongan sebesar 452 jiwa/km², kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Way Bungur.

Tabel 2. 9
Kepadatan Penduduk Kabupaten Lampung Timur

No	Kecamatan	Luas (km2)	Kepadatan penduduk (jiwa/km2)				
			2006	2007	2008	2009	2010
1	Metro Kibang	76,78	250	249	252	255	270
2	Batang Hari	148,88	349	348	351	355	367
3	Sekampung	148,34	394	393	397	401	403
4	Marga Tiga	250,73	178	178	180	182	173
5	Sekampung Udik	339,12	199	198	200	202	201
6	Jabung	267,84	171	171	173	175	174
7	Pasir Sakti	193,94	180	179	181	183	177
8	Waway Karya	211,07	173	172	174	176	163
9	Marga Sekampung	177,32	154	154	155	157	147
10	Labuhan Maringgai	194,99	333	332	335	339	337
11	Mataram Baru	79,56	337	336	340	343	335
12	Bandar Sribhawono	185,71	230	230	232	235	248
13	Melinting	139,3	185	185	187	189	177
14	Gunung Pelindung	78,52	278	277	280	283	268
15	Way Jepara	229,27	217	216	219	221	223
16	Braja Selebah	247,61	87	87	88	88	88
17	Labuhan Ratu	485,51	83	83	83	84	85
18	Sukadana	756,76	84	84	85	86	85
19	Bumi Agung	73,17	233	232	234	237	231
20	Batang Hari Nuban	180,69	228	227	230	232	227
21	Pekalongan	100,13	430	428	433	438	452
22	Raman Utara	161,37	219	218	221	223	222
23	Purbolinggo	222,03	174	174	175	177	181
24	Way Bungur	376,38	57	56	57	58	59
Kabupaten Lampung Timur		5325,02	177	176	178	180	179

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

2. Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Kepala Keluarga

Pada tahun 2010 jumlah kepala keluarga tertinggi di Kabupaten Lampung Timur adalah di Kecamatan Sukadana yaitu sebesar 17.314 KK, mengindikasikan bahwa kebutuhan permukiman terbesar berada di Kecamatan Sukadana. Sedangkan jumlah kepala kelaurga terendah adalah di

Kecamatan Bumi Agung yaitu 4.574 KK. Penduduk menurut jumlah kepala keluarga di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2006 - 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2. 10
Jumlah Penduduk Menurut Jumlah Kepala Keluarga

No	Kecamatan	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Metro Kibang	3.752	4.950	5.141	5.211	5.594
2	Batang Hari	10.140	13.377	13.894	14.082	14.749
3	Sekampung	11.422	15.068	15.650	15.862	16.159
4	Marga Tiga	8.736	11.526	11.970	12.133	11.722
5	Sekampung Udik	13.165	17.368	18.038	18.282	18.381
6	Jabung	8.972	11.837	12.294	12.460	12.575
7	Pasir Sakti	6.815	8.991	9.337	9.464	9.295
8	Waway Karya	7.121	9.395	9.758	9.890	9.307
9	Marga Sekampung	5.344	7.051	7.322	7.422	7.033
10	Labuhan Maringgai	12.670	16.715	17.360	17.595	17.761
11	Mataram Baru	5.241	6.914	7.181	7.278	7.205
12	Bandar Sribhawono	8.355	11.023	11.448	11.603	12.462
13	Melinting	5.041	6.651	6.908	7.001	6.653
14	Gunung Pelindung	4.263	5.624	5.840	5.920	5.687
15	Way Jepara	9.715	12.818	13.312	13.493	13.796
16	Braja Selebah	4.203	5.545	5.759	5.837	5.871
17	Labuhan Ratu	7.859	10.368	10.768	10.914	11.180
18	Sukadana	12.461	16.439	17.074	17.305	17.314
19	Bumi Agung	3.325	4.386	4.556	4.617	4.574
20	Batang Hari Nuban	8.044	10.612	11.022	11.171	11.073
21	Pekalongan	8.408	11.092	11.520	11.677	12.212
22	Raman Utara	6.906	9.111	9.463	9.591	9.660
23	Purbolinggo	7.555	9.967	10.352	10.492	10.846
24	Way Bungur	4.164	5.494	5.706	5.783	5.959
Kabupaten Lampung Timur		183.676	242.322	251.672	255.083	257.068

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Penduduk menurut struktur usia pada dasarnya berhubungan dengan angkatan kerja. Komposisi penduduk usia produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Agar proses pembangunan berjalan lancar, kelompok penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) sebaiknya semakin mengecil bila dibandingkan dengan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun). Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2. 11
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Timur

No	Kelompok Umur	Tahun 2010		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	00 - 04	45.375	42.738	88.113
2	05 - 09	46.019	43.259	89.278
3	10 - 14	48.938	46.225	95.163
4	15 - 19	42.336	38.082	80.418
5	20 - 24	36.362	35.162	71.524
6	24 - 29	40.276	40.030	80.306
7	30 - 34	42.735	41.366	84.101
8	35 - 39	40.134	36.955	77.089
9	40 - 44	33.247	31.146	64.393
10	45 - 49	28.262	28.143	56.405
11	50 - 54	23.384	22.215	45.599
12	55 - 59	19.525	16.702	36.227
13	60 - 64	12.914	12.625	25.539
14	65 - 69	10.310	9.966	20.276
15	70 - 74	8.405	8.656	17.061
16	75 +	10.448	9.699	20.147
Jumlah		488.670	462.969	951.639

Sumber: Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Berdasarkan tabel 2.11, penduduk menurut umur di Kabupaten Lampung Timur ekisting, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada usia 0-14 tahun merupakan penduduk usia tidak produktif.
Jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Timur pada kelompok usia ini pada tahun eksisting berjumlah 272.554 jiwa.
- Pada usia 15-64 tahun merupakan penduduk usia produktif.
Jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Timur pada kelompok usia ini pada tahun eksisting berjumlah 621.601 jiwa.
- Pada usia > 64 tahun merupakan penduduk usia tidak produktif.
Jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Timur pada kelompok usia ini pada tahun eksisting berjumlah 57.484 jiwa.

Kabupaten Lampung Timur memiliki persentase penduduk pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan kelompok umur tua (64 tahun ke atas) dan usia 0-14 tahun. Artinya, Kabupaten Lampung Timur mempunyai sumber daya manusia yang cukup potensial.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Pencapaian indikator ekonomi Kabupaten Lampung Timur tahun 2007 - 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.12 dan Tabel 2.13. Dari tabel tersebut terlihat nilai PDRB dari tahun 2007 sampai 2010 mengalami peningkatan 51,15 % atas dasar harga berlaku dan 15,42 % atas harga konstan 2000. Peran sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Lampung Timur masih sangat dominan diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Jika kita perhatikan kontribusi masing-masing sektor terlihat bahwa sektor industri pengolahan masih kecil sekitar 7 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian hasil pertanian di Kabupaten Lampung Timur dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah yang seharusnya di Kabupaten Lampung Timur justru ke tempat lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya keras agar pengembangan agroindustri perlu ditingkatkan.

Tabel 2.12.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 S.d 2010 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Timur

No	Sektor	2007		2008		2009		2010	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Pertanian	2.720.539	38,01	3.218.183	39,35	3.941.279	43,99	4.823.818	44,59
2	Pertambangan dan Penggalian	1.502.245	20,99	1.532.733	18,74	1.034.628	11,55	1.333.230	12,32
3	Industri Pengolahan	437.264	6,11	494.600	6,05	545.838	6,09	608.338	5,62
4	Listrik, gas dan Air Bersih	16.398	0,23	17.199	0,21	18.027	0,20	18.910	0,17
5	Bangunan	276.092	3,86	293.955	3,59	293.955	3,28	303.332	2,80
6	Perdagangan,Htel, dan Restoran	1.285.576	17,96	1.505.213	18,41	1.765.343	19,70	2.071.654	19,15
7	Angutan dan Komunikasi	226.772	3,17	282.012	3,45	348.590	3,89	432.314	4,00
8	Keungan, Persewaan, dan Jasa Persewaan	273.205	3,82	324.906	3,97	386.915	4,32	462.031	4,27
9	Jasa-jasa	418.958	5,85	509.176	6,23	624.290	6,97	764.273	7,06
	PDRB	7.157.049	100	8.177.977	100	8.958.865	100	10.817.900	100,00

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB atas dasar harga berlaku (Hb) dan harga konstan (Hk) tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel 2.14. Dari tabel tersebut terlihat bahwa terjadi fluktuasi pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Dari gambaran pertumbuhan kontribusi sektor PDRB tersebut, sebaiknya pemerintah terus mendorong pengembangan industri pengolahan, karena dengan berkembangnya industri pengolahan maka penyerapan tenaga kerja akan terjadi dan akumulasi uang beredar di masyarakat semakin besar di pedesaan.

Tabel 2.13.
 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 - 2010 atas Dasar Harga Konstan 2000
 Kabupaten Lampung Timur

No	Sektor	2007		2008		2009		2010	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Pertanian	1.797.481	47,91	1.902.908	48,21	2.027.766	49,22	2.156.137	49,79
2	Pertambangan dan Penggalian	500.891	13,35	503.043	12,74	458.239	11,12	432.972	10,00
3	Industri Pengolahan	261.665	6,97	273.319	6,92	285.286	6,92	303.024	7,00
4	Listrik, gas dan Air Bersih	6.909	0,18	7.310	0,19	7.681	0,19	8.099	0,19
5	Bangunan	171.691	4,58	179.721	4,55	187.126	4,54	195.341	4,51
6	Perdagangan,Hotel, dan Restoran	636.170	16,96	681.536	17,27	730.476	17,73	784.034	18,11
7	Angutan dan Komunikasi	99.038	2,64	108.100	2,74	117.244	2,85	128.980	2,98
8	Keungan, Persewaan, dan Jasa Persewaan	124.570	3,32	130.312	3,30	136.155	3,30	142.480	3,29
9	Jasa-jasa	153.245	4,08	160.847	4,08	169.814	4,12	178.986	4,13
	PDRB	3.751.660	100	3.947.096	100	4.119.787	100	4.330.053	100,00

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Tabel 2.14
 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
 tahun 2000 dari Tahun 2007 - Tahun 2010 Kabupaten Lampung Timur

No	Sektor	2007		2008		2009		2010	
		Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)
1	Pertanian	8,77	4,94	18,29	5,87	22,47	6,56	22,39	6,33
2	Pertambangan dan Penggalian	2,04	-5,67	2,03	0,43	-32,5	-8,91	28,86	-5,51
3	Industri Pengolahan	9,84	9,65	13,11	4,45	10,36	4,38	11,45	6,22
4	listrik, gas dan Air Bersih	11,20	10,55	4,89	5,8	4,81	5,08	4,90	5,44
5	Bangunan	16,19	5,32	6,47	4,68	0,00	4,12	3,19	4,39
6	Perdagangan,Htel, dan Restoran	18,16	8,27	17,08	7,13	17,28	7,18	17,35	7,33
7	Angutan dan Komunikasi	23,43	13,53	24,36	9,15	23,61	8,46	24,02	10,01
8	Keungan, Persewaan, dan Jasa Persewaan	37,03	5,55	18,92	4,61	19,09	4,48	19,41	4,65
9	Jasa-jasa	13,92	4,42	21,53	4,96	22,61	5,57	22,42	5,40
	PDRB	10,74	4,46	14,26	5,21	9,55	4,38	20,75	5,10

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Pada Tabel 2.15. terlihat bahwa PDRB Kabupaten Lampung Timur dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Lampung. Pada tahun 2009 PDRB Kabupaten Lampung Timur menempati urutan ke 9 di Provinsi Lampung, walaupun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi laju peningkatannya lebih kecil dari kabupaten lain.

Tabel 2.15.
Perbandingan Perkembangan PDRB kabupaten/kota Tahun 2006 - 2009 atas Dasar Harga Konstan di Propinsi Lampung

No	Sektor	Tahun							
		2006		2007		2008		2009	
		PDRB Perkapita (Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	PDRB Perkapita (Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	PDRB Perkapita (Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	PDRB Perkapita (Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)
1	Kab. Lampung Barat	4.081.305	1.551.745	4.945.465	1.886.393	5.867.912	2.252.210	6.302.181	2.527.773
2	Kab. Tanggamus	4.809.113	3.967.143	5.789.729	4.785.848	6.839.082	5.681.752	8.570.762	4.167.827
3	Kab. Lampung Selatan	5.720.867	5.166.681	6.595.419	6.087.585	7.673.215	7.248.902	9.649.517	9.108.034
4	Kab. Lampung Timur	6.955.480	6.462.747	7.640.427	7.157.048	8.633.910	8.177.979	9.356.723	8.958.866
5	Kab. Lampung Tengah	6.691.623	7.669.657	7.923.522	9.193.036	9.416.793	11.092.671	11.404.227	13.635.156
6	Kab. Lampung Utara	7.022.961	3.927.043	8.557.760	4.812.148	10.562.835	5.771.034	12.435.128	7.111.438
7	Kab. Way Kanan	4.548.347	1.645.637	5.746.540	2.084.552	7.090.249	2.586.367	6.614.460	2.425.569
8	Kab. Tulang Bawang	8.442.770	6.444.873	10.230.913	7.921.438	12.859.645	10.129.195	13.902.956	5.819.800
9	Kab. Pasawaran	5.560.332	2.276.389	6.614.906	2.766.724	7.715.287	3.317.681	9.586.534	4.119.305
10	Kab. Pring Sewu	-	-	-	-	-	-	6.812.101	2.509.773
11	Kab. Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	-	-	14.476.562	2.844.919
12	Kab. Mesuji	-	-	-	-	-	-	15.238.023	2.833.526
13	Kota Bandar Lampung	10.421.955	8.378.439	12.960.510	10.525.658	16.329.440	13.437.169	20.477.084	17.067.998
14	Kota metro	5.063.549	660.023	5.723.529	756.550	6.478.785	869.206	7.463.702	1.017.101

Sumber : Lampung Dalam Angka, 2010

b. Laju Inflasi

Di bidang ekonomi, berhasil atau tidaknya pembangunan yang telah dilaksanakan dapat dilihat dari indikator kondisi perekonomian secara umum, salah satu indikatornya adalah inflasi. Angka inflasi yang mempunyai manfaat sebagai rambu-rambu untuk menjaga kesetabilan harga serta sebagai dasar bagi berbagai kebijakan yang akan ditetapkan. Tabel 2.16 memperlihatkan angka inflasi Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2006 – 2011. Angka inflasi Kabupaten Lampung Timur berfluktuasi sangat dipengaruhi oleh inflasi Bandar Lampung dan nasional. Pada tahun 2006 nilai inflasi 6,36 % dan pada tahun 2010 nilainya menjadi 10,03 %.

Tabel 2.16.
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2006 – 2011 Kabupaten Lampung Timur

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
Inflasi	6,36	6,59	12,94	4,18	10,03	4,94

Sumber : BPS Lampung Timur,
*) Sampai Bulan September

c. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Pemerintah telah mengelompokkan kemiskinan ke dalam beberpa kelompok, yaitu keluarga prasejahtera, sejahtera I, sejahtera II, sejahtera III, dan sejahtera plus. Jumlah penduduk prasejahtera di Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2006 sampai tahun 2010 terus mengalami penurunan sekitar 0,94%/tahun atau dari 37,21 % (2006) menjadi 33,46 % (2010) dari jumlah

kepala keluarga. Sebaliknya keluarga sejahtera terus mengalami sedikit peningkatan (Tabel 2.17). Lambatnya penurunan jumlah golongan keluarga prasejahtera ini perlu mendapat perhatian yang lebih serius.

Tabel 2.17.
Jumlah Penduduk Pra Sejahtera dan Sejahtera

Tahun	Jumlah KK	Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera			
			I	II	III	III plus
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
2006	183.677	37,21	24,22	16,32	20,66	1,59
2007	242.319	36,76	25,63	18,87	17,27	1,47
2008	251.675	34,86	24,00	22,50	17,29	1,34
2009	255.086	34,40	25,08	21,83	17,19	1,50
2010	257.068	33,46	25,37	23,67	17,50	1,47

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

d. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Perkembangan angka kriminalitas Kabupaten Lampung Timur menunjukkan *trend* yang tidak berubah dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Bentuk-bentuk pencurian masih menjadi modus utama kejahatan di Kabupaten Lampung Timur. Di samping itu, sejak tahun 2009 muncul kriminalitas jenis narkoba (Tabel 2.18).

Tabel 2.18.
Angka Kriminalitas Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 - 2010

No	Jenis Kasus	2008		2009		2010	
		(kasus)	(%)	(kasus)	(%)	(kasus)	(%)
1	Pembunuhan	3	0,61	5	1,01	9	2.27
2	Penganiayaan Berat	4	0,81	7	1,42	21	5.30
3	Penculikan	1	0,20	0	0,00	6	1.52
4	Pencurian dengan kekerasan	81	16,50	74	15,01	56	14.14
5	Pencurian berat	152	30,96	167	33,87	143	36.11
6	Pencurian kendaraan bermotor	22	4,48	29	5,88	36	9.09
7	Perkosaan	12	2,44	8	1,62	4	1.01
8	Pembakaran/ Kebakaran	0	0,00	4	0,81	2	0.51
9	Senjata Api/Bahan Peledak	0	0,00	7	1,42	7	1.77
10	Pemerasan	0	0,00	1	0,20	2	0.51
11	Narkotika dan Obat-obatan	4	0,81	9	1,83	5	1.26
12	Penyelundupan	0	0,00	0	0,00	0	0.00
13	Perjudian	21	4,28	18	3,65	16	4.04
14	Pencurian Kayu	0	0,00	22	4,46	0	0.00
15	Kebakaran Hutan	0	0,00	0	0,00	0	0.00
16	Uang Palsu	0	0,00	0	0,00	0	0.00
17	Lain-lain	191	38,90	142	28,80	89	22.47
Jumlah		491		493		396	

Sumber: Lampung Timur Dalam Angka 2011

Konflik secara horizontal yang mencolok dengan skala meluas tidak pernah terjadi di Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban cukup kondusif. Jenis gangguan keamanan dan ketertiban selama lima tahun terakhir yang cukup dominan adalah kasus pencurian dengan pemberatan dengan proporsi rata-rata sebesar 36,11% (143 kasus) dan pencurian dengan kekerasan dengan proporsi rata-rata sebesar 14,14% (56 kasus) dari total kasus. Kasus lain yang, cukup mencolok adalah pencurian kendaraan bermotor (36 kasus); perjudian (16 kasus); serta pemerkosaan (4 kasus). Pada tahun 2010, kasus narkoba dan obat-obatan terlarang mencapai 5 kasus, sedangkan pada tahun 2008 dan 2009 sebesar 4 dan 9 kasus.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi sumberdaya manusia Kabupaten Lampung Timur dapat diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI). IPM atau HDI merupakan suatu ukuran yang memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Menurut UNDP IPM atau HDI dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak.

Pada tahun 2010, IPM Kabupaten Lampung Timur sebesar 70,73 dan bila dibandingkan dengan nilai IPM tiga tahun sebelumnya (2007) yang nilainya tercatat sebesar 69,23, maka nilai tersebut memperlihatkan adanya peningkatan, meskipun sangat kecil. Peningkatan tersebut dicapai akibat adanya kenaikan disemua nilai indeks, yaitu indeks kelangsungan hidup, indeks daya beli, dan indeks pengetahuan (Tabel 2.19).

Tabel 2.19
Indeks Komponen IPM Kabupaten Lampung Timur

Tahun	Indeks Kelangsungan hidup	Indeks Pengetahuan	Indeks Daya Beli	IPM
2007	74,25	76,93	56,34	69,23
2008	74,70	76,90	56,60	69,68
2009	75,03	77,72	57,84	70,20
2010	75,37	78,55	58,28	70,73

Sumber : BPS Lampung Timur, 2011

Tabel 2.20 memperlihatkan perbandingan nilai IPM Kabupaten Lampung Timur dengan nilai IPM kabupaten/kota lain di Propinsi Lampung, sekaligus memperlihatkan posisi Kabupaten Lampung Timur relatif terhadap seluruh kabupaten/kota lainnya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa Kabupaten Lampung Timur menduduki peringkat ke enam setelah Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Tengah. Peringkat IPM Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu sama yaitu peringkat enam. Tidak terjadinya perubahan peringkat dalam kurun tiga tahun ini bisa disebabkan karena tidak terjadi peningkatan yang cukup signifikan disetiap komponen indeks pembangunan manusia. Selain itu relatif lambatnya perkembangan IPM di Kabupaten Lampung Timur disebabkan dari masih lambatnya

pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan. Hal ini terlihat dari angka melek huruf yang menempati posisi kesepuluh dan rata-rata lama sekolah yang menempati posisi kedelapan, tertinggal dibandingkan kabupaten lainnya di Propinsi Lampung.

Tabel 2.20.
Perbandingan Nilai dan Rangking IPM di Propinsi Lampung, 2008-2010

Kabupaten/Kota	IPM			Peringkat		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
1 Lampung Barat	68,21	68,83	69,28	11	12	12
2 Tanggamus	70,19	70,84	71,30	3	4	4
3 Lampung Selatan	68,79	69,51	70,06	7	9	9
4 Lampung Timur	69,68	70,2	70,73	5	6	6
5 Lampung Tengah	69,93	70,38	70,74	4	5	5
6 Lampung Utara	69,40	69,85	70,35	6	7	7
7 Way Kanan	68,98	69,46	69,93	9	10	10
8 Tulang Bawang	69,14	69,63	70,34	8	8	8
9 Pesawaran	68,73	69,43	69,77	10	11	11
10 Pringsewu	-	71,74	71,97	-	3	3
11 Mesuji	-	67,06	67,49	-	14	13
12 Tlg Bawang Barat	-	68,53	68,98	-	13	12
13 Bandar Lampung	74,86	75,35	75,70	2	2	2
14 Metro	75,71	75,98	76,25	1	1	1

Sumber : BPS Lampung Timur, 2011

Kondisi geografis Propinsi Lampung ternyata baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan manusianya. Secara umum kabupaten yang nilai IPM-nya rendah adalah kabupaten dengan tipologi wilayah gunung dan pantai. Apabila dicermati terlihat bahwa 4 (empat) kabupaten peringkat terbawah ditempati oleh kabupaten dengan tipe wilayah gunung/bukit, pantai dan kombinasi keduanya. Keempat kabupaten dengan nilai IPM terendah tersebut adalah Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesawaran. Selain itu terjadinya pemekaran wilayah juga memicu rendahnya angka IPM, seperti Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Pesawaran.

Komponen IPM meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan paritas daya beli. Tabel 2.21 diuraikan lebih jauh tentang komponen Indeks Pembangunan Manusia tersebut.

Tabel 2.21.
Komponen Indeks Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung 2008 - 2009

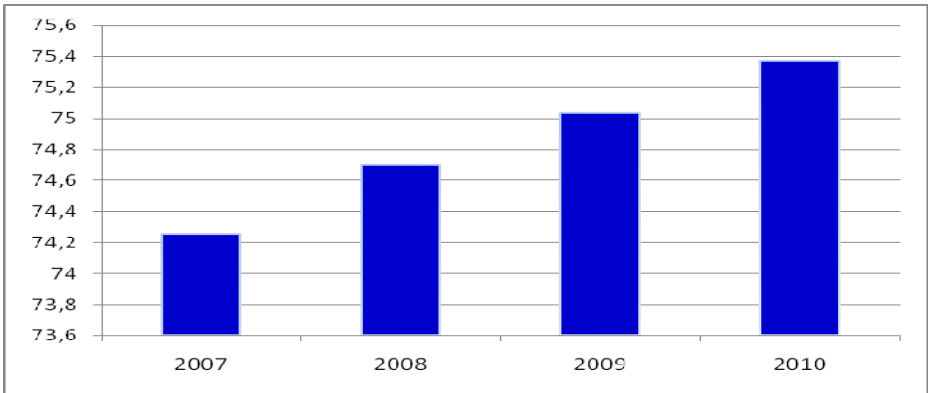
Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)		Angka Melek Huruf (%)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan (000 Rp)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1. Lampung Barat	66,83	67,14	96,67	97,28	7,35	7,42	602,32	603,43
2. Tanggamus	68,92	69,33	94,68	95,32	7,26	7,36	619,97	620,19
3. Lampung Selatan	68,20	68,44	94,37	94,85	7,13	7,41	610,02	611,32
4. Lampung Timur	70,02	70,22	93,32	93,32	6,98	7,35	610,33	612,19
5. Lampung Tengah	69,09	69,25	93,08	93,08	7,22	7,39	617,71	619,59
6. Lampung Utara	67,73	67,94	95,25	95,25	7,59	7,96	610,87	612,28
7. Way Kanan	69,26	69,45	94,61	94,61	6,96	7,27	602,62	604,38
8. Tulang Bawang	68,59	68,86	93,29	93,80	6,69	7,10	616,02	617,89
9. Pesawaran	68,30	68,40	93,77	94,41	7,46	7,46	606,76	608,64
10. Pringsewu	68,44	68,51	94,19	94,19	8,58	8,58	623,84	626,32
11. Mesuji	68,39	68,39	91,74	92,36	6,04	6,30	594,84	596,24
12. Tulang Bwg Barat	68,66	68,66	91,2	92,48	7,45	7,45	599,97	602,17
13. Bandar Lampung	70,50	70,87	98,44	98,44	9,91	9,91	630,76	632,20
14. Metro	72,38	72,54	97,36	97,49	9,82	9,82	629,39	631,26
Propinsi	69,25	69,50	94,37	94,64	7,49	7,75	617,42	618,63

Sumber : BPS Lampung Timur, 2011

a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup secara konsep diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani seseorang hingga akhir hayatnya. Angka ini sebenarnya dapat dihitung dengan menggunakan tabel kematian (*life table*), namun karena data kematian menurut kelompok umur tidak tersedia maka cara ini tidak dapat dilakukan. Dalam publikasi ini, perhitungan angka harapan hidup dilakukan dengan metode tidak langsung (*indirect method*).

Gambar 2.9. Indeks Kelangsungan Hidup Kab. Lampung Timur 2007-2010



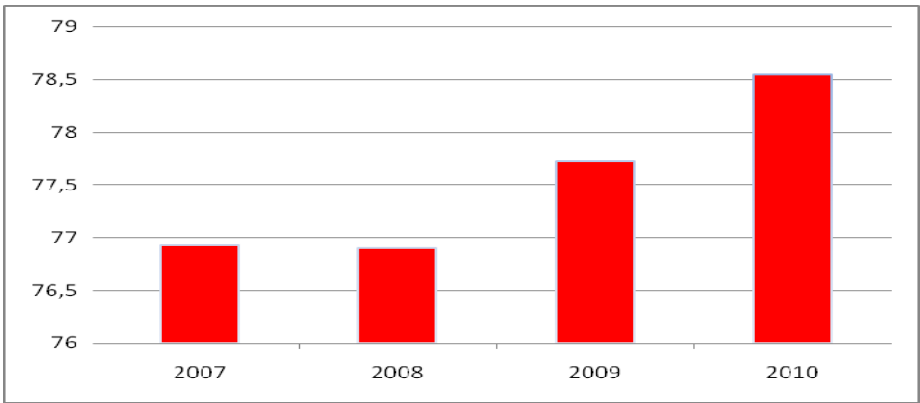
Dari Tabel 2.21 terlihat bahwa angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lampung Timur tahun 2009 adalah 70,02 naik menjadi 70.22 ditahun 2010 dan menempati posisis ketiga terbesar di Propinsi Lampung setelah Kota Metro dan Kota Bandar Lampung. Naiknya angka

harapan hidup ini menunjukkan peningkatan kehidupan penduduk Kabupaten Lampung Timur juga menggambarkan keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya di Kabupaten Lampung Timur (Gambar 2.12).

b. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator output di bidang pendidikan yang dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia. Pada Table 2.21 terlihat bahwa Angka Melek Huruf penduduk dewasa di Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi Kesepuluh, yaitu sebesar 93,32% menunjukkan bahwa persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis adalah 93,32%. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Propinsi Lampung angka melek huruf Kabupaten Lampung Timur jauh tertinggal dengan menempati posisi kesepuluh. Hal ini mungkin disebabkan karena masih kurangnya keberhasilan dari program-program yang ada untuk meningkatkan angka melek huruf di Kabupaten Lampung Timur (Gambar 2.10).

Gambar 2.10. Indeks Pengetahuan Kabupaten Lampung Timur 2007-2010



c. Rata-rata Lama Sekolah

Selain angka melek huruf, indikator pendidikan lainnya yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah. Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata waktu yang dijalani penduduk dalam kegiatan pembelajaran formal. Populasi yang digunakan dalam menghitung rata-rata lama sekolah adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas.

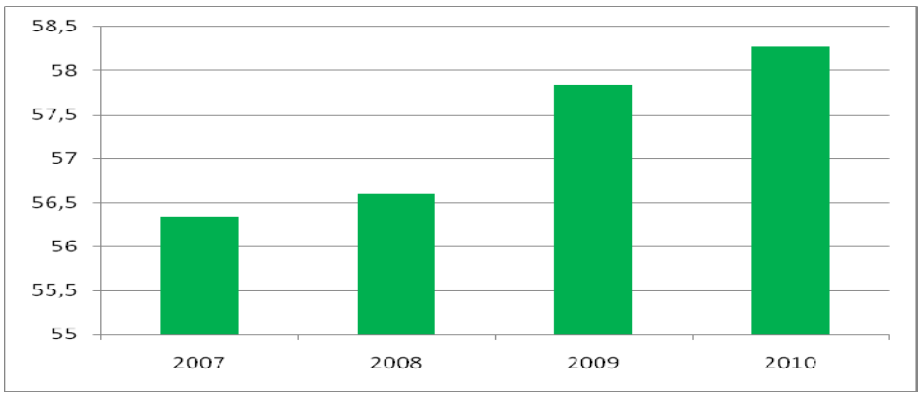
Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lampung Timur tahun 2010 mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 6,98 tahun menjadi 7.35 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Lampung Timur sudah menduduki kelas dua Sekolah Menengah Pertama. Rata-rata lama sekolah tertinggi terdapat di kota Bandar Lampung (9,91 tahun), sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Mesuji (6,04 tahun).

d. Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity*)

Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkatnya pendapatan seseorang, diharapkan kemampuan daya belinya semakin meningkat pula. Akan tetapi bila dikaji lebih mendalam bahwa hubungan tersebut tidak selalu benar, terutama bila tingkat kenaikan pendapatan masih lebih rendah daripada tingkat kenaikan harga secara umum. Paritas daya beli juga sangat ditentukan oleh lokasi tempat tinggal seseorang. Dengan demikian penduduk dengan pendapatan sama belum tentu mempunyai paritas daya beli yang sama bila tempat tinggalnya berbeda.

Besarnya pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan tahun 2009 di Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 610,330,-, sedangkan pada tahun 2010 naik menjadi Rp. 612,190,-. Dengan melihat besaran angka tersebut dapat diketahui bahwa dalam satu tahun terakhir terjadi penguatan nilai pengeluaran riil perkapita yang berarti ada peningkatan daya beli untuk penduduk Kabupaten Lampung Timur meskipun tidak terlalu signifikan (Gambar 2.11).

Gambar 2.11. Indeks Daya Beli Kabupaten Lampung Timur 2007-2010



Permasalahan diberbagai aspek tidak dapat digambarkan hanya oleh satu indikator komposit (jamak), sehingga untuk memperoleh gambaran yang lebih spesifik dan terfokus perlu dilengkapi indikator tunggal dari setiap aspek kehidupan maupun sektor pembangunan. Dengan menunjukkan indikator tunggal besarnya permasalahan dapat diketahui, misalnya pada tingkat perencanaan tentang kelompok sasaran dan investasi (indikator input), di tingkat implementasi tentang partisipasi kelompok sasaran dalam program Indikator proses, monitoring tentang hasil dan manfaat program bagi kelompok sasaran (indikator output dan outcome). Uraian berikut menyajikan indikator tunggal dari beberapa sektor yang mencakup indikator input, proses, output dan outcome sebagai indikator pembangunan manusia. Indikator-indikator ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih jauh tentang pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Timur.

Data pada tahun 2009 memperlihatkan bahwa proporsi Rumah Tangga Miskin (RTM) secara total mencapai 42,75% dari total jumlah Rumah Tangga (RT) di Kabupaten Lampung Timur. Proporsi RTM terbesar terdapat di Kecamatan Marga Sekampung (69,21%), sedangkan terkecil terdapat di Kecamatan Raman Utara (25,48%).

e. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Indikator bidang pendidikan yang menarik untuk diamati adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator ini memberikan gambaran tentang upaya pemberdayaan penduduk dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. APK adalah proporsi anak yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok umur yang bersesuaian dengan pendidikannya. Sedangkan APM adalah proporsi anak pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Tabel 2.22 menunjukkan bahwa secara rata-rata di tahun 2010 Kabupaten Lampung Timur memiliki APK sebesar 108,1% untuk SD/ sederajat, 83,1% untuk tingkat SLTP/ sederajat dan 61,3% untuk tingkat SLTA/ SMK sederajat. Selain itu, tabel tersebut juga menunjukkan rata-rata APM di Kabupaten Lampung Timur. APM untuk tingkat SD/ sederajat adalah 94,9%, untuk tingkat SLTP/ sederajat adalah 72,8% dan untuk tingkat SLTA/ SMK sederajat adalah 46,1%.

Tabel 2.22.
APK dan APM SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Lampung Timur 2007-2010

Uraian	2007	2008	2009	2010
	%	%	%	%
Angka Partisipasi Kasar				
SD	96,4	105,6	104,8	108,1
SLTP	88,2	81,2	84,8	83,1
SLTA	58,7	53,7	67,8	61,3
Angka Partisipasi Murni				
SD	92,1	93,8	94,7	94,9
SLTP	71,6	70,5	70,9	72,8
SLTA	46,4	35,4	47,3	46,1

Sumber : BPS Lampung Timur, 2011

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk umum di suatu tingkat pendidikan. Dari Tabel 2.22 terlihat bahwa di Kabupaten Lampung Timur terdapat APK diatas 100%, yakni APK untuk tingkat SD/ sederajat. Hal ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Lampung Timur terdapat anak diatas 12 tahun tapi masih sekolah di SD/ sederajat. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk disuatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia lebih muda.

APM jenjang pendidikan SD di tahun 2010 sebesar 94,9% menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 7-12, 95 orang bersekolah di bangku SD, dan 73 orang dari 100 penduduk usia 13-15 tahun menerima pendidikan di SMP. Untuk jenjang SMA, 46 orang dari 100 penduduk usia 16-18 tahun mendapatkan pendidikan di SMA. Terlihat bahwa dari tahun 2008 sampai 2010 APM di Kabupaten Lanipung Tiniur meningkat Kenaikan APM pada semua tingkat pendidikan menunjukkan bahwa masyarakat

Kabupaten Lampung Timur mulai menyadari keinginan dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendidikan yang relatif tinggi.

APM merupakan salah satu indikator proses pada bidang pendidikan, sedangkan salah satu indikator outputnya adalah tingkat pendidikan penduduk. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan atau ijazah tertinggi yang dimiliki memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia. Bila jenjang pendidikan SLP dan SLTA APM-nya makin meningkat maka dimasa berikutnya tingkat pendidikan penduduk akan meningkat pula, demikian pula sebaliknya.

f. Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Penduduk

Tabel 2.23 memperlihatkan kualitas SDM yang diukur berdasarkan ijazah tertinggi yang dimiliki dari penduduk usia 10 tahun keatas. Dari tabel tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan persentase penduduk berdasarkan ijazah perguruan tinggi, sedangkan yang tidak memiliki ijazah cenderung mengalami penurunan.

Tabel 2.23.
Penduduk Usia Lebih dari 10 Tahun Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki 2007-2010

Kelompok Penduduk	2007	2008	2009	2010
	%	%	%	%
Tidak Punya	34,0	40,0	30,1	25,3
SD Sederajat	27,5	27,8	30,7	34,8
SLTP Sederajat	20,5	17,9	20,9	23,8
SLTA Sederajat	15,4	12,5	17,6	13,2
Perguruan Tinggi	2,6	1,6	0,9	2,9
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Lampung Timur, 2011

Kondisi yang sangat menggembirakan bagi kemajuan daerah di masa depan adalah dengan semakin meningkatnya jumlah dan persentase lulusan pendidikan tinggi di Kabupaten Lampung Timur. Mereka yang berhasil menamatkan perguruan tinggi di tahun 2009 mencapai 0,9% naik menjadi 2,9% di tahun 2010. Hal ini karena kelompok penduduk lulusan pendidikan tinggi inilah yang menjadi aset berharga bagi daerah dan diharapkan bisa menjadi ujung tombak dalam menggerakkan roda pembangunan.

Persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah atau yang belum sekolah/tidak tamat SD mengalami penurunan. dari 30,1% di tahun 2009 turun menjadi 25,3% di tahun 2010. Menurunnya persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah ini mengindikasikan masyarakat Kabupaten Lampung Timur mulai menyadari arti pentingnya pendidikan.

g. Rasio Penduduk yang Bekerja.

Ukuran umum yang digunakan untuk melihat keterlibatan penduduk kegiatan ekonomi adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yaitu proporsi penduduk yang masuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan produktif, karena itu angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja, sementara tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Pada tahun 2010 memperlihatkan bahwa TPAK Kabupaten Lampung Timur mengalami kenaikan dari 66,4% di tahun 2008 menjadi 67,7% di tahun 2010. Artinya porsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi di kabupaten ini sebesar 67,7% (Tabel 2.24).

Permasalahan lain yang berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Indikator pengangguran dapat digunakan diantaranya tingkat pengangguran terbuka (TPT), yaitu perbandingan antara banyaknya pencari kerja dengan angkatan kerja. Tabel 2.24 menunjukkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Terjadi penurunan angka pengangguran terbuka sejak 2008, angka pengangguran terbuka pada tahun 2007 adalah sebesar 5,8% turun menjadi 4,3% di tahun 2010. Terjadinya penurunan yang cukup signifikan angka TPT ini secara tidak langsung menggambarkan meningkatnya daya serap lapangan kerja yang ada.

Tabel 2.24.
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur, 2007-2009

Indikator	2007	2008	2009	2010
	%	%	%	%
• Tingkat partisipasi angkatan Kerja (TPAK)	73,4	66,4	68,2	67,7
• Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	5,8	7,7	5,3	4,3

Sumber : BPS Lampung Timur, 2011

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kabupaten Lampung Timur adalah daerah yang memiliki kebudayaan tinggi. Masyarakat adat Lampung Timur adalah beradat Pepadun, yang terkenal dengan istilah Abung Siwo Mego dan Pubian Telu Suku, sedangkan masyarakat adat Peminggir hanya di beberapa desa saja. Adat Pepadun mempergunakan garis keturunan patrilineal. Upacara adat umumnya dilakukan pada acara perkawinan, disamping kewajiban sesuai hukum Agama Islam. Prinsip dalam kehidupan sehari-hari menunjuk kan suatu corak keaslian yang khas dalam hubungan sosial antar masyarakat Lampung yang disimpulkan dalam 5 prinsip, yaitu: "*Pill Pasenggiri*" yang berarti perilaku dan bermoral tinggi; "*Sakai Sambayan*" mengandung makna tolong-menolong; "*Nemui Nyimah*" berarti ramah tamah terhadap semua pihak; "*Nengah Nyappur*" adalah bersikap terbuka, dan "*Bejuluk Beadek*" adalah gelar setelah menikah.

Dalam bidang kesenian Kabupaten Lampung Timur cukup berkembang, sampai akhir 2009 tercatat sanggar kesenian 125 kelompok. Seperti kita ketahui banyak suku yang berkembang di Kabupaten Lampung Timur, dan masing-masing suku membawa budaya dan berkembang dengan baik. Beberapa sanggar kesenian yang berkembang antara lain Sanggar Kesenian Lampung, Jaipongan, Campur Sari, Wayang Kulit, Janger, Wayang Orang, Kuda Lumping, dan sebagainya.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

a. Pendidikan

Upaya peningkatan sumber daya manusia bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Sejarah perkembangan bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa keunggulan suatu bangsa dalam berbagai bidang tidak semata-mata tergantung ada keunggulan sumber daya alam yang dimilikinya, melainkan oleh keunggulan kualitas sumber daya manusianya yang mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang unggul itu. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk diharapkan akan semakin baik kualitas sumber daya manusianya.

Sejumlah penelitian mengungkapkan adanya hubungan positif antara pendidikan dan produktivitas. Hasil-hasil terbaik dari segi tingkat produktivitas dan kecepatan pertumbuhan ekonomi terdapat pada negara-negara yang sumber daya manusianya mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik. Maka, beberapa permasalahan pendidikan seperti kesenjangan mendapatkan kesempatan pendidikan, kualitas pendidikan, partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja yang makin kompetitif terus mendapatkan penanganan serius dari pemerintah dan diharapkan mendapatkan dukungan optimal dari seluruh komponen masyarakat. Program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan salah satu bentuk implementasi dari amanat Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang dicanangkan pada tanggal 2 Mei 1994.

Faktor-faktor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia adalah ketersediaan sekolah yang dicerminkan nilai rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah dan jumlah guru yang dicerminkan nilai rasio jumlah guru dan murid pada suatu wilayah. Tabel 2.25 mencerminkan rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah dan Tabel 2.26 memperlihatkan rasio jumlah guru dan murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Lampung Timur. Dari kedua tabel tersebut menunjukkan angka yang ideal dan sangat berperan dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dikemudian hari.

Tabel 2.25.
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008 s.d 2009

No	Jenjang Pendidikan	Tahun	
		2008	2009
1.	SD/MI		
a.	Jumlah sekolah	552	663
b.	Jumlah penduduk umur 7 - 12 tahun	121.186	131.236
c.	Rasio	220	198
2.	SMP/MTs		
a.	Jumlah sekolah	233	214
b.	Jumlah penduduk umur 13 - 15 tahun	52.058	45.416
c.	Rasio	223	212
3.	SMA/SMK/MA		
a.	Jumlah sekolah	98	102
b.	Jumlah penduduk umur 16 - 18 tahun	22.508	24.568
c.	Rasio	230	241

Sumber: Lampung Timur Dalam Angka, 2010

Tabel 2.26.
Rasio Jumlah Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	SD/MI					
a.	Jumlah guru	6.027	6.189	6.298	7.495	6.519
b.	Jumlah murid	112.128	115.566	115.750	126.348	110.251
c.	Rasio	18,60	18,67	18,38	16,86	16,91
2.	SMP/MTs					
a.	Jumlah guru	4.412	4.788	4.768	4.500	1.338
b.	Jumlah murid	45.332	47.096	48.245	48.420	37.511
c.	Rasio	10,27	9,84	10,12	10,76	28,04
3.	SMA/SMK/MA					
a.	Jumlah guru	1.896	2.464	2.397	2.799	2.293
b.	Jumlah murid	16.583	22.610	22.726	23.861	19.620
c.	Rasio	8,75	9,18	9,48	8,52	8,56

Sumber: Lampung Timur Dalam Angka, 2011

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas (a) sumber daya manusia; (b) kehidupan dan usia harapan hidup manusia; (c) kesejahteraan keluarga dan masyarakat; (d) serta kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Peningkatan kualitas penduduk secara fisik dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk dan status kesehatan penduduk. Kesehatan

merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dipercaya menjadi penyebab langsung maupun tak langsung keberhasilan bidang-bidang lain.

Status kesehatan penduduk antara lain dapat diukur dari angka kesakitan dan rata-rata lama sakit. Angka kesakitan dapat diartikan sebagai persentase banyaknya penduduk yang mengeluh sakit sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari terhadap jumlah penduduk keseluruhan. Sedangkan rata-rata lama sakit diartikan sebagai rata-rata lamanya penduduk tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari yang diukur dalam hari.

Berdasarkan BPS Lampung Timur (2011) angka kesakitan penduduk Kabupaten Lampung Timur turun dari 16,48% di tahun 2008 menjadi 12,40% di tahun 2010 (Tabel 2.27). Rata-rata lama sakit mengalami penurunan dari 6,15 hari di tahun 2008 menjadi 5,5 hari di tahun 2010 (Tabel 2.27). Kenyataan ini memberikan pengertian awal bahwa kemungkinan secara kuantitas jumlah penduduk yang sakit berkurang, dan jika dilihat dari sisi tingkat kesakitan termasuk kategori ringan.

Tabel 2.27.
Angka Kesakitan dan Rata-rata Lama Sakit di Kabupaten Lampung Timur 2007-2010

Tahun	Angka Kesakitan (%)	Rata-rata lama sakit (hari)
2007	41,57	6,20
2008	16,48	6,15
2009	15,80	6,20
2010	12,40	5,50

Sumber : BPS Lampung Timur, 2011

Gambaran tingkat kesehatan penduduk dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang mengeluh sakit. Pada tahun 2010 menyebutkan bahwa penduduk Kabupaten Lampung Timur yang mengalami keluhan kesehatan mencapai 486.551 jiwa dengan rata-rata lama sakit 5,50 hari. Berdasarkan Tabel 2.28 pada tahun 2010 jenis keluhan kesehatan penduduk Kabupaten Lampung Timur sebagian besar adalah batuk (26,1%), diikuti pilek (25,6%), panas (17,1%) dan lainnya (21,6 %).

Tabel 2.28
Jenis Keluhan Kesehatan Penduduk Kabupaten Lanipung Timur, 2008 - 2010

Jenis Keluhan Kesehatan	Tahun		
	2008	2009	2010
1. Panas	15,6	17,0	17,1
2. Batuk	27,3	26,1	26,1
3. Pilek	26,2	24,5	25,6
4. Asma	1,8	1,5	1,6
5. Diare	2,5	1,3	1,5
6. Sakit Kepala Berulang	9,1	5,3	4,4
7. Sakit Gigi	3,9	1,4	2,0
8. Lainnya	19,4	15,5	21,6

Sumber : BPS Lampung Timur, 2011

Indikator lain yang berkaitan dengan peran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan adalah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Indikator ini sangat penting karena peristiwa kelahiran merupakan situasi yang rawan yakni mempunyai resiko kematian yang tinggi terutama bila penanganannya tidak dilakukan secara cermat. Persentase balita di Kabupaten Lampung Timur yang kelahirannya ditolong tenaga kesehatan pada tahun 2010 menunjukkan penurunan pada tahun 2010 dibandingkan 2007, yaitu 75% di tahun 2008 menjadi 81,50 % pada tahun 2010 (Tabel 2.29).

Tabel 2.29
 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran
 Di Kabupaten Larnpung Timur 2007-2010

Penolong Kelahiran	2007	2008	2009	2010
	%	%	%	%
Tenaga Medis	69,57	75,00	74,00	81,50
- Dokter	5,94	6,10	5,80	8,60
- Bidan	62,13	68,20	68,20	71,60
- Tenaga Kesehatan Lain	1,50	0,70	0,00	1,30
Tenaga Non Medis	30,43	25,00	26,00	18,50
- Dukun	30,05	22,90	25,20	18,50
- Famili	0,38	1,80	0,80	0,00
- Lainnya	0,00	0,30	0,00	0,00

Sumber : BPS Lampung Timur, 2011

Kualitas hidup suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sektor kesehatan dalam pembangunan Fasilitas pendidikan belum memadai di 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur perlu penambahan dan pengembangan lebih lanjut baik sarana maupun kualitas sumber daya manusianya (SDM). Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lampung Timur merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan, di bidang kesehatan.

Secara umum fasilitas sarana kesehatan belum memadai, namun demikian pada Tahun 2010 terdapat beberapa tempat pelayanan kesehatan yang berada Kabupaten Lampung Timur, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah type B (bantuan dari Jepang) dan Rumah Sakit Swasta Aka Sri Bhawono; Puskesmas (31 buah); Pustu (90 buah); Rumah bersalin (17 buah); Poliklinik (41); Apotek (24 buah) seperi pada Tabel 2.30. Pada tahun 2010 tenaga medis yang melayani masyarakat adalah sebagai berikut Dokter Spesialis (1 orang); Dokter Umum (46 orang); Dokter Gigi (10 orang); Apoteker (3 orang); Bidan Desa (476 orang); Perawat (252 orang).

Tabel 2.30
Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan	Jenis Sarana Kesehatan					
	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Rumah Bersalin	Poliklinik	Apotek
Metro Kibang	-	1	2	-	-	1
Batanghari	-	1	6	-	-	-
Sekampung	-	2	4	2	3	4
Marga Tiga	-	2	5	1	1	-
Sekampung Udik	-	2	5	1	1	5
Jabung	-	2	5	-	2	-
Pasir Sakti	-	1	3	-	-	-
Waway Karya	-	1	3	-	-	-
Marga Sekampung	-	1	2	-	-	-
Labuhan Maringgai	-	1	5	1	1	-
Mataram Baru	-	1	2	1	5	-
Bandar Sribhawono	1	1	3	-	-	3
Melinting	-	1	3	-	-	-
Gunung Pelindung	-	2	6	1	1	1
Way Jepara	-	2	2	2	2	5
Braja Selehah	-	1	4	1	-	-
Labuhan Ratu	-	1	3	-	-	-
Sukadana	1	1	5	1	4	-
Bumi Agung	-	1	3	-	1	-
Batanghari Nuban	-	1	3	-	1	-
Pekalongan	-	2	5	1	2	3
Raman Utara	-	2	4	2	4	-
Purbolinggo	-	1	5	5	6	2
Way Bungur	-	1	5	1	1	-
Jumlah	2	31	90	17	41	24

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2009 menunjukkan 83,86 % penduduk yang melakukan upaya pengobatan sendiri. Survey juga menunjukkan upaya berobat jalan dan rawat inap lebih banyak dilaku kan perempuan (50,83%) dibandingkan laki-laki (49,17%).

c. Perumahan

Perumahan/papan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan. Rumah merupakan pegejawantahan pribadi manusia (Soejanto Poesporwardoyo, 1989). Maka dari itu rumah bagi penghuninya bukan hanya berfungsi sebagai tempat berteduh saja, tetapi juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan aspek kesehatan, kenyamanan bahkan estetika, sehingga pada akhirnya akan berkait pula dengan kesejahteraan maupun kualitas hidup penghuninya.

Luas lantai rumah dapat menjadi indikator apakah sebuah tempat tinggal mampu memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi penghuninya atau tidak. Hasil Susenas 2007-2009 menunjukkan bahwa rata-rata luas lantai per kapita di Kabupaten Lampung Timur dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan masing-masing 16.8 m² (2007), 19,3 m² (2008), dan 19,6 m² (2009), pada tahun 2010 terjadi penurunan menjadi 18,8 m². Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan rumah tangga yang ada di Kabupaten Lampung Timur terus mengalami peningkatan.

Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah persentase rumah tangga menurut jenis lantai hunian. Semakin besar proporsi rumah tangga yang memiliki lantai tanah mengindikasikan bahwa kondisi perumahan di daerah tersebut umumnya buruk. Pemilihan jenis lantai oleh rumah tangga biasanya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Semakin baik jenis lantai yang digunakan mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi dan derajat kesehatannya lebih baik.

Data hasil Susenas 2008 dan 2009 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga pada tahun 2010 memiliki lantai bukan tanah, yaitu 86,8% naik dari 82,1% di tahun 2009. Sedangkan persentase rumah tangga yang berlantai tanah turun dari 17,9% (2009) menjadi 13,2% ditahun 2010. Menurunnya proporsi rumah tangga yang menggunakan lantai tanah menunjukkan bahwa kondisi perumahan dan kesehatan di daerah tersebut mulai membaik.

Indikator penguasaan tempat tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar proporsi rumah tangga yang menempati tempat tinggal milik sendiri, semakin baik tingkat kesejahteraannya. Penguasaan tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur meningkat dari 91,1 % (2007) menjadi 95,5 % (2010). Hasil Pengolahan Susenas 2010 menggambarkan persentase jumlah penduduk berdasarkan bahan bakar utama untuk memasak yang ditampilkan pada tabel 2.31.

Tabel 2.31.
Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama Untuk Memasak

Bahan bakar utama untuk memasak	2008	2009	2010
	%	%	%
Listrik	0,1	0,2	0,4
Gas/elpiji	3,7	3,5	6,1
Minyak Tanah	5,9	5,4	4,3
Arang/briket	1,2	0,5	0,2
Kayu Bakar	88,5	89,6	88,5
Lainnya	0,5	0,8	0,5

Sumber : BPS Lampung Timur, 2011

Dari tabel terlihat bahwa bahan bakar utama yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh kayu bakar sebesar 89,6% kemudian diikuti oleh minyak tanah sebesar 5,4%. Tingginya angka pengguna kayu bakar karena umumnya mereka sudah terbiasa menggunakannya, selain itu juga dikarenakan minyak tanah yang sudah mulai langka.

Kenyamanan tinggal di suatu rumah dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas pokok di rumah tersebut. Salah satu fasilitas pokok rumah adalah sumber penerangan. Proporsi atau persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik makin menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di suatu daerah. Namun sumber penerangan listrik sangat

bergantung dari ketersediaan fasilitas di daerah. Mengingat jangkauan listrik yang sangat terbatas, maka tidak semua rumah tangga memperoleh fasilitas tersebut.

Lampu sangat diperlukan sebagai penerangan rumah tangga. Sumber penerangan rumah tangga dapat diperoleh dari PLN, non PLN, petromak, teplok maupun lainnya. Sumber penerangan dari PLN dan non PLN tergantung pada fasilitas yang ada di daerah. Mengingat wilayah jangkauan listrik yang sangat terbatas, maka tidak semua daerah di Kabupaten Lampung Timur dapat terjangkau oleh penerangan listrik.

Menurut data Susenas 2009, penggunaan sumber penerangan listrik (PLN dan Non PLN) oleh rumah tangga mengalami penurunan dari tahun 2008. Sementara penggunaan pelita/setir/obor cenderung meningkat dari 7,8 di tahun 2008 menjadi 14,5% di tahun 2009. Penggunaan Petromak juga mengalami kenaikan dari 0,5% di tahun 2008 menjadi 1,4% di tahun 2009. Meningkatnya penggunaan petromak dan pelita/sentir/obor bisa disebabkan karena harga tarif dasar listrik yang terus naik tiap tahunnya, juga karena masih terdapat wilayah di Kabupaten Lampung Timur yang belum bisa menikmati listrik PLN (Tabel 2.32).

Tabel 2.32.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan
di Kabupaten Lampung Timur 2008 dan 2009

Sumber Penerangan	2008	2009
	%	%
PLN	89,5	77,6
Non PLN	1,3	5,0
Petromak/ Aladin	0,5	1,4
Pelita/ Setir/ Obor	7,8	14,5
Lainnya	0,9	1,5
Total	100,0	100,0

Sumber : Hasil Pengolahan Susenas, 2008 dan 2009

Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang tak terelakkan bagi kehidupan setiap manusia. Fungsi air bersih dalam rumah tangga adalah untuk minum, mandi dan cuci. Penggunaan air bersih dapat diperoleh dari berbagai sumber air seperti ledeng, pompa, sumur, mata air dan lainnya.

Berdasarkan Tabel 2.33, rumah tangga yang memiliki fasilitas air bersih yang bersumber dari sumur dan mata air terlindung mencapai 51,8%. Sementara rumah tangga yang memiliki fasilitas air bersih yang bersumber dari sumur dan mata air tak terlindung mencapai 34,7%. Sebagian kecil rumah tangga atau sekitar 7,8% menggunakan pompa dan air dalam kemasan sebagai sumber air minumnya. Sedangkan di tahun 2009 masih terdapat lagi rumah tangga yang menggunakan ledeng sebagai sumber air minumnya.

Tabel 2.33.
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum, 2007-2010

Sumber Air Minum	2007	2008	2009	2010
	%	%	%	%
Ledeng	0,0	0,4	1,0	2,1
Sumur terlindung	59,0	44,7	46,0	51,8
Sumur tak terlindung	33,1	39,9	41,3	34,7
Mata air terlindung	0,0	1,7	0,1	0,2
Mata air tak terlindung	0,0	1,3	1,4	0,3
Pompa	4,1	9,2	7,1	7,3
Air Dalam Kemasan	0,8	1,1	1,4	1,6
Lainnya	3,0	1,7	1,7	0,5

Sumber : BPS Lampung Timur, 2011

Pada tahun 2009 proporsi Rumah Tangga Miskin (RTM) secara total mencapai 42,75% dari total jumlah Rumah Tangga (RT) di Kabupaten Lampung Timur. Proporsi RTM terbesar terdapat di Kecamatan Marga Sekampung mencapai 69,21%, sedangkan terkecil terdapat di Kecamatan Raman Utara mencapai 25,48% (RPPJP Kabupaten Lampung Timur, 2011).

d. Sarana Peribadatan

Kehidupan keagamaan masyarakat Kabupaten Lampung Timur sangat kondusif. Pada tahun 2010 jumlah pemeluk agama Islam berjumlah 935.599 orang (95,49%). Selanjutnya pemeluk agama Hindu sebanyak 10.353 orang (1,06%); Kristen Protestan 12.232 orang (1,25%); Kristen Katolik 14.855 orang (1, 52%), Budha 6.701 orang (0,68%). Jumlah tempat peribadatan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dan secara kuantitas kehidupan keagamaan juga mencerminkan perkembangan yang semakin baik. Tingkat kerukunan beragama cukup baik yang tercermin dari rendahnya intensitas maupun frekuensi kejadian konflik yang berlatar belakang agama. Banyaknya tempat ibadah di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34.
Banyaknya Tempat Peribadatan Di Kabupaten Lampung Timur

Kecamatan	Masjid	Gereja	Pura	Vihara
Metro Kibang	26	3	-	-
Batanghari	63	3	-	-
Sekampung	51	6	-	-
Marga Tiga	79	7	-	-
Sekampung Udik	81	17	21	2
Jabung	94	4	-	1
Pasir Sakti	89	9	9	4
Waway Karya	58	10	3	-
Marga Sekampung	36	7	1	2
Labuhan Maringgai	70	4	2	-
Mataram Baru	42	5	-	4

Kecamatan	Masjid	Gereja	Pura	Vihara
Bandar Sribhawono	35	5	3	2
Melinting	37	2	-	-
Gunung Pelindung	36	4	-	1
Way Jepara	100	10	3	-
Braja Selebah	33	5	7	-
Labuhan Ratu	67	5	4	1
Sukadana	113	2	2	-
Bumi Agung	24	2	-	-
Batanghari Nuban	59	7	-	1
Pekalongan	76	4	1	3
Raman Utara	61	2	13	1
Purbolinggo	60	2	-	-
Way Bungur	43	2	-	-
Jumlah	1.433	127	69	22

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur , 2011

e. Pemerintahan Umum

Aspek kelembagaan memegang peranan yang sama pentingnya dengan aspek-aspek lainnya dalam penataan ruang (fisik, sosial, dan ekonomi). Namun terkadang dianggap sepele dan mendapatkan perhatian paling sedikit dalam perumusan suatu produk tata ruang. Bila ditinjau dari peranan dan fungsinya, aspek kelembagaan sangat menentukan baik dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian ruang. Kelembagaan seharusnya dapat menjadi jaminan bahwa suatu produk tata ruang dapat berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan.

Menilik dari hal tersebut, perlu dilakukan analisis kelembagaan untuk memahami kapasitas pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan pembangunan yang mencakup struktur organisasi dan tata laksana pemerintahan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana kerja, produk-produk pengaturan serta organisasi non-pemerintah dan perguruan tinggi.

(1) Struktur Organisasi

Dengan diberlakukannya Undang-undang 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Dengan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkurent berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Peraturan ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Tabel 2.35.
Jumlah Desa dan Rata-rata Penduduk/desa pada Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Rata-rata Penduduk/desa (jiwa/Desa)
1	Metro Kibang	Margototo	76,78	7	2.794
2	Batang Hari	Banarjoyo	148,88	17	3.109
3	Sekampung	Sumbergede	148,34	17	3.502
4	Marga Tiga	Tanjung Harapan	250,73	13	3.503
5	Sekampung Udik	Pugung Raharjo	339,12	15	4.575
6	Jabung	Negara Batin	267,84	15	3.118
7	Pasir Sakti	Mulyo Sari	193,94	8	4.440
8	Waway Karya	Sumber Rejo	211,07	11	3.375
9	Marga Sekampung	Peniangan	177,32	8	3.482
10	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	194,99	11	6.004
11	Mataram Baru	Mataram Baru	79,56	7	3.903
12	Bandar Sribhawono	Sribhawono	185,71	7	6.222
13	Melinting	Wana	139,3	6	4.380
14	Gunung Pelindung	Negeri Agung	78,52	5	4.444
15	Way Jepara	Braja Sakti	229,27	15	3.376
16	Braja Selebah	Braja Harjosari	247,61	7	3.130
17	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	485,51	11	3.724
18	Sukadana	Sukadana	756,76	20	3.821
19	Bumi Agung	Dono Mulyo	73,17	8	2.889
20	Batang Hari Nuban	Sukaraja Nuban	180,69	13	3.225
21	Pekalongan	Pekalongan	100,13	12	4.383
22	Raman Utara	Kota Raman	161,37	11	3.273
23	Purbolinggo	Taman Fajar	222,03	12	3.282
24	Way Bungur	Tambah Subur	376,38	8	2.714
Jumlah			5325,02	264	1.726

Sumber: Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Disamping perampingan struktur organisasi, pemerintah daerah juga telah melakukan pemekaran kecamatan berdasarkan pertimbangan geografis dan aspirasi masyarakat yang dimaksudkan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik. Pada tahun 2010 jumlah

kecamatan di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 24 kecamatan dengan 264 Desa. Kecamatan Batanghari, Kecamatan Sekampung dan Kecamatan Sukadana merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lain. Kecamatan Sri Bhawono merupakan kecamatan dengan rata-rata kepadatan penduduk/desa tertinggi yaitu 6.222 jiwa, sedangkan kecamatan terluas adalah Kecamatan Sukadana dengan luas 756,76 km² atau 14,21 % dari luas Kabupaten Lampung Timur (Tabel 2.35).

(2) Kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur

Jumlah pegawai di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2008 adalah sejumlah 21.198 orang dan pada tahun 2010 mengalami sedikit kenaikan menjadi 21.761 orang. Adapun keadaan pegawai negeri Kabupaten Lampung Timur untuk 3 (tiga) tahun terakhir dilihat dari golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36.
Data PNS Kabupaten Lampung Timur 2008-2010

Thn	Golongan				Tingkat Pendidikan							
	I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2
2008	75	1.990	5.227	3.307	193	182	2.247	238	3.700	759	3.166	114
(%)	0,71	18,78	49,32	31,20	1,82	1,72	21,20	2,25	34,91	7,16	29,87	1,08
2009	103	2.048	4.751	3.692	180	185	2.174	235	3.420	807	3.483	110
(%)	0,97	19,33	44,85	34,85	1,70	1,75	20,52	2,22	32,28	7,62	32,88	1,04
2010	123	2120	4657	3981	165	187	2201	239	3332	834	3808	114
(%)	1,13	19,49	42,79	36,58	1,52	1,72	20,23	2,19	30,62	7,66	35	1,05

Sumber Data : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pegawai dengan golongan III dan IV lebih besar dibandingkan dengan pegawai golongan I dan II demikian juga persentasi pegawai berpendidikan D3, S1 dan S2 lebih besar dari pegawai berpendidikan SD sampai D2. Hal ini mengindikasikan potensi SDM yang sangat baik untuk potensi yang dimiliki Kabupaten Lampung Timur.

f. Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam pembangunan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi berkaitan dengan kebutuhan manusia akan pekerjaan dalam rangka memperoleh pendapatan, yang secara langsung berhubungan dengan daya beli untuk dapat hidup layak. Sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan.

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tenaga kerja dituntut memiliki kualitas tertentu untuk menjamin pekerja mendapatkan perlindungan dan penghasilan yang memadai untuk dapat hidup layak. Batasan umur untuk penduduk usia kerja berbeda-

beda, ada yang menggunakan usia 10 tahun keatas, 15 tahun keatas, dan 15-64 tahun. Dalam penulisan ini digunakan batasan 15 tahun keatas. Pemilihan ini didasarkan pada kebijakan Internasional Labour Organization (ILO) dalam menentukan batasan usia kerja dan kondisi empiris yang ada.

Tingkat pendidikan para pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.37. Terlihat bahwa mulai meningkatnya para pencari kerja lulusan perguruan tinggi (24,06%), hal ini harus diantisipasi pemberdayaannya. Para pencari kerja lulusan perguruan tinggi memiliki potensi untuk diarahkan menjadi pengusaha yang handal, tetapi diperlukan pembinaan yang khusus bidang kewirausahaan.

Tabel 2.37.
Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
1	Tidak Tamat SD	1	0	1	0,051
2	Tamat SD	8	14	22	1,13
3	Tamat SLTP/Sederajat	94	109	203	10,46
4	Tamat SLTA/Sederajat	719	390	1.208	62,27
5	Sarjana Muda/D III/S0	69	315	217	11,18
6	Sarjana/D4	95	126	250	12,88
	Jumlah	986	954	1.940	

Sumber : Lampung Timur dalam Angka, 2011

Kondisi tingkat pengangguran Kabupaten Lampung Timur tahun 2009 diperlihatkan oleh Tabel 2.38. Dari tabel tersebut terlihat bahwa penurunan tingkat pengangguran hanya sedikit. Hal ini menunjukkan program-program ketenagakerjaan belum efektif mengurangi pengangguran terbuka. Dua hal utama yang mungkin menjadi alasan naiknya angka pengangguran ini yaitu, pertama pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja (*labour force*) mulai seimbang dengan percepatan penyediaan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, mulai tersedianya lapangan kerja. Kedua, mereka yang telah menamatkan sekolahnya cenderung untuk mencari kerja dibandingkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2.38.
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Timur 2005 - 2008

Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
2005	7,1	10,5	9,1
2006	6,7	16,6	10,2
2007	4,0	8,8	5,8
2008	4,9	12,7	7,7

Sumber : IPM Kabupaten Lampung Timur, 2009

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Lampung Timur memiliki jam kerja pada kisaran 15-34 jam dan lebih 35 jam per minggu. Terlihat pada Tabel 2.39, pada tahun 2009, mereka yang jam kerjanya pada kisaran 15-34 jam persentasenya mencapai

33,26% sedangkan persentase penduduk yang termasuk kategori bekerja penuh (jam kerja > 35 jam) pada tahun 2008 mencapai 54,6%. Lapangan usaha yang termasuk pada kisaran jam kerja > 35 jam umumnya adalah mereka yang bekerja sebagai pedagang atau petani.

Tabel 2.39.
Persentase Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Jam Kerja
Di Kabupaten Lampung Timur 2008-2010

Jam Kerja (jam)	2008	2009	2010
	%	%	%
0	5,1	2,1	2,4
1 - 14	7,5	10,0	7,4
15 - 34	30,9	33,3	33,4
35 +	56,5	54,6	56,6
Jumlah	100	100	100

Sumber : BPS Lampung Timur, 2011

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Potensi luas lahan untuk tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2010 mencapai 54.981 Ha untuk lahan sawah dan lahan kering : 141.474 Ha, dengan komoditas potensial yang dapat dikembangkan antara lain padi, jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang hijau. Hingga saat ini industri pengolahan skala besar dan menengah untuk meningkatkan nilai tambah tanaman hortikultura baru tersedia pabrik tapioka. Industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang ada hanya industri pengolahan skala rumah tangga. Pada tahun 2010, Lampung Timur menghasilkan padi setara dengan 15,5% dari total produksi padi di Provinsi Lampung. Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Produk tanaman pangan dari Kabupaten Lampung Timur yang telah menembus pasar regional maupun nasional adalah padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Sementara komoditi lainnya hanya dikonsumsi oleh pasar lokal. Rantai pemasaran umumnya agak panjang. Dari produsen (petani) ke pengepul (pengumpul), kemudian ke agen (pedagang besar), dan baru ke pasar domestik, regional, maupun nasional. Dengan rantai pemasaran seperti tersebut, para petani menerima margin keuntungan (*profit margin*) terkecil diantara pelaku lainnya. Rantai pemasaran seperti ini terjadi pada hampir semua komoditi di semua sektor di wilayah Kabupaten Lampung Timur khususnya dan Provinsi Lampung umumnya. Dengan gambaran kondisi tersebut, peluang investasi untuk budidaya berbagai komoditi tanaman pangan dan perdagangan masih terbuka lebar.

Tabel 2.40.
Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Tahun 2008-2009

No	Jenis tanaman	2008			2009		
		Luas Lahan	Produk-tivitas	Produksi	Luas lahan	Produk-tivitas	Produksi
		(Ha)	(Kw/Ha)	(ton)	(Ha)	(Kw/Ha)	(ton)
1	Padi sawah	83.834	51,53	431.981	81.816	51,03	417.521
2	Padi ladang	6.011	29,41	17.681	6.206	29,04	18.02
3	Padi (swh + Ldng)	89.845	50.05	449.662	88.022	49,48	435.541
4	Jagung	133.186	48,37	644.243	126.413	49,14	621.254
5	Kedelai	609	11,76	716	1.172	12,21	1.431
6	Kacang tanah	830	12,34	1.024	929	12,51	1.162
7	Ubi kayu	42.861	246,87	1,058,097	37.066	242,11	897.411
8	Ubi jalar	363	99,78	3.622	426	99,20	4.226
9	Kacang hijau	413	0,00	370	379	8,92	338

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2010

Pada awalnya Kabupaten Lampung Timur merupakan pasar dari produk sayur-sayuran, saat ini masyarakat mulai mengembangkan sayur-sayuran walaupun pada skala kecil. Komoditas seperti kacang panjang, cabe, tomat, terong, buncis, kangkung, dan bayam mulai banyak diusahakan. Pemasaran produk tersebut baru sebatas pasar lokal. Luas panen, produksi, dan produktivitas sayur-sayuran dan buah-buahan semusim Tahun 2009-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41.
Luas panen, Produksi, dan produktivitas Sayur-sayuran dan Buah-buahan Semusim

No	Jenis Tanaman	2009			2010		
		Luas lahan	Produk-tivitas	Produksi	Luas lahan	Produk-tivitas	Produksi
		(Ha)	(Kw/Ha)	(Kwintal)	(Ha)	(Kw/Ha)	(Kwintal)
1	Bawang merah	1	40,00	40	3	37,33	112
2	Bawang daun	7	17,00	119	11	-	216
3	Sawi	108	34,99	3.779	121	35,60	4.307
4	Kacang panjang	525	29,46	15.467	654	29,35	19.198
5	Cabe	496	43,98	21.813	634	44,36	28.123
6	Tomat	171	15,78	2.698	194	17,60	3.415
7	Terong	289	45,43	13.129	365	16,02	5.848
8	Buncis	91	48,68	4.430	104	81,94	8.552
9	Ketimun	228	48,90	11.150	278	30,65	8.522
10	Kangkung	161	38,14	6.140	181	47,08	8.522
11	Bayam	167	20,27	3.385	199	23,10	4.597
12	Semangka	405	178,79	72.409	490	180,00	88.201

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Kabupaten Lampung Timur merupakan penghasil buah-buahan penting di Propinsi Lampung, walaupun demikian sampai saat ini baru ada satu perusahaan besar yang mengembangkan komoditas ini, yaitu Komoditas Pisang Kavandis yang dikembangkan oleh PT NTF di Way Jepara. Komoditas seperti Avokat, Mangga, Rambutan, Duku, Durian, Jeruk Siam, Jambu Biji, jambu Air, sawo, Pepaya, Nanas, Belimbing, Sukun, Petai, dan melinjo banyak diusahakan oleh masyarakat.

Tabel 2.42.

Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Sayur-sayuran dan Buah-buahan Tahunan

No	Jenis Tanaman	2009			2010		
		Jumlah pohon	Produk-tivitas	Produksi	Luas lahan	Produk-tivitas	Produksi
		(pohon)	(Kw/phn)	(Kwintal)	(Ha)	(Kw/phn)	(Kwintal)
1	Avokat	8.788	1,81	15.929	9.028	1,81	16.341
2	Mangga	27.508	0,64	17.627	24.189	0,88	21.206
3	Rambutan	114.525	1,55	177.242	113.926	1,64	187.313
4	Duku	9.652	0,97	9.352	9.295	1,07	9.946
5	Durian	67.867	1,05	71.138	67.374	1,13	76.362
6	Jeruk Siam	71.757	0,39	28.076	386	1,30	503
7	Jambu Air	22.983	0,99	22.868	21.859	1,05	14.874
8	Sawo	37.244	0,88	32.865	40.205	0,84	33.782
9	Pepaya	220.305	2,79	613.996	1.374.757	0,63	867.755
10	Pisang	1.317.614	0,79	1.038.416	1.303.548	0,80	1.042.222
11	Nanas	35.933	0,43	15.440	37.14	0,33	12.183
12	Salak	132.469	0,31	41.140	146.913	0,13	18.933
13	Nangka	66.052	1,33	87.731	68.717	1,39	95.648
14	Sukun	11.042	1,75	19.274	10.562	1,95	20.56
15	Petai	16.168	0,93	14.988	17.965	0,62	11.084
16	Melinjo	20.687	0,75	15.462	25.185	0,31	7.833

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Pemasaran produk tersebut sudah antar pulau dengan pasar utama DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatra Selatan, walaupun demikian belum ada industri pengolahan yang mengolah produk-produk tersebut. Luas panen, produksi, dan produktivitas sayur-sayuran dan buah-buahan tahunan Tahun 2009-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.42. Program prioritas pengembangan potensi pertanian TPH yang ditawarkan antara lain (1) Pemanfaatan lahan pertanian dengan pola pertanian modern (*full technology*), (2) Pengembangan agroindustri, (3) Pengembangan Agribisnis Jagung, dan (4) Pengadaan Alsintan (Alat Mesin Pertanian).

b. Perkebunan dan Kehutanan

Pada sub sektor perkebunan, Kabupaten Lampung Timur memiliki lahan potensi untuk perkebunan seluas 43.227 Ha. Beberapa komoditas unggulan, diantaranya Kakao, Kelapa dalam, Lada, Kelapa Sawit, Karet, Kopi Robusta, dan sebagainya. Dalam kurun waktu 2008-2010, Komoditas Kelapa Sawit mengalami peningkatan produksi yang cukup signifikan dari 16,15 %, diikuti Komoditas Kakao 13,50 %, dan Komoditas Karet 11,36 %. Peningkatan produksi ini terjadi karena perluasan areal tanam serta nilai jualnya yang semakin tinggi dibandingkan dengan jenis

komoditas perkebunan lainnya. Luas areal dan produksi perkebunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43.
Luas Areal dan Produksi Perkebunan Tahun 2008-2009

No	Jenis Tanaman	2008		2009	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Aren	41,63	9,88	43,48	11,94
2	Cabe Jamu	486,30	286,97	489,30	422,48
3	Cengkeh	84,50	7,24	84,50	7,23
4	Kakao	14.216,88	8.567,10	13.013,00	7.548,40
5	Kayu Manis	9,25	0,41	9,25	0,41
6	Kapok	560,38	167,81	568,38	171,41
7	Karet	5.199,75	356,77	4.141,60	320,37
8	Kelapa Dalam	21.792,55	18.369,71	21.988,80	19.631,91
9	Kelapa Hibrida	263,25	257,31	263,25	257,25
10	Kelapa Sawit	3.436,50	2.535,62	3.116,75	2.183,05
11	Kopi Robusta	1.185,50	588,31	1.190,75	592,90
12	Lada	7.227,75	2.711,26	7.362,50	2.758,11
13	Pinang	155,03	33,07	155,03	33,26
14	Vanili	39,25	7,68	38,50	7,10
15	Tembakau	77,50	39,75	75,00	37,80
16	Pala	177,30	1,77	134,80	1,77
17	Jarak Pagar	257,25	22,19	934,25	23,27
18	Jahe	-	-	163,13	220,92
19	Kencur	-	-	139,75	147,34
20	Kunyit	-	-	234,10	251,45
21	Lengkuas	-	-	99,95	364,03
22	Temulawak	-	-	15,15	30,46

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Produk tanaman perkebunan dari Kabupaten Lampung Timur yang telah menembus pasar regional maupun nasional berupa Kakao, Karet, Minyak Sawit, Kopi, Lada, dan beberapa komoditas lain. Sampai saat ini belum ada industri yang berinvestasi dalam pengolahan hasil tanaman perkebunan, sehingga nilai tambah dari proses pengolahan hasil masih dinikmati oleh daerah lain. Dengan potensi lahan yang masih tersedia untuk pengembangan tanaman perkebunan dan prospek pasar yang menjanjikan, peluang investasi untuk budidaya berbagai komoditas tanaman perkebunan dan perdagangan masih terbuka lebar. Disamping budidaya, peluang investasi juga terbuka untuk usaha pengolahan dan pemasaran.

Pada sub sektor kehutanan, Kabupaten Lampung Timur memiliki lima kawasan hutan, yaitu :

- a. Kawasan Gunung Balak, sebagai kawasan hutan lindung seluas 22.292,5 Ha,
- b. Kawasan Way Kambas, sebagai kawasan hutan suaka margasatwa seluas 125.621,3 Ha,
- c. Kawasan Muara Sekampung, sebagai kawasan hutan lindung seluas 1.488,36 Ha,
- d. Kawasan Way Kibang, sebagai hutan produksi seluas 6.538 Ha,
- e. Kawasan Gedung Wani, sebagai hutan produksi seluas 6.637 Ha.

Kabupaten Lampung Timur juga memiliki potensi penghasil kayu yang diusahakan rakyat. Jenis-jenis kayu jati, sengon, jabon, akasia, bayur, dan waru mulai banyak ditanam oleh masyarakat. Pada tahun 2009 produksi kayu Kabupaten Lampung Timur tercatat kayu racuk 503.927 m³; kayu durian 201.938 m³; kayu indah 42.665 m³; kayu akasia 798,95 m³; dan kayu jati 31.517 m³.

c. Peternakan

Dalam RTRW nasional menyebutkan bahwa Propinsi Lampung, sebagai lumbung ternak nasional. Merespon arahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merasa perlu program untuk mewujudkan keinginan tersebut. Dari tahun 2006 sampai tahun 2009 jumlah ternak sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi terus mengalami peningkatan yang signifikan. Populasi sapi meningkat rata-rata 11,61 %/tahun; kambing meningkat rata-rata 7,12 %/tahun; domba meningkat rata-rata 6,33 %/tahun; dan babi meningkat rata-rata 8,69 %/tahun (Tabel 2.44).

Tabel 2.44.
Perkembangan Populasi Ternak tahun 2006-2010

Tahun	Sapi (Ekor)	Kerbau (Ekor)	Kambing (Ekor)	Domba (Ekor)	Babi (Ekor)
2010	95.814	6.546	117.421	19.003	17.678
2009	80.806	6.078	107.725	17.344	16.506
2008	75.171	5.608	97.999	15.686	15.355
2007	59.245	5.553	97.058	15.528	15.204
2006	55.174	-	83.842	13.838	12.247

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Peternakan di Kabupaten Lampung Timur dilakukan oleh peternak rakyat skala kecil sebagai kegiatan sampingan. Pada tahun 2010 setiap rumah tangga peternak sapi memelihara 3 ekor sapi; setiap rumah tangga peternak kambing memelihara 7 ekor kambing; setiap rumah tangga peternak babi memelihara 18 ekor babi. Diperkirakan jumlah ternak per rumah tangga atau jumlah keluarga peternak akan terus meningkat, karena kondisi keamanan yang semakin baik dan harga jual ternak yang stabil. Peternakan unggas di Kabupaten Lampung Timur mengalami kenaikan tajam dari tahun 2006 – 2010 khususnya ayam pedaging dan ayam petelur. Hal ini disebabkan oleh resiko akan penyakit semakin kecil dan keuntungan yang semakin besar, demikian juga unggas itik dan entok mengalami peningkatan (Tabel 2.45).

Saat ini permintaan pasar untuk sapi, baik pasar nasional maupun internasional belum mampu dipenuhi oleh peternak dari Kabupaten Lampung Timur maupun Provinsi Lampung. Disamping itu, belum adanya industri pengolahan ternak juga membuka peluang bagi investor untuk mendirikan pabrik pengolahan hasil peternakan. Perkembangan produksi daging dan telur Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.45.
Perkembangan Populasi Unggas (ekor) tahun 2006-2010

Tahun	Ayam buras	Ayam Pedaging	Ayam Petelur	Itik	Entok
2010	2.451.115	1.937.700	963.816	59.058	3.541
2009	2.356.842	513.266	143.139	56.086	2.296
2008	2.262.575	625.701	141.877	53.055	1.327
2007	2.240.174	619.505	140.472	53.530	1.313
2006	1.500.656	735.353	170.423	53.530	-

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Tabel 2.46.
Perkembangan Produksi Daging dan Telur Kabupaten Lampung Timur (ton)

Jenis Komoditas	Tahun			
	2007	2008	2009	2010
A. Daging	1264,84	1176,6	1364,97	3450,00
a. Sapi	330,75	307,67	323,22	2914,00
b. Kerbau	10,58	9,84	12,15	168,00
c. Kambing	48,35	44,98	53,86	227,00
d. Babi	32,16	29,92	33,01	141,00
e. Unggas	843	784,19	942,73	0,00
B. Telur	622,38	578,95	525,18	662,00
a. Ayam Buras	431,51	401,4	424,23	369,00
b. Ayam Ras	-	-	-	283,00
c. Itik	190,87	177,55	100,95	100,00

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

d. Perikanan dan Kelautan

Potensi sumber daya laut di Kabupaten Lampung Timur meliputi lahan seluas 108 km x 4 mil (1 mil = 1,852 km) = 800.084 km², terdiri dari budidaya perairan umum seluas 5.821,00 Ha (baru dimanfaatkan 862 Ha atau 14,81%) dan perairan payau/tambak seluas 5.122,5 Ha (baru dimanfaatkan 1.294,96 Ha atau 25,28%), serta perairan laut untuk perikanan tangkap seluas 29.674.000 Ha (baru dimanfaatkan 284.704 Ha atau 9,6%). Dengan potensi yang begitu besar, produksi ikan basah hasil tangkapan di perairan laut dan ikan basah hasil budidaya di perairan umum dapat dilihat pada Tabel 2.47. Menurut BPS Provinsi Lampung (2010), produksi perikanan Kabupaten Lampung Timur mencapai 49.781 ton atau 17,78 % produksi perikanan Propinsi Lampung, sehingga memiliki potensi sebagai Daerah Minapolitan.

Selain produksi perikanan tangkap dan budidaya di perairan laut dan perairan umum, terdapat juga potensi rumput laut, mutiara, serta perikanan budidaya air payau dan air tawar. Disamping kegiatan penangkapan dan budidaya, terbuka juga investasi industri modern pengolahan hasil perikanan yang hingga saat ini belum ada di Kabupaten Lampung Timur, industri pengolahan ikan yang ada baru pada skala rumah tangga.

Tabel 2.47.
Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Lampung Timur (ton)

Uraian	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
A. Penangkapan					
1. Laut	37.384,9	41.978,0	44.076,9	38.209,3	38.495,20
2. Perairan					
a. Sungai	2.589,6	2.642,9	2.775,1	2.586,4	816,01
b. Rawa	147,8	159,8	163,0	232,6	269,23
c. Waduk	73,5	77,6	81,0	82,0	276,38
B. Budidaya					
1. Tambak	3.879,9	4.161,9	5.772,5	6.090,9	5.336,14
2. Kolam	798,2	1.117,6	1.389,2	2.381,9	2.381,87
3. Kolam Pekarangan	776,9	1.089,0	1.352,0	1.051,2	1.051,16
4. Minapadi	71,8	75,7	91,2	101,6	9,35
5. Keramba	41,9	44,8	60,2	48,8	42,91
6. Jaring Apung	65,8	79,4	129,1	139,6	45,76
7. Laut	123,0	159,9	193,3	218,3	6.386,23

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Perkembangan armada dan alat tangkap perikanan Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2006 - 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.48. Dari potensi yang telah diuraikan diatas jika dibandingkan fasilitas armada dan alat tangkap perikanan yang tersedia sangat kurang, sehingga terbuka potensi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengembangan komoditas perikanan.

Tabel 2.48.
Banyaknya Armada dan Alat Tangkap Perikanan Kabupaten Lampung Timur

Armada dan Alat Tangkap Perikanan	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
A. ARMADA PERIKANAN LAUT					
1. KM 20 - 30 GT	0	0	0	0	0
2. KM 10 - 20 GT	39	39	41	41	44
3. KM 5 - 10 GT	426	426	426	426	421
4. KM 0 - 5 GT	1.314	1.314	1.214	1.238	1.241
5. Motor Tempel	439	439	439	447	458
6. Tanpa Motor	134	134	134	121	0
B. ARMADA DI PERAIRAN UMUM					
1. Sungai	353	353	360	352	357
2. Rawa	245	245	349	342	300
3. Waduk	117	117	120	117	200
C. ALAT TANGKAP					
1. Pukat kantong	745	745	972	952	699
2. Pukat Cincin	0	0	24	22	88
3. Jaring Insang	2.007	2.007	813	796	437
4. Perangkap	328	328	389	381	39
5. Jaring angkat	2.053	2.053	2.093	2.051	401
6. Pancing	60	60	1061	183	232
7. Alat pengumpul	42	42	0	0	104
8. Lain-lain	66	66	110	108	88

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

e. Energi dan Sumberdaya Mineral

Potensi sektor energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Lampung Timur yang telah diketahui jumlah cadangannya antara lain adalah minyak dan gas bumi, pasir kuarsa, pasir bangunan, batu basalt, tanah lempung, dan air bersih/mineral. Potensi bahan tambang dan lokasi kecamatan di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49.
Potensi Bahan Tambang dan Lokasi Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur

No	Jenis Bahan Tambang	Lokasi Kecamatan	Cadangan (m3)
1	Pasir Kuarsa	Labuhan Maringgai	62.352.000
		Pasir Sakti	72.000.000
		Jumlah pasir kuarsa	134.352.000
2	Batu Basalt	Sukadana	23.850.720
		Mataram Baru	720.000
		Way Jepara	8.910.000
		Marga Tiga	ada
		Bumi Agung	ada
		Jumlah batu basalt	33.480.720
3	Pasir Bangunan	Jabung	1.658.000
		Purbolinggo	216.000
		Jumlah pasir bangunan	1.874.000
4	Tanah lempung	Raman Utara	1.968.600
		Way Jepara	477.360
		Jumlah tanah lempung	2.445.960

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

f. Industri dan Perdagangan

Jumlah industri pada tahun 2005 mencapai 4.111 unit usaha, dengan jumlah tenaga kerja 12.265 orang; nilai investasi Rp.105.762 (dalam juta rupiah); serta nilai produksi Rp.1.592.352 (dalam juta rupiah). Pada tahun 2010 angka tersebut meningkat menjadi 5.406 unit usaha dengan rincian industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) dengan jumlah 4.067 unit; industri logam, mesin dan elektronik (ILME) dengan jumlah 83 unit; dan industri kimia dan aneka dengan jumlah 1.256 unit. Jumlah total tenaga kerja pada tahun 2010 adalah 31.889 orang; nilai investasi Rp. 122.758,316 (dalam juta rupiah); serta nilai produksi Rp. 2.215.659,13 (dalam juta rupiah). Pada tahun 2010 perkembangan industri di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Industri yang berkembang di Kabupaten Lampung Timur sebagian besar industri yang bergerak pada Industri Hasil Pertanian & Kehutanan (IHPK) mencapai 75,23 %. Sesuai dengan potensi yang dimiliki serta arahan RTRW Provinsi Lampung dan RTRW Kabupaten Lampung Timur, maka industri yang dapat dikembangkan di Kabupaten Lampung Timur adalah agroindustri.

Tabel 2.50.
Perkembangan Industri di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2006-2009

Jenis Industri	Unit Usaha (unit)	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)
Industri Hasil Pertanian & Kehutanan (IHPK)	4.067	12.185	43.213.480	845.864.317
Industri Logam, Mesin, dan Elektronika (ILME)	83	270	1.556.828	7.503.340
Industri Kimia dan Aneka (IKA)	1.256	19.434	77.987.998	1.362.291.475
Tahun 2010	5.406	31.889	122.758.306	2.215.659.132
2009	5.070	17.484	118.977.778	2.199.949.158
2008	4.934	16.929	117.268.060	2.116.082.300
2007	4.249	14.102	110.549.050	1.684.734.388
2006	4.126	12.405	109.801.250	1.681.106.040

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Berdasarkan observasi lapangan, kondisi sarana perdagangan sudah cukup memadai dan daya beli masyarakat semakin meningkat. Pada tahun 2010 terdapat 105 unit ruko, 341 unit toko, 559 kios, 483 unit los, 1.209 los tenda dan 89 los hamparan yang masih operasional (Tabel 2.51). Di samping itu, mulai banyak bermunculan fasilitas perdagangan yang dibangun masyarakat baik di desa maupun di ibu kota kecamatan. Diperkirakan jumlah fasilitas perdagangan yang dibangun masyarakat empat kali lipat dari yang dikelola pemerintah.

Tabel 2.51.
Pasar yang Dikelola oleh Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Lampung Timur

NO	Nama Pasar	Fasilitas (Unit)					
		Ruko	Toko	Kios	Los	Tenda	Lapak
1	Sukadana	48	26	67	35	48	30
2	Rajabasa Lama	-	15	63	24	163	130
3	Way Jepara	17	138	123	225	700	110
4	Labuaan Maninggai	-	17	21	32	-	19
5	Sekampung	40	100	80	67	78	210
6	Pekalongan	-	16	103	16	80	195
7	Raman Utara	-	13	22	15	35	109
8	Purbolinggo	-	16	80	69	105	108
Jumlah		105	341	559	483	1209	911

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

Fasilitas perdagangan dan jasa yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Lampung Timur. Lembaga-lembaga perekonomian berupa bank dan koperasi telah banyak berdiri. Beberapa bank yang sudah beroperasii antara lain Bank Lampung, Bank Eka, BRI, dan Bank Danamon, dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu indikator dalam menentukan kondisi perekonomian daerah.

g. **Pariwisata**

Objek pariwisata Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi pasar yang cukup luas dan prospek pengembangannya masih sangat terbuka, diantaranya Taman Way Kambas memiliki karakteristik dengan kekayaan flora dan fauna, Taman Purbakala Pugung Raharjo, Danau Way Kawat, Desa Adat Wana, serta Cikal Bakal Wisata Agronomi, dan Peternakan. Nama objek wisata dan lokasi di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52.
Nama Objek Wisata dan Lokasi di Kabupaten Lampung Timur

Obyek Wisata	Lokasi Kecamatan	Daya Tarik
1. Taman Nasional Way Kambas	Labuhan Ratu	Permainan gajah, agrowisata, aneka flora dan fauna
2. Taman Purbakala Pugung Rahardjo	Sekampung Udik	Wisata budaya
3. Balai Benih Induk Pekalongan	Pekalongan	Agrowisata
4. Museum Budaya	Sukadana	Wisata budaya
5. Desa Tradisional Wana	Malinting	Wisata budaya
6. Danau Beringin Indah	Sukadana	Hiburan rakyat
7. Sesat Agung dan Rumah Adat	Sukadana	Wisata budaya
8. Danau Kemuning	Bandar Sri Bhawono	Wisata alam
9. Pasanggrahan Way Curup	Mataram Baru	Wisata alam
10. Danau Way Jepara	Way Jepara	Wisata alam
11. DAM Swadaya	Pekalongan	Wisata alam
12. Pemakaman Minak Braja Selebah	Labuhan Maringgai	Wisata budaya
13. Menara Kembar Sekampung Udik	Sekampung Udik	Wisata budaya
14. Lawang Kuri	Marga Tiga	Wisata budaya
15. Watter Boom Sri Bhawono	Bandar Sri Bhawono	Wisata air

Sumber : *Lampung Timur dalam Angka, 2010*

Potensi tersebut perlu didukung oleh berbagai usaha jasa dan produk wisata yang cukup baik seperti usaha perhotelan, biro perjalanan wisata, serta aneka souvenir berupa tenun ikat, songket, sarung dan lain-lain. Saat ini terdapat 10 hotel dengan jumlah kamar tidur 124 kamar dan tempat tidur 192 unit. Pada tahun 2009 kunjungan wisatawan asing 200 orang dan wisatawan nusantara 9.763 orang dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 270 orang untuk wisatawan asing dan 10.357 orang untuk wisatawan nusantara.

2.4. **Aspek Daya Saing**

2.4.1. **Jaringan Jalan**

Berdasarkan status dan wewenang pembinaan jalan, sistem jaringan jalan di Kabupaten Lampung Timur dikelompokkan sebagai berikut:

1. Jalan Negara/Nasional, yang termasuk Jalan Negara/Nasional di Kabupaten Lampung Timur adalah Bunut – Lab. Maringgai, yang panjangnya 82,99 Km.
2. Jalan Provinsi, yang termasuk Jalan Provinsi di Kabupaten Lampung Timur adalah Jalan Jabung – Sp. Kemuning, Asahan – Tanjung Sari, Sukadana – Jabung, Pg. Raharjo – Sribawono, Sribawono – LKR Sribawono, Sukadana – Labuhan Maringgai, Metro – Pasar Ayam, Pasar ayam – Tanjung

Kari, Metro – Yosodadi, Yosodadi – Gedong dalam, Gedong Dalam Sukadana, Bumi Jawa – Purbolingo, Raman Raya – Raman Utara, Gunung Sugih – Gedong Dalam, Sp. Sribawono – Sribawono, Sribawono – Wana – Tj. Aji, Gunung agung – Pg. Raharjo, Jatimulyo – Kibang, Kibang – Bantul.

3. Jalan Kabupaten, yang termasuk Jalan Kabupaten di Kabupaten Lampung Timur adalah jalan Labuhan Maringgai – Gunung Sugih Kecil – Jabung, Labuhan Maringgai – Wonoharjo – Wana – Simpang Sribawono, Sribawono – Taman Budaya – Pugung Raharjo – Tanjung Bintang, Sukadana – Nyampir – Negeri Jemanten – Gedong Wani – Pugung Raharjo – Bungbuk – Jabung – Asahan – Tanjung Sari, Sukadana – Nyampir – Donomulyo – Sekampung – Bumi harjo – Metro – Bandar Lampung, Sukadana – Rajabasa – Bumi Jawa – Pekalongan – Metro.

Hingga dengan tahun 2010, panjang jalan di Kabupaten Lampung Timur mencapai 1.556,45 km, dengan perincian 82,99 km merupakan jalan negara; 236,56 km jalan propinsi; dan 1.236,90 km adalah jalan kabupaten. Apabila dilihat dari kelas jalan, maka jalan-jalan di Kabupaten Lampung Timur terbagi menjadi kelas I sebesar 5,66%; kelas II 15,14%; dan kelas III/A 79,16%. Perkembangan pembangunan prasarana jalan di Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 2003 tidak banyak mengalami banyak perubahan untuk panjang maupun lebar jalan.

Jaringan jalan berdasarkan fungsi dan peran jaringan jalan yang ada di Kabupaten Lampung Timur, adalah sebagai berikut:

- (1) Jalan Arteri Primer, jalan arteri primer ini membentang di sebelah Timur Propinsi Lampung, mulai dari Bakauheni – Ketapang – Sripindowo-Bunut-Labuhan.
- (2) Jalan Kolektor Primer, meliputi ruas :
 - Labuhan Maringgai – Gunung Sugih Kecil – Jabung
 - Labuhan Maringgai – Wonoharjo – Wana – Simpang Sribawono
 - Sribawono – Taman Budaya – Pugung Raharjo – Tanjung Bintang
 - Sukadana – Nyampir – Negeri Jemanten – Gedong Wani – Pugung Raharjo – Bungbuk – Jabung – Asahan – Tanjung Sari
 - Sukadana – Nyampir – Donomulyo – Sekampung – Bumi harjo – Metro – Bandar Lampung
 - Sukadana – Rajabasa – Bumi Jawa – Pekalongan – Metro
- (3) Jalan lokal primer, jalan lokal primer ini tersebar di seluruh kabupaten. sepanjang 552,34 km atau 48,49, Onderlag sepanjang 370,72 km atau 32,55 % dan jalan tanah sepanjang 215.86 km 18.95%.

Berdasarkan tiga klasifikasi di atas, status fungsi jaringan jalan di Kabupaten Lampung Timur menunjukkan bahwa sebagian besar jalan negara dan propinsi di Kabupaten Lampung Timur merupakan jalan utama (arteri primer), dengan persentase sebesar 5,66 %. Hal ini sesuai dengan fungsinya untuk melayani pergerakan regional. Sedangkan jalan kabupaten lebih didominasi oleh jalan kolektor primer, dengan persentase sebesar 15,14%. Sementara itu, Kabupaten Lampung Timur lebih banyak menangani pembinaan jalan lokal karena sebagian besar jalan kota merupakan jalan lokal (79,16 %). Tabel 2.53, memperlihatkan panjang jalan menurut jenis permukaan jalan di Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2. 53.
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Lampung Timur

Tahun	Jenis permukaan jalan								
	Hotmix		Latasir		Lapen		Batu		Jumlah
	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)
2009	187.590	17,99	297.920	28,57	345.947	33,18	211.203	20,26	1.042.660
2008	187.590	18,01	230.997	22,18	389.175	37,36	233.828	22,45	1.041.590
2007	169.290	16,25	127.475	12,24	470.126	45,14	274.699	26,37	1.041.590
2006	148.075	14,23	70.515	6,78	520.460	50,02	301.540	28,98	1.040.590

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2010

Jumlah jalan beraspal Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan dari 73.905 Km tahun 2006 menjadi 83.146 Km tahun 2009. Di samping itu, jalan beraspal dengan kondisi baik juga meningkat dari 54,78 % tahun 2006 menjadi 70,94 % tahun 2009 (Tabel 2.54).

Tabel 2.54.
Kondisi Jalan Beraspal di Kabupaten Lampung Timur

Tahun	Kondisi Jalan Beraspal (Km)								
	Baik		Rusak ringan		Rusak sedang		Rusak berat		Jumlah
	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)
2009	58.982	70,94	2.782	3,35	10.323	12,42	11.059	13,30	83.146
2008	51.440	63,68	3.054	3,78	14.406	17,83	11.876	14,70	80.776
2007	42.013	54,78	3.469	4,52	16.105	21,00	15.102	19,69	76.689
2006	33.957	45,95	3.814	5,16	17.785	24,06	18.349	24,83	73.905

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2010

Tabel 2.55.
Jenis Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Lampung Timur

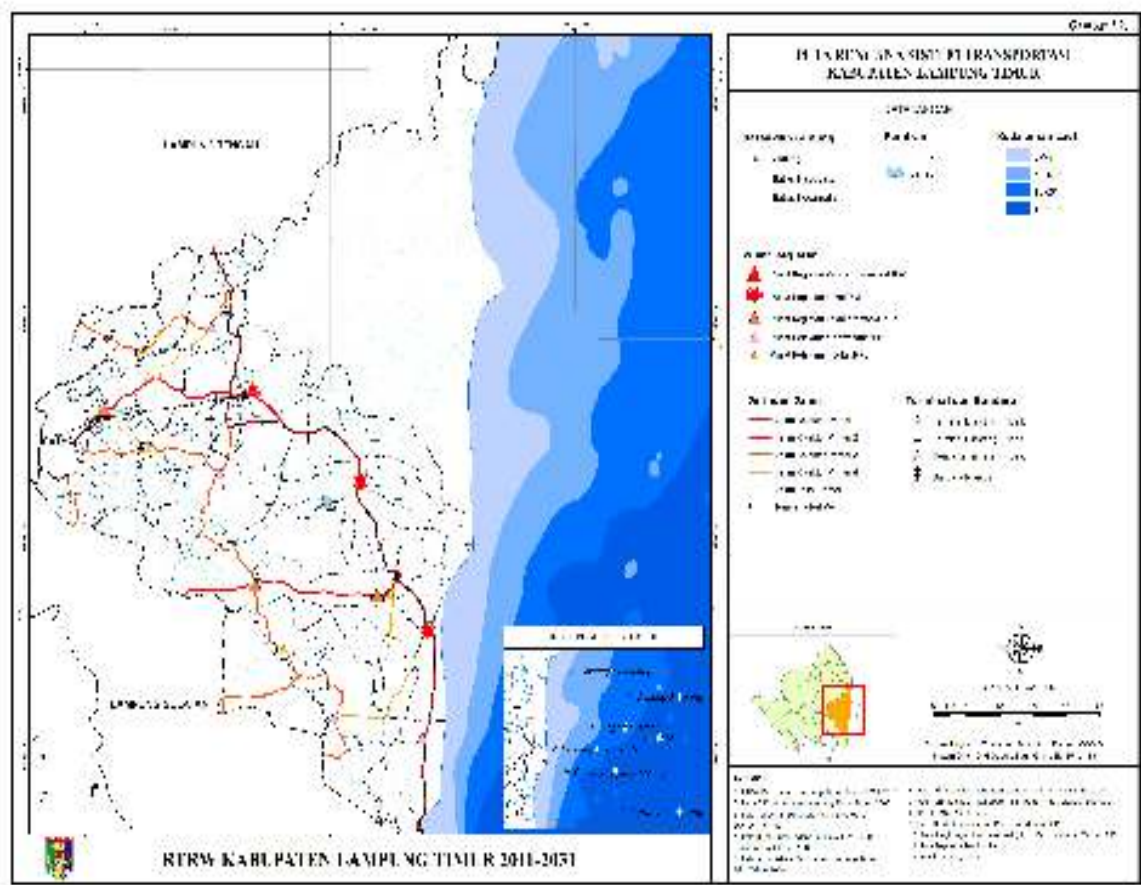
No	Jenis Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah			
		2006	2007	2008	2009
1	Terminal angkutan darat	1	1	1	1
2	Pelabuhan laut	4	4	4	4
3	Bandar Udara	-	-	-	-
4	Kendaraan angkutan umum				
	a. Bus	-	-	54	50
	b. Pick Up	-	-	1.858	1.133
	c. Truk	-	-	2.119	1.931
	d. Angkutan desa	-	-	0	85
	e. Kapal nelayan	248	-	324	326
5	Angkutan penyeberangan rakyat	3	3	3	3

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lampung Timur, 2010

Prasarana perhubungan di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari perhubungan darat dan laut. Perhubungan laut dilakukan pada empat pelabuhan tradisional yaitu Pelabuhan Laut

Labuhan Maringgai, Pelabuhan Laut Way Penet, Pelabuhan laut Kuala seputih dan Pelabuhan Laut Way Sekampung. Sampai saat ini keempat pelabuhan laut tersebut masih digunakan untuk bongkar muat ikan segar, ikan asin, es balok, dan sebagainya. Jenis sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2006 sampai 2009 dapat dilihat pada Tabel 2.55, peta sistem transportasi Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Gambar 2.12.

Gambar 2.12. Peta Sistem Transportasi Kabupaten Lampung Timur



2.4.2. Air Bersih

Sumber air bersih bagi penduduk Lampung Timur, menurut sumber air bersih yang dikonsumsi oleh penduduk ada lima, yaitu: sumur pompa, sumur gali, mata air, air sungai, dan PPAB. Sumber air yang dipergunakan adalah air bawah tanah (ABT), air tanah dalam (ATD), dan pengolahan air sungai. Penyediaan air bersih di Kabupaten Lampung Timur dikelola oleh PPAB, PT. Lampung Timur Cemerlang (PT. LTC) yang tersebar di 14 unit pengolahan dengan jumlah sambungan rumah (SR) sebanyak 3.993 SR (Tabel 2.56).

Dari Tabel 2.56 terlihat bahwa tidak semua kecamatan memiliki sistem penyediaan sumber air bersih yang memadai, apalagi jika dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang pada tahun 2009 mencapai 957.479 jiwa, maka dapat dipastikan terjadi kekurangan air bersih yang besar. Salah satu kecamatan yang sejak tahun 1960 memiliki sumber air bersih sampai saat ini tetap beroperasi dengan baik adalah Kecamatan Bandar Sri Bhawono. Pada awalnya air bersih dibangun dan dikelola oleh PT. Mitsugoro dan dibagikan kepada masyarakat. Setelah perusahaan tidak beroperasi masyarakat tetap mengelola sumber air bersih secara baik.

Tabel 2.56
 Banyaknya Air Bersih Yang Disalurkan di Kabupaten Lampung Timur (m³)

Kecamatan	2008	2009	2010
Sekampung udik	0	8.007	16.716
Labuhan maringgai	5.644	4.793	5.157
Gunung pelindung	593.452	389.743	387.467
Way jepara	-	-	3.467
Sukadana	16.425	7.449	9.242
Bandar Sri Bhawono	ada	ada	ada
Jumlah	615.521	409.992	422.049

Sumber : Lampung Timur Dalam Angka, 2011

2.4.3. Jaringan Irigasi

Sistem irigasi Kabupaten Lampung Timur terdiri dari saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Data jenis dan panjang saluran irigasi Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57.
 Data Jenis dan Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009

No.	Lokasi	Panjang Saluran (Km)		
		Primer (Km)	Sekunder (Km)	Tersier
1.	KPD Way Jepara	51.932	43.292	160.891
	a. Way Jepara	38.542	43.292	-
	b. Way Beringin	0,227	-	-
	c. Way Andak	5.964	-	-
	d. Way Negara Batin	7.199	-	-
2.	Cabang Dinas Way Curup	30.863	53.736	73.440
	a. Way Curup	23.832	53.736	-
	b. Way Batu Keting	7.031	-	-
3.	Cabang Dinas Raman Utara	28.259	22.035	146.803
	a. Raman Utara	28.259	22.035	-
4.	Cabang Dinas Sekampung	32.200	29.395	114.172
	a. Sekampung	32.200	29.395	-
5.	Cabang Dinas Purbolinggo	22.444	64.740	322.703
	a. Purbolinggo	22.444	64.740	-
6.	Cabang Dinas Rawa Keramat	19.444	61.703	332.599
	a. Rawa Keramat	19.444	61.703	-
7.	Cabang Dinas Karya Tani	30.657	91.846	202.678
	a. Karya Tani	30.657	91.846	-
8.	Cabang Dinas Rantau Fajar	-	48.660	105.046
	a. Rantau Fajar	-	48.660	-
9.	Cabang Dinas Pekalongan	12.363	12.222	70.597
	a. Pekalongan	12.363	12.222	-
10.	Cabang Dinas Batanghari	9.736	9.630	98.886
	a. Batanghari	9.736	9.630	-
	Jumlah	237.898	437.258	1.627.815

Sumber : Dinas Pengairan, 2010

2.4.4. Jaringan Telepon

Jaringan telepon belum menjangkau seluruh wilayah, namun jaringan telepon seluler sudah menjangkau ibukota kabupaten dan beberapa kecamatan. Pada pertengahan tahun 2010 diharapkan sudah ada tambahan 400 sambungan dan untuk mendukung eksploitasi potensi lokal ke kancan internasional Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bekerja sama dengan pihak swasta mendirikan jaringan multimedia yang dapat diakses melalui internet. Pola jaringan yang ada mengikuti pola jaringan jalan. Jaringan telepon yang ada masih dibawah pengawasan kantor Telkom cabang Metro. Untuk mengetahui tingkat layanan telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur dapat di lihat pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58.
Tingkat Pelayanan Sarana Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur

Pelayanan Sarana Telekomunikasi		
1	Kapasitas Tersedia	1.856,00 SST
2	Tersambung	1.856,00 SST
3	Sarana Telepon Seluler (BTS)	Ada

Sumber : [www. bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id)

2.4.5. Jaringan Listrik

Jaringan listrik yang ada di Kabupaten Lampung Timur ada dua badan pengelola, yaitu dari PLN dan KLP (Koperasi Listrik Pedesaan). Proporsi pelanggan KLP hanya 10 % yang melingkupi daerah Pekalongan, Sukadana, dan Batanghari. Untuk memenuhi kebutuhan listrik saat ini dipasok oleh pembangkit – pembangkit yang dikelola oleh PT. PLN Sektor Bandar Lampung sebesar 70 % dan sisanya dipasok oleh pembangkit listrik dari system Sumsel – Lampung sebesar 30 % dari total kebutuhan melalui sistem interkoneksi Sumsel – Lampung – Bengkulu.

Data di atas memperlihatkan bahwa daya tersambung pada konsumen semakin menunjukan kecenderungan terjadinya peningkatan dari tahun ke tahun. Jika Pemerintah Lampung Timur ingin lebih meningkatkan kinerja perekonomiannya, tentunya ketersediaan sumber energi listrik yang memadai akan menjadi prasyarat utama. Kebutuhan akan sumber energy listrik pada masa depan di Kabupaten Lampung Timur terlihat dari data jumlah KWh yang terbangkit dibandingkan dengan KWh yang terjual pada setiap bulannya.

Meskipun demikian, total daya yang tersambung relatif besar sehingga rentan terjadi kekurangan energi jika sumber energi yang ada digunakan secara maksimal. Terlepas dari hal tersebut pula, jumlah KWh yang terjual di Lampung Timur tersebut sebagian besar digunakan oleh rumah tangga, yaitu sekitar 78% dari total KWh yang terjual. Implikasinya, jika terjadi pertumbuhan jumlah rumah tangga pada masa depan, kebutuhan akan sumber energi listrik menjadi lebih besar lagi.

Penyediaan listrik di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2009 telah mampu memenuhi kebutuhan di 182 desa (>70%) dari total 257 desa, dengan jumlah pelanggan mencapai 77.556 rumah tangga. Pada tahun 2009 penyedian listrik mencapai 28.775.273

Kwh dan angka penjualan 22.287.766 Kwh, sehingga terdapat angka penyusutan sekitar 22% yang masih harus diturunkan lagi. Sebanyak 75% dari angka penjualan tersebut digunakan oleh rumah tangga

2.4.6. Jaringan Pipa Gas Negara

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah yang ikut terlewati jalur pipa transmisi dan distribusi gas Sumatra Selatan – Jawa Barat. Pembangunan jalur pipa transmisi dan distribusi gas bumi Sumatra Selatan – Jawa Barat meliputi wilayah Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), mulai dari Grisik – Pagardewa - Labuhan Maringgai – Pulau Damar Besar – Muara Tawar (Cilegon). Diharapkan dengan dilewatinya jaringan pipa gas akan meningkatkan nilai jual Kabupaten Lampung Timur di mata investor industri. Seperti diketahui salah satu fasilitas dalam pengembangan industri adalah adanya jaringan bahan bakar termasuk bahan bakar gas.

2.4.7. Jaringan Drainase

Kondisi Sistem drainase yang ada di Wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu:

- a) Kondisi Drainase dengan Saluran Alami
Sistem drainase ini berupa saluran tanah, dan saluran yang belum membentuk suatu sistem. Pada sistem ini biasanya sering terjadinya pendangkalan saluran dan penyumbatan saluran dikarenakan permukaan saluran longsor karena terkikis air. Bentuk konstruksi drainase ini terdapat hampir diseluruh wilayah kabupaten Lampung Timur.
- b) Sistem Drainase Terpadu
Sistem ini memiliki saluran drainase primer, saluran drainase sekunder, dan tersier. Dan telah dibangun dengan menggunakan konstruksi pasangan batu bata, pasangan batu kali dan pasangan beton. Sistem drainase terpadu di wilayah Sistem ini memiliki saluran drainase primer, saluran drainase sekunder, dan tersier. Dan telah dibangun dengan menggunakan konstruksi pasangan batu bata, pasangan batu kali dan pasangan beton. Sistem drainase terpadu di wilayah Perkotaan dan disepanjang jalan-jalan Utama dan permukiman yang terstruktur.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dengan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan [*policy*] dan perencanaan [*planning*] dengan penganggaran [*budget*] antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Landasan administrasi yang mengatur pengelolaan anggaran daerah antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah: (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; dan (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; (3) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Adapun perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur selama tahun 2006-2010 terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2006 - 2010

No.	Uraian	2006 (Rp)	2007 (Rp)	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	PENDAPATAN	633.519.792.938,33	707.158.779.828,86	755.523.896.869,43	778.764.081.304,85	909.016.631.212,29	9,54
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	16.137.121.299,33	23.619.732.148,86	26.645.226.534,43	18.821.941.302,85	21.885.265.876,29	8,47
1.1.1.	Pajak Daerah	4.618.118.966,00	6.270.970.008,00	7.736.862.268,92	8.225.138.283,00	10.712.600.403,61	23,84
1.1.2.	Retribusi Daerah	2.944.378.155,00	3.675.619.422,26	4.316.869.814,00	3.453.199.894,00	4.000.851.325,00	8,28
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	216.763.933,00	458.430.826,00	682.956.000,00	813.566.467,32	1.081.836.711,30	52,37
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	8.357.860.245,33	13.214.711.892,60	13.908.538.451,51	6.330.036.658,53	6.089.977.436,38	(15,04)
1.2.	Dana Perimbangan	594.042.282.639,00	648.828.412.712,00	700.351.017.535,00	714.877.084.002,00	764.614.725.727,00	6,54
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	111.972.149.337,00	100.227.412.712,00	130.017.084.535,00	100.012.191.002,00	144.600.259.727,00	8,45
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	445.966.496.668,00	487.543.000.000,00	529.485.333.000,00	537.536.893.000,00	543.770.666.000,00	5,15
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	36.103.636.634,00	61.058.000.000,00	40.848.600.000,00	77.328.000.000,00	76.243.800.000,00	20,45
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	23.340.389.000,00	34.710.634.968,00	28.527.652.800,00	45.065.056.000,00	122.516.639.609,00	59,87
1.3.1.	Hibah	0,00	10.600.000,00	12.600.000,00	14.600.000,00	0,00	8,14
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	23.340.389.000,00	22.569.652.000,00	25.299.118.000,00	30.124.406.000,00	24.389.194.000,00	1,44
1.3.4.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0,00	12.130.382.968,00	3.215.934.800,00	14.926.050.000,00	98.127.445.609,00	165,60
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : LPPA Kabupaten Lampung Timur, Tahun Anggaran 2006 - 2010

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur selama 5 (lima) tahun terakhir, dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 9,54%. Jumlah pendapatan daerah tahun 2006 sebesar Rp. 633.519.792.938,33 meningkat menjadi sebesar Rp. 909.016.631.212,29 pada tahun 2010. Rata-rata pertumbuhan dari pendapatan daerah terbesar terdapat pada sumber penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 165,60%, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 8,47% dan Dana Perimbangan sebesar 6,54%.

Jika dilihat dari proporsi komponen pendapatan daerah selama periode tersebut, maka Dana Perimbangan merupakan komponen yang memiliki pengaruh cukup besar dengan memberikan kontribusinya rata-rata sebesar 90,83% terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur, kemudian diikuti oleh penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 6,33%, dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,85%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur sangat tergantung pada Dana Transfer Pusat ke Daerah.

Pendanaan pembangunan melalui transfer ke Daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur dalam mencapai target pendapatan daerah selama periode tersebut antara lain:

- 1) Peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui upaya penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- 2) Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan pajak provinsi yang dapat diterima Kabupaten Lampung Timur, antara lain Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak.
- 3) Optimalisasi dan efektivitas pendapatan daerah dengan terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui akurasi data dan sinkronisasi usulan program/kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.
- 4) Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur setiap tahunnya sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyaluran Dana DAU maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dapat terserap sesuai dengan target penerimaan daerah.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah Kabupaten Lampung Timur selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar (11,69)%. Neraca Daerah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari komponen Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana, disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2008 - 2010

No.	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET	
1.1.	ASET LANCAR	(20,47)
1.1.1.	Kas	(28,78)
1.1.2.	Piutang	73,76
1.1.3.	Persediaan	186,18
1.2.	ASET TETAP	(13,12)
1.2.1.	Tanah	45,89
1.2.2.	Peralatan dan Mesin	(55,58)
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	17,22
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	0,53

1.2.5.	Aset tetap lainnya	(39,01)
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	(25,77)
1.2.7.	Akumulasi penyusutan aset tetap	0,00
1.3.	ASET LAINNYA	50,39
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	0,00
1.3.2.	Tuntutan Perbendaharaan	0,00
1.3.3.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0,00
1.3.4.	Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00
1.3.5.	Aset tak berwujud	0,00
1.3.6.	Aset lain-lain	50,39
1.4.	INVESTASI JANGKA PANJANG	(27,81)
1.4.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	(27,81)
	JUMLAH ASET DAERAH	(11,69)
2.	KEWAJIBAN	779,82
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	779,82
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	50,36
2.1.2.	uang muka dari kas daerah	0,00
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	0,00
2.1.4.	Utang jangka pendek lainnya	740,06
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00
3.	EKUITAS DANA	(12,67)
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	(36,25)
3.1.1.	SILPA	(29,10)
3.1.2.	Cadangan piutang	73,76
3.1.3.	Cadangan persediaan	186,18
3.1.4.	Pendapatan yang ditangguhkan	795,07
3.1.5.	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	740,06
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	(10,98)
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	(13,12)
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	50,39
3.2.3.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	(27,81)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	(11,69)

Sumber : LPPA Kabupaten Lampung Timur, Tahun Anggaran 2008 - 2010

Pencapaian target kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat dari analisis rasio keuangan tahun 2008 – 2010 seperti pada tabel 3.3. Analisis rasio keuangan bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas, serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Tabel 3.3.
Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Lampung Timur

No.	Uraian	2008 (%)/(hari)	2009 (%)/(hari)	2010 (%)/(hari)
1	Rasio Lancar (<i>current ratio</i>)	17.234,09	649,52	289,27
2	Rasio Cair (<i>quick ratio</i>)	17.054,41	638,35	265,85
3	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,05	1,09	2,23
4	Rasio Hutang terhadap Modal	0,00	1,11	2,28
5	Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset	99,95	98,91	97,77
6	Rata-rata umur piutang	2,41	3,11	4,66
7	Rata-rata umur persediaan	357,26	374,15	279,28

Sumber : LPPA Kabupaten Lampung Timur, Tahun Anggaran 2008 - 2010

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terdiri dari rasio lancar dan rasio cair. Hasil analisis Rasio Lancar Kabupaten Lampung Timur tahun 2010 sebesar 289,27%, sedangkan Rasio Cair sebesar 265,85%, capaian angka tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam menjamin pembayaran hutang yang jatuh tempo dalam jangka pendek.

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Hasil analisis Rasio Hutang terhadap Total Aset Kabupaten Lampung Timur tahun 2010 sebesar 2,23%, sedangkan Rasio Hutang terhadap Modal sebesar 2,28%. Angka rasio ini merupakan persentase jumlah dana yang berasal dari kreditur/donatur/pihak ketiga diluar pemerintahan yang dipakai untuk pembiayaan aset-aset milik pemerintah daerah. Angka rasio yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan tingkat rasio yang sangat baik. Hal ini berarti semakin sedikit dana yang berasal dari hutang untuk pembiayaan aset-aset milik pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah tidak terbebani dengan kewajiban kepada pihak ketiga yang memberatkan.

Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana di Investasikan, dan Ekuitas Dana Cadangan yang merupakan jumlah dana yang berasal dari pemerintahan yang dipakai untuk pembiayaan aset-aset milik pemerintah. Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset Kabupaten Lampung Timur tahun 2010 sebesar 97,77%. Capaian angka tersebut menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik, dimana pembiayaan aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagian besar berasal dari pemerintahan sendiri.

Rasio aktivitas terdiri dari rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Hasil analisis terhadap rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2010 sebesar 4,66 hari. Angka ini menunjukkan kemampuan berapa lama hari yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Sedangkan hasil analisis terhadap rata-rata umur persediaan Kabupaten Lampung Timur yang digunakan untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan pada tahun 2010 sebesar 279,28 hari.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lampung Timur dimaksudkan sebagai beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Untuk meningkatkan akuntabilitas serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Lampung Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir, dari tahun 2008 sampai dengan 2010 mengalami pertumbuhan rata-rata 15,16% per tahunnya, terdiri dari Belanja Tidak Langsung mengalami pertumbuhan sebesar 24,22% dan Belanja Langsung sebesar 2,35%. Pada komponen Belanja Tidak Langsung yang mengalami peningkatan pertumbuhan tertinggi adalah Belanja Hibah sebesar 286,85% dan pertumbuhan terkecil adalah Belanja Bagi Hasil sebesar (45,62)%. Sedangkan pada Belanja Langsung, rata-rata pertumbuhan yang meningkat terjadi pada Belanja Barang dan Jasa sebesar 18,83%. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Lampung Timur tahun 2008 – 2010 dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2008 – 2010

No.	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	Rata-rata Pertumbuh an (%)
A	Belanja Tidak Langsung	394.037.553.439,00	482.030.216.909,00	607.866.857.285,00	24,22
1	Belanja Pegawai	336.464.638.734,00	422.663.504.989,00	504.642.072.128,00	22,51
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	3.986.828.250,00	4.421.714.000,00	29.306.744.409,00	286,85
5	Belanja Bantuan Sosial	13.256.860.000,00	10.423.393.380,00	12.757.545.000,00	0,51
6	Belanja Bagi Hasil	599.372.455,00	73.651.540,00	71.046.750,00	(45,62)
7	Belanja Bantuan Keuangan	39.319.854.000,00	44.447.953.000,00	60.723.398.998,00	24,83
8	Belanja Tidak terduga	410.000.000,00	0,00	366.050.000,00	(10,72)
B	Belanja Langsung	301.685.069.836,10	272.007.568.972,72	311.529.104.788,00	2,35
1	Belanja Pegawai	38.376.267.918,22	27.580.834.824,00	34.743.025.317,00	(1,08)
2	Belanja Barang dan Jasa	112.415.676.129,00	163.801.851.711,72	150.611.963.927,00	18,83
3	Belanja Modal	150.893.125.788,88	80.624.882.437,00	126.174.115.544,00	4,96
	JUMLAH BELANJA	695.722.623.275,10	754.037.785.881,72	919.395.962.073,00	15,16

Sumber : LPPA Kabupaten Lampung Timur, Tahun Anggaran 2008 - 2010

Jika dilihat dari proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Lampung Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir rata-rata sebesar 61,95% (tabel 3.5). Proporsi ini merupakan perbandingan pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama satu tahun anggaran. Komponen belanja pemenuhan aparatur meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Komponen tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.5.
 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
 Kabupaten Lampung Timur

No.	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Tahun anggaran 2008	412.020.230.393,22	695.722.623.275,10	59,22
2	Tahun anggaran 2009	482.269.952.751,00	754.037.785.881,72	63,62
3	Tahun anggaran 2010	580.615.134.796,00	921.395.962.073,00	63,01

Sumber : LPPA Kabupaten Lampung Timur, Tahun Anggaran 2008 - 2010

Tabel 3.6.
 Realiasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
 Kabupaten Lampung Timur

No.	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	336.464.638.734,00	422.663.504.989,00	504.642.072.128,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	330.263.706.388,00	416.713.135.926,00	434.056.484.853,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	1.577.300.000,00	3.431.100.000,00	67.162.769.585,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.729.600.000,00	1.522.000.000,00	2.489.630.000,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	1.894.032.346,00	997.269.063,00	933.187.690,00
B	Belanja Langsung	75.555.591.659,22	59.606.447.762,00	75.973.062.668,00
1	Belanja Honorarium PNS	16.826.843.900,00	16.470.306.500,00	21.738.901.800,00
2	Belanja Uang Lembur	1.961.405.600,00	1.786.805.600,00	1.958.391.350,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.058.500.000,00	900.750.000,00	736.125.000,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	5.111.012.961,22	2.674.498.000,00	4.607.084.600,00
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	508.867.902,00	0,00	0,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	1.253.086.000,00	0,00	0,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.605.171.900,00	1.891.309.250,00	1.819.188.000,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan hari-Hari Tertentu	1.364.764.750,00	849.308.325,00	989.269.875,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	26.279.776.700,00	25.966.100.100,00	29.551.807.578,00
10	Belanja perjalanan pindah tugas	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0,00	373.050.000,00
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan, dll.)	19.586.161.946,00	9.067.369.987,00	14.199.244.465,00
	TOTAL	412.020.230.393,22	482.269.952.751,00	580.615.134.796,00

Sumber : LPPA Kabupaten Lampung Timur, Tahun Anggaran 2008 - 2010

Besarnya proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur tersebut antara lain disebabkan oleh pengeluaran belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan pegawai yang pada tahun 2010 mencapai Rp. 434.056.484.853,00 atau sebesar 47,21% dari total keseluruhan belanja Kabupaten Lampung Timur tahun 2010. Hal ini merupakan kendala yang harus dihadapi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mengalokasikan belanja pembangunan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Lampung Timur.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditempuh dalam menghadapi permasalahan pengeluaran belanja untuk pemenuhan belanja pembangunan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Lampung Timur antara lain:

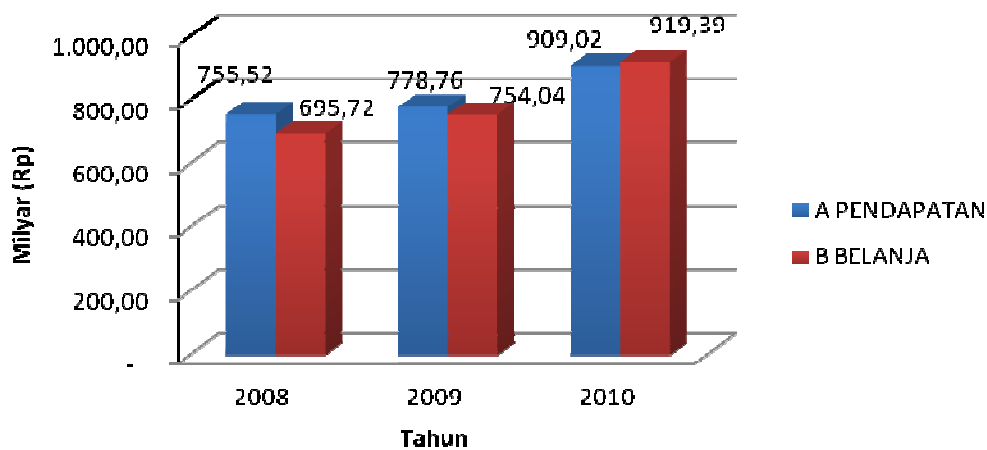
- 1) Dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lampung Timur dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
- 3) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 5) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari jumlah belanja daerah, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- 7) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan, harus dilakukan analisis beban kerja dan kewajiban biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan dengan mempedomani/mempertimbangkan Analisis Standar Belanja (ASB) dan/atau standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, untuk menghindari adanya pemborosan;
- 8) Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, diperlukan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus APBD terjadi apabila realisasi anggaran pendapatan daerah lebih besar dari anggaran belanja daerah, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila realisasi anggaran pendapatan daerah lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2008 sampai dengan 2010 menunjukkan bahwa defisit riil APBD Kabupaten Lampung Timur terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 12.379.330.860,71. Sedangkan pada tahun 2008 dan 2009 mengalami surplus penerimaan, hal ini dapat dilihat pada tabel 3.7.

Gambar 3.1. Grafik Realisasi Penerimaan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 – 2010



Tabel 3.7.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lampung Timur

No.	Uraian	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	755.523.896.869,43	778.764.081.304,85	909.016.631.212,29
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	695.722.623.275,10	754.037.785.881,72	919.395.962.073,00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Defisit riil	59.801.273.594,33	20.726.295.423,13	(12.379.330.860,71)

Sumber : LPPA Kabupaten Lampung Timur, Tahun Anggaran 2008 – 2010

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup: a). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); b). Pencairan dana cadangan; c). Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d). Penerimaan pinjaman daerah; e). Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan f). Penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup: a). Pembentukan dana cadangan; b). Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah; c). Pembayaran pokok utang; dan d). Pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Komposisi penutup defisit riil anggaran berasal dari penerimaan pembiayaan diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berdasarkan realisasi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Lampung Timur yang terjadi pada tahun 2010 sebesar Rp. 12.379.330.860,71, bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar 100% (tabel 3.8) dengan jumlah SiLPA mencapai sebesar Rp. 90.314.589.294,60.

Tabel 3.8.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Lampung Timur

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	0,00	0,00	100,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00

Sumber : LPPA Kabupaten Lampung Timur, Tahun Anggaran 2008 – 2010

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun 2010 tersebut mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lampung Timur tahun 2008 – 2010 dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.9.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Lampung Timur

No.	Uraian	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010		Rata-rata pertumbuhan
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	
1.	Jumlah SILPA	190.673.627.985,18	100,00	102.693.920.155,31	100,00	90.314.589.294,60	100,00	(29,10)
2.	Pelampauan penerimaan PAD	5.915.822.034,00	3,10	249.633.852,00	0,24	1.885.265.876,29	2,09	279,72
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	14.718.937.535,00	7,72	4.385.034.002,00	4,27	38.785.861.485,00	42,95	357,15
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	4.297.452.800,00	2,25	22.802.956.000,00	22,20	1.697.542.809,00	1,88	169,03
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	164.594.309.092,18	86,32	57.680.880.336,31	56,17	7.962.711.903,31	8,82	(75,58)
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	1.147.106.524,00	0,60	17.575.415.965,00	17,11	39.983.207.221,00	44,27	779,82
7.	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : LPPA Kabupaten Lampung Timur, Tahun Anggaran 2008 – 2010

Rata-rata pertumbuhan realisasi SiLPA Kabupaten Lampung Timur selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan penurunan sebesar 29,10%, dari jumlah SiLPA tahun 2008 sebesar Rp. 190.673.627.985,18 menurun menjadi sebesar Rp. 90.314.589.294,60 pada tahun 2010. Peningkatan rata-rata pertumbuhan yang cukup besar terjadi pada komponen pelampauan penerimaan dana perimbangan sebesar 357,15% dan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebesar 779,82%.

Kebijakan pengelolaan pembiayaan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mendukung kapasitas pendanaan pembangunan daerah, antara lain:

- (1) Menentukan target SiLPA yang dianggarkan berdasarkan kapasitas potensi nyata yang ada dan dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.
- (2) Dalam hal APBD mengalami surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan peningkatan pendanaan belanja pembangunan daerah tahun berikutnya.
- (3) Pendanaan belanja pembangunan tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- (4) Peningkatan pendanaan belanja pembangunan daerah tahun berikutnya dilakukan dengan tetap memperhatikan alokasi anggaran terhadap kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak panjang dan belanja sejenisnya.

Perkembangan Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lampung Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 25,52%. Komponen pengeluaran periodik, wajib dan mengikat tersebut terbesar berasal dari belanja tidak langsung yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan yang mengalami rata-rata pertumbuhan 15,17%, hal ini diakibatkan adanya kebijakan pemerintah dalam hal kenaikan gaji dan tunjangan pegawai setiap tahunnya. Selain itu, komponen lainnya adalah adanya Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Sertifikasi dan Non Sertifikasi) pada tahun 2010 yang pengalokasiannya sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis dan pelaksanaannya setiap tahun.

Komponen pengeluaran periodik, wajib dan mengikat yang berasal dari belanja tidak langsung adalah Belanja Jasa Kantor dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 47,71%. Besarnya angka pertumbuhan tersebut tidak hanya disebabkan adanya jenis pengeluaran baru pada belanja jasa kantor, tetapi juga disebabkan adanya kenaikan harga pada masing-masing jenis pengeluaran, seperti listrik, telepon, dan sejenisnya.

Kebijakan yang telah ditempuh dalam menekan Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lampung Timur yaitu dengan merencanakan alokasi belanja untuk pengeluaran jasa kantor dan jenis belanja lainnya harus dilakukan analisis beban kerja dan kewajaran biaya dengan mempedomani/mempertimbangkan Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Hal itu dilakukan, untuk menghindari adanya pemborosan sehingga setiap pengeluaran dapat dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis,

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaatnya.

Tabel 3.10.
Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Lampung Timur

No.	Uraian	2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	333.592.678.843,00	418.308.787.466,00	527.172.738.483,00	25,71
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	330.263.706.388,00	416.713.135.926,00	434.056.484.853,00	15,17
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.729.600.000,00	1.522.000.000,00	2.489.630.000,00	9,67
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja bagi hasil	599.372.455,00	73.651.540,00	71.046.750,00	(45,62)
5	Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Sertifikasi dan Non Sertifikasi)	0,00	0,00	90.555.576.880,00	50,00
B	Belanja Langsung	37.566.180.828,00	48.338.808.483,00	55.563.171.788,00	21,81
1	Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis	16.826.843.900,00	16.470.306.500,00	21.738.901.800,00	14,93
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.058.500.000,00	900.750.000,00	736.125.000,00	(16,59)
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon, dan sejenisnya)	15.311.824.928,00	28.745.437.883,00	30.954.044.988,00	47,71
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	2.498.736.000,00	1.674.934.600,00	1.644.022.000,00	(17,41)
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	1.870.276.000,00	547.379.500,00	490.078.000,00	(40,60)
C	Pembiayaan Pengeluaran	0,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	25,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	25,00
	TOTAL (A+B+C)	371.158.859.671,00	470.647.595.949,00	584.735.910.271,00	25,52

Sumber : LPPA Kabupaten Lampung Timur, Tahun Anggaran 2008 - 2010

3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Berdasarkan hasil analisis penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama periode tahun sebelumnya, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2011- 2015) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur seperti terlihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11.
 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
 untuk Mendanai Pembangunan Daerah
 Kabupaten Lampung Timur

No.	Uraian	Proyeksi (Rp) ^{*)}				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pendapatan	995.766.201.471,38	1.090.762.297.091,75	1.173.987.460.359,85	1.263.562.703.585,30	1.359.972.537.868,86
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sisa Lebih (riil) Perhitungan Anggaran	37.084.162.311,83	27.323.610.791,36	20.132.036.431,07	14.833.284.442,41	10.929.163.977,17
	Total penerimaan	1.032.850.363.783,21	1.118.085.907.883,10	1.194.119.496.790,92	1.278.395.988.027,72	1.370.901.701.846,03
	Dikurangi:					
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	617.540.452.003,05	652.290.902.807,59	689.112.252.718,80	728.138.348.152,17	769.512.586.686,27
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	415.309.911.780,16	465.795.005.075,51	505.007.244.072,12	550.257.639.875,55	601.389.115.159,76

Sumber : *Data diolah^{*)}*

Penerimaan Kabupaten Lampung Timur selama 5 (lima) tahun ke depan terdiri dari pendapatan, pencairan dana cadangan dan sisa lebih riil perhitungan anggaran. Jumlah pendapatan Kabupaten Lampung Timur diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 9,54% dari tahun 2010 yang mencapai Rp. 909.016.631.212,29. Proyeksi peningkatan pendapatan ini dilakukan dengan melihat dari rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

Dengan melihat perkembangan realisasi tahun-tahun sebelumnya, maka penerimaan daerah yang berasal dari pencairan dana cadangan diproyeksikan sebesar Rp. 0. Sedangkan sisa lebih riil perhitungan anggaran (SiLPA riil) diproyeksikan mengalami penurunan setiap tahunnya sebesar 26,32%. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa SiLPA riil tersebut diperoleh dari terjadinya pelampauan penerimaan PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah serta sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Selain itu, penurunan SiLPA riil ini terjadi dikarenakan kebijakan dalam menentukan target SiLPA yang dianggarkan berdasarkan kapasitas potensi nyata yang ada dan dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.

Pada pos Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama selama kurun waktu 2011 – 2015 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 5,6% dari tahun 2010. Proyeksi pada belanja ini diasumsikan mengalami kenaikan yang disebabkan oleh adanya kenaikan gaji dan tunjangan pegawai dan kenaikan harga belanja langsung, seperti jasa kantor, biaya sewa, dan jenis belanja lainnya.

Dari hasil proyeksi penerimaan daerah dan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib serta prioritas utama Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 – 2015 diatas, maka diperoleh Kapasitas Riil Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 – 2015. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut nantinya merupakan alokasi pagu indikatif yang tersedia

untuk membiayai program/kegiatan pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 – 2015. Rencana penggunaan dan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah disajikan pada tabel 3.12.

Tabel 3.12.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Timur

No.	Uraian	Proyeksi (Rp)				
		2011	2012	2013	2014	2015
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	415.309.911.780,16	465.795.005.075,51	505.007.244.072,12	550.257.639.875,55	601.389.115.159,76
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I					
II.a	Belanja langsung	392.999.563.419,51	425.431.687.949,52	454.362.468.528,95	486.429.673.444,55	521.628.097.552,42
II.b	Pembentukan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dikurangi:					
II.c	Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	60.863.898.376,58	66.670.314.281,70	73.030.662.264,17	79.997.787.444,18	87.629.576.366,35
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	2.250.000.000,00	2.531.250.000,00	2.847.656.250,00	3.203.613.281,25	3.604.064.941,41
II.e	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	329.885.665.042,94	356.230.123.667,82	378.484.150.014,77	403.228.272.719,12	430.394.456.244,66
II	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II.e)	85.424.246.737,22	109.564.881.407,69	126.523.094.057,35	147.029.367.156,43	170.994.658.915,11
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
III.a	Belanja Tidak Langsung	609.300.269.838,83	648.235.836.564,62	692.130.411.376,30	740.839.065.943,30	794.343.546.633,86
	Dikurangi:					
III.b	Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	554.426.553.626,47	583.089.338.525,89	613.233.934.204,63	644.936.947.426,75	678.278.945.378,51
III.c	Total Rencana Pengeluaran Prioritas II (III.a-III.b)	54.873.716.212,36	65.146.498.038,73	78.896.477.171,67	95.902.118.516,56	116.064.601.255,34
III	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I dan II (II-III.c)	30.550.530.524,86	44.418.383.368,97	47.626.616.885,68	51.127.248.639,87	54.930.057.659,76
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III					
IV	Total Rencana Pengeluaran Prioritas III	30.550.530.524,86	44.418.383.368,97	47.626.616.885,68	51.127.248.639,87	54.930.057.659,76
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II-III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proyeksi APBD Kabupaten Lampung Timur diasumsikan mengalami prinsip berimbang, sehingga sisi belanja daerah ditetapkan sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah. Kelompok belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan) dan belanja

langsung (belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal). Selama tahun 2011 – 2015, proporsi belanja tidak langsung diproyeksikan sebesar 61,95% dan proporsi belanja langsung sebesar 38,05% dari total penerimaan daerah setiap tahunnya. Proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung tersebut diproyeksikan dengan melihat proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Lampung Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir rata-rata sebesar 61,95%.

Jika dilihat dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia (kapasitas riil kemampuan keuangan daerah) Kabupaten Lampung Timur selama tahun 2011 – 2015, maka dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah terdiri dari prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III. Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan pada tahun rencana, termasuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan prioritas belanja yang wajib lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur. Rencana alokasi pengeluaran Prioritas I merupakan jumlah belanja langsung dikurangi belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama (Tabel 3.12).

Program prioritas II merupakan program prioritas di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II juga merupakan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan hal tersebut. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II merupakan jumlah belanja tidak langsung dikurangi oleh belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung, seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III merupakan sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I dan II, sehingga mendahulukan pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Dengan demikian, dalam mengalokasikan pagu indikatif bagi prioritas pembangunan daerah di atas, diperlukan adanya kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Lampung Timur dalam kerangka pendanaan tahun 2011 – 2015, diantaranya adalah:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut;
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah;
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah;

4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan;
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil yang diperoleh.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut 1) Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan 2011-2015 adalah :

4.1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia

- (a) Rata-rata lama sekolah baru mencapai 6,98 tahun (Propinsi Lampung 7.49 tahun).
- (b) Angka melek huruf baru 93,32 %, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Propinsi Lampung jauh tertinggal dengan menempati posisi kesepuluh (Propinsi Lampung 94,37 %).
- (c) Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lampung Timur adalah 70,22 tahun.
- (d) Masih rendahnya paritas daya beli masyarakat yaitu Rp.610.000,33; dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Lampung mencapai Rp. 617.000,42.

- (e) Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Timur.
- (f) Masih terbatasnya lapangan kerja bagi masyarakat.

4.2. Kualitas Pendidikan perlu Ditingkatkan

- (a) Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMP dan SMA masih kecil yaitu 70,9 dan 47,3.
- (b) Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 84,8% untuk tingkat SLTP/ sederajat dan 67,8% untuk tingkat SLTA/SMK sederajat.
- (c) Masih terdapat desa-desa terpencil yang akses pendidikannya masih rendah.
- (d) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas pendidikan anak usia dini.
- (e) Kualitas tenaga pendidik relatif masih rendah.
- (f) Rasio lokal/kelas dengan jumlah murid untuk SD sudah dalam kondisi ideal namun terkait dengan kualitas fisik masih terdapat beberapa sekolah yang membutuhkan penanganan.
- (g) Rasio jumlah murid dengan sekolah untuk SLTP dan SLTA belum merata.
- (h) Terbatasnya sarana penunjang pendidikan seperti laboratorium dan perpustakaan yang memadai.

4.3. Kualitas Kesehatan Masyarakat Masih Rendah

- (a) Status kesehatan penduduk perlu ditingkatkan, walaupun angka kesakitan penduduk 12,40 % dan Rata-rata lama sakit 5,5 hari.
- (b) Persentase balita yang kelahirannya ditolong tenaga kesehatan perlu ditingkatkan, baru mencapai 81,5 %.
- (c) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- (d) Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak.
- (e) Terbatasnya sumberdaya manusia utamanya dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan.
- (f) Kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan, pola hidup bersih dan sehat masih relatif rendah.
- (g) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan masih belum memadai, khususnya rumah sakit, puskesmas, pustu, dan polindes.
- (h) Masih rendahnya kesadaran penduduk dalam mengikuti program KB.
- (i) Terbatasnya perangkat dan Sistem Informasi Manajemen di bidang kesehatan masyarakat utamanya perangkat pengelolaan data-data rekam medis.

4.4. Kualitas dan Akses Masyarakat terhadap Perumahan Rendah

- (a) Kepemilikan rumah bagi rumah tangga perlu ditingkatkan, rata-rata luas lantai per keluarga 18,8 m².
- (b) Kualitas rumah masih perlu ditingkatkan (rumah tangga yang berlantai tanah masih sebesar 13,2%).
- (c) Penataan kawasan perumahan perlu disosialisasi lebih luas, sehingga perbaikan penerangan dan air bersih mudah dilakukan.

4.5. Lampung Timur Termasuk Kabupaten Tertinggal

- (a) Masih tingginya angka kemiskinan, tercermin dari tingginya kelompok rumah tangga prasejahtera dan sejahtera I masing-masing 33,46 % dan 25,37 %.
- (b) Angka tingkat pengangguran terbuka masih tinggi yaitu 7,7 %
- (c) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) baru mencapai 67.7 %.
- (d) Belum berkembangnya ekonomi kreatif di masyarakat.

- (e) Alokasi anggaran pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan masih belum mencukupi dan pemanfaatannya belum optimal.
- (f) Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya yang tersedia.
- (g) Masih tingginya animo masyarakat untuk mejadi PNS dari pada berwiraswasta.
- (h) Belum tersedianya data kemiskinan yang akurat dan *up to date* dan berkelanjutan.
- (i) Sistem informasi pasar kerja belum tertata dengan baik.

4.6. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan

4.6.1. Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura

Beberapa permasalahan dalam sub-bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura antara lain :

- (a) Rendahnya modal usaha tani, sehingga aplikasi teknologi sulit dilaksanakan
- (b) Belum berkembangnya agroindustri yang mendukung diversifikasi pangan
- (c) Cenderung semakin meningkatnya konversi lahan pertanian produktif ke non pertanian.
- (d) Masih belum optimal peran kelembagaan petani dalam menunjang berbagai program bidang pertanian.
- (e) Rendahnya kualitas SDM petani dan penyuluh terutama penguasaan teknologi sistem usaha tani yang memadai.
- (f) Terbatasnya penyediaan dan akses saprodi berupa bibit unggul, pupuk dan obat-obatan yang memadai
- (g) Belum adanya jaringan pasar lintas wilayah yang terorganisir dalam mendukung *go public* produk daerah.
- (h) Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana terutama seperti irigasi, jalan inspeksi, pelestarian sumber air di Wilayah *Chatmant Area*

4.6.2. Perkebunan & Kehutanan

Beberapa permasalahan dalam subbidang perkebunan dan kehutanan antara lain :

- (a) Keterbatasan modal pengembangan perkebunan.
- (b) Rendahnya kemampuan petani dan penyuluh dalam pengembangan industri perkebunan skala kecil, sehingga prinsip “Panen–Olah–Jual” bisa jalan.
- (c) Belum adanya jaringan pasar lintas wilayah yang terorganisir dalam mendukung *go public* produk perkebunan.
- (d) Belum terjalinnya kemitraan antara petani perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (e) Masih terbatas dan belum optimalnya penyediaan fungsi sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengembangan perkebunan.
- (f) Pemahaman petani terhadap budidaya kayu yang bernilai ekonomi masih kurang.
- (g) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hutan dalam kehidupan

4.6.3. Peternakan

Terdapat beberapa permasalahan dalam subbidang peternakan antara lain :

- (a) Rendahnya modal usaha untuk pengembangan usaha peternakan.
- (b) Rendahnya kemampuan petani dan penyuluh dalam pengembangan industri peternakan skala kecil.
- (c) Belum terjalinnya kemitraan antara peternak sebagai plasma dan industri/perusahaan sebagai inti dalam pengembangan peternakan

- (d) Ketersediaan bibit unggul ternak tidak tersedia secara kontinyu dengan harga wajar.
- (e) Belum maksimalnya teknik penanganan penyakit ternak dan budidaya pakan ternak untuk disebarluaskan kepada masyarakat guna menciptakan iklim peternakan yang baik.

4.6.4. Perikanan dan Kelautan

Terdapat beberapa permasalahan dalam bidang perikanan dan kelautan antara lain :

- (a) Rendahnya modal usaha untuk pengembangan usaha peternakan perikanan.
- (b) Kurang berkembangnya industri perikanan yang menghasilkan produk *icon* daerah.
- (c) Rendahnya kemampuan petambak dalam budidaya udang, terutama dalam pengendalian hama dan penyakit udang.
- (d) Belum terjalinnya kemitraan antara petani ikan/nelayan sebagai plasma dan industri/perusahaan sebagai inti dalam pengembangan perikanan.
- (e) Terbatasnya sarana dan prasarana terutama peralatan tangkap/kapal KM 20-30 GT, tempat penampungan, dan distribusi produksi perikanan laut.
- (f) Pengelolaan potensi sumberdaya kelautan yang masih dilaksanakan secara tradisional dan tidak ramah lingkungan.
- (g) Belum adanya jaringan pasar lintas wilayah yang terorganisir dalam mendukung pemasaran produk perikanan.

4.7. Pariwisata dan Budaya

- (a) Rendahnya kualitas SDM yang menangani kepariwisataan, sehingga produk-produk wisatanya kurang inovatif dan beragam.
- (b) Rendahnya kualitas jalan-jalan akses yang menuju objek-objek wisata dan objek-objek wisata yang ada tidak berkembang.
- (c) Daya dukung wisata masih terbatas, terutama hotel, restoran, cinderamata, produk khas daerah.
- (d) Belum adanya kerjasama antar daerah dalam pengelolaan kepariwisataan.
- (e) Adanya disorientasi dan melemahnya identitas sosial budaya masyarakat Lampung Timur akibat dampak globalisasi.
- (f) Cenderung semakin menurunnya kecintaan terhadap kesenian dan kebudayaan lokal.

4.8. Pertambangan

- (a) Rendahnya kualitas SDM dalam pengembangan produk dari pertambangan (Pasir Kuarsa, Batu Basal, Pasir Bangunan, Tanah lempung).
- (b) Belum tersedianya peralatan, teknologi, dan investasi awal dalam pengembangan produk dari pertambangan.
- (c) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang sistem eksploitasi sumber daya tambang yang ramah lingkungan.
- (d) Masih terbatasnya investor di bidang pertambangan.

4.9. Kurang Optimalnya Pengembangan UMKM

- (a) UMKM belum memanfaatkan Pola CSR/PKBL secara optimum.
- (b) Belum berkembangnya produk-produk UKM yang menampilkan kearifan lokal dan menjadi identitas daerah.
- (c) Manajemen koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya belum dilakukan pengelolaan secara profesional.

- (d) Kelompok usaha ekonomi produktif pada tingkat desa belum secara optimal memanfaatkan koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya.
- (e) Koperasi dan lembaga keuangan mikro lainnya masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah dalam memperkuat struktur permodalannya.

4.10. Rendahnya Investasi Masyarakat dalam Pembangunan

- (a) Belum kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Lampung Timur.
- (b) Masih kurang optimalnya fungsi media promosi dalam promosi investasi.
- (c) Masih belum komunikatif dan *up to date* nya data potensi real invetasi di Kabupaten Lampung Timur.
- (d) Belum tersedianya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Timur.
- (e) Masih terbatasnya lapangan kerja bagi masyarakat.
- (f) Sulitnya aksesibilitas UMKM pada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

4.11. Industri dan Perdagangan

- (a) Belum tersedianya kawasan khusus industri yang memudahkan investor untuk berinvestasi.
- (b) Fasilitas penunjang industri belum mendukung pengembangan industri, seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan pelabuhan.
- (c) Industri yang berkembang masih industri yang beroperasi pada industri hulu.
- (d) Iklim pengembangan industri dan perdagangan belum kondusif.
- (e) Belum tersedia media komunikasi yang aktif dan kontinyu mempromosikan potensi komoditi perdagangan Kabupaten Lampung Timur.
- (f) Munculnya waralaba berskala nasional yang berpotensi mengancam eksistensi pedagang lokal.

4.12. Terbatasnya Infrastruktur Penunjang

- (a) Masih terdapat wilayah-wilayah potensial yang terisolir disebabkan karena belum dibukanya jalan baru maupun kondisi jalan/jembatan yang ada dalam kondisi rusak bahkan rusak berat.
- (b) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan laut.
- (c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang benar dan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- (d) Ketersediaan infrastruktur irigasi masih belum memadai terutama jaringan irigasi sekunder dan tersier.
- (e) Kurang tersedianya dana pembangunan bendungan baru bahkan bendungan yang lama tidak terawat dan kurang optimal.
- (f) Masih terdapatnya beberapa desa terpencil yang belum dijangkau oleh aliran listrik.
- (g) Ketersediaan air bersih masih belum mencukupi kebutuhan penduduk.

4.13. Menurunnya Kualitas Lingkungan

- (a) Rendahnya penegakkan hukum bagi para perusak lingkungan.
- (b) Bertambah luasnya lahan kritis dan praktek *illegal logging* serta perladangan liar yang eskalasinya terus meningkat setiap tahun,
- (c) Upaya-upaya pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis dan kerusakan hutan belum dilaksanakan secara terintegrasi.

- (d) Rendahnya kesadaran masyarakat dan dalam ikut menjaga kelestarian sumber daya hutan.
- (e) Terbatasnya peraturan daerah mengenai pengelolaan sumber daya hutan.
- (f) Belum tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- (g) Belum optimalnya pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam dalam pembangunan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan. Visi juga merupakan kondisi ideal yang menjadi tujuan atau keinginan yang telah disepakati untuk diwujudkan oleh seluruh *stakeholders* dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stakeholders* agar dapat turut berperan aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh *stakeholders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Masyarakat Kabupaten Lampung Timur berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan yang telah disusun dapat digunakan sebagai inspirasi, peta jalan atau langkah strategis, pengumpulan energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas diri masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif.

Visi pembangunan yang telah disusun merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh seluruh *stakeholders* sampai tahun 2015. Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi Kabupaten Lampung Timur menjadi visi bersama (*shared vision*). Berdasarkan potensi wilayah, tantangan yang dihadapi sampai tahun 2015, serta mengacu pada Visi Provinsi Lampung 2011-2025 dan Visi Nasional Tahun 2011-2025; maka Visi Kabupaten Lampung Timur 2011-2015 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS”.

Dari visi tersebut memiliki lima kata kunci, yaitu agraris, maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis.

(1) Daerah Agribisnis,

Kabupaten Lampung Timur sebagai daerah agribisnis, kata agribisnis mengandung arti “agri” atau pertanian dan bisnis yang berarti perdagangan. Dalam hal ini diharapkan mayoritas kehidupan masyarakat Kabupaten Lampung Timur ditopang oleh kegiatan perdagangan pertanian, pertanian yang maju, kebijakan pemerintah yang berkomitmen untuk memajukan pertanian. Ekonomi kerakyatan merupakan muara dari pengembangan daerah agribisnis yang maju dan berkesinambungan. Menurut Gumbira Sa’id (2004), pertanian mencakup pertanian tanaman pangan dan hortikultura, pertanian tanaman perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Bahkan kegiatan pertanian mencakup kegiatan pra produksi, pasca produksi, agroindustri, dan kegiatan industri pendukungnya. Kabupaten agribisnis juga tercermin dari kontribusi PDRB sektor pertanian dari tahun ke tahun yang rata-rata lebih dari 38%/tahun.

Ada beberapa persyaratan pokok untuk menjadi daerah agribisnis yang modern, yaitu (1) Pertanian harus didukung oleh sistem budidaya pertanian yang handal dan efisien, sehingga menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi, jumlah yang cukup dan kontinyu sepanjang tahun serta kompetitif; (2) Sistem tataniaga sarana produksi pertanian yang efisien; (3) Penggunaan teknologi pertanian yang tepat pada skala usaha yang ekonomis; (4) Sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi untuk memajukan dunia pertanian; (5) Industri pengolahan pertanian (Agroindustri) harus berkembang dengan berbahan baku lokal.

(2) Maju

Kabupaten Lampung Timur yang maju ditandai dengan adanya kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan lahir dan batin. Aspek lahiriah, peningkatan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Aspek batiniah ditandai dengan meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan pembangunan daerah, semakin mantapnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat, serta meningkatnya ketahanan sosial budaya. Kedua kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan *Crime Index*. Reaksi-reaksi sosial kemasyarakatan perlu ditanggapi dan dijadikan sebagai salah satu perwujudan rasa keadilan masyarakat. Pengukurannya dapat digunakan indikator seperti: tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal usaha produktif bagi masyarakat;

(3) Mandiri

Kabupaten Lampung Timur yang mandiri ditandai dengan peningkatan kapasitas penalaran dan fisik manusia yang diukur berdasarkan perubahan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*), yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah terhadap penerimaan yang berasal dari pemerintah Propinsi dan Pusat;

(4) Sejahtera

Sejahtera mempunyai konotasi *wealthy* atau *prosperous*. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang makmur dilihat dari perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan dan *civilization* (politik dan hukum) yang maju dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Kesejahteraan masyarakat umumnya ditandai dengan : jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan dan angka harapan hidup tinggi, serta memiliki kualitas pelayanan social baik.

Masyarakat sejahtera terjamin haknya dan memiliki kesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan sosial, memiliki kesetaraan gender, serta terlayani kebutuhan dasar yang

lain. Masyarakat memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga.

Kemakmuran akan terjadi ketika keswasembadaan atau kemandirian dalam berbagai kebutuhan kehidupan dan pembangunan tercapai. Swasembada pangan, pertanian non pangan, energi, dan produk teknologi mengurangi ketergantungan terhadap sumber dari luar negeri. Keswasembadaan dapat dicapai sejatinya dengan memanfaatkan keunggulan secara optimal. Swasembada harus menjadi fokus perhatian untuk mengurangi ketergantungan dan kerawanan serta menciptakan daya, tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Selain swasembada, kemakmuran akan terwujud ditentukan oleh kepastian hukum, etika politik luhur yang menjunjung tinggi budaya demokrasi, ketentraman dan ketertiban, budaya kerja keras masyarakat. Perekonomian di Lampung Timur didukung oleh sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor basis ekonomi yang merupakan sektor ekonomi unggulan di Lampung Timur adalah sektor pertanian, industri dan perdagangan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Tingkat pendidikan rata-rata tinggi dan merata, yang tercermin dari tingkat partisipasi pendidikan, tingkat pendidikan terendah, dan jumlah tenaga ahli atau profesional yang dihasilkan. Tingkat kesehatan tinggi dan merata dilihat dari derajat kesehatan dan angka harapan hidup tinggi.

(5) **Demokratis**

Masyarakat Lampung Timur yang demokratis adalah masyarakat yang *civilized*, yang memiliki hak dan kewajiban untuk dipilih dan untuk memilih, yang memiliki sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap, serta berkehidupan demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, menggunakan hak politik, kesamaan di depan hukum, bebas berpendapat, beretika, disiplin, tertib, dan menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM).

5.2. Misi

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lampung Timur dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- 2) Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan berbasis keunggulan kompetitif
- 3) Mendorong berkembangnya industri melalui optimasi potensi lokal, dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif berkesinambungan
- 4) Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih
- 5) Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis
- 6) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang daerah menuju pembangunan berkelanjutan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

(1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kualitas hidup masyarakat didefinisikan terpenuhinya kebutuhan hidup pokok manusia terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan penduduk. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur diharapkan memberi dampak yang positif terhadap kualitas hidup masyarakat. Untuk itu pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan mutlak diperlukan, yang salah satunya dengan menggunakan indikator pembangunan manusia.

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index* (HDI) merupakan suatu ukuran yang memuat tiga aspek, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Menurut UNDP IPM atau HDI dapat menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu wilayah melalui pengukuran keadaan penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketrampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak.

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya rata-rata lama sekolah, menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, meningkatnya angka harapan hidup masyarakat, dan meningkatnya daya beli masyarakat.

(2) Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan berbasis keunggulan kompetitif.

Struktur perekonomian yang kokoh adalah struktur ekonomi yang bertumpu pada sumberdaya lokal dan diolah menjadi suatu produk untuk menghasilkan nilai tambah. Semakin tinggi teknologi yang digunakan umumnya akan menghasilkan nilai tambah yang tinggi juga dan berkorelasi positif terhadap daya saing dan keunggulan kompetitif.

Dayasaing menggambarkan kemampuan bersaing masa lalu, masa kini, dan dapat diproyeksikan ke masa depan. Daya saing bersifat dinamis dan akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu bergantung pada tingkat kompetisi, perubahan perilaku permintaan, dan kemampuan dasar industri. Daya saing produk dicapai melalui konversi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dengan penerapan teknologi, pengelolaan dan pengembangan pasar dari produk tersebut terhadap jenis produk yang sama. Keunggulan kompetitif ini berkaitan dengan upaya peningkatan nilai tambah yang membentuk daya saing. Banyak faktor mempengaruhi daya saing produk.

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk-produk yang dihasilkan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur.

(3) Mendorong berkembangnya industri melalui optimasi potensi lokal, dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif berkesinambungan.

Maksud dari misi ini adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkeinginan untuk mengembangkan (meningkatkan jumlah dan produktivitas) industri dengan memanfaatkan bahan baku yang bersumber dari Kabupaten Lampung Timur sendiri. Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Lampung Timur memiliki bahan baku industri yang sangat potensial seperti hasil perikanan, hasil peternakan, hasil perkebunan, hasil pertanian tanaman pangan, hasil kehutanan, bahan tambang, dan wisata berbasis alam. Dari ketersediaan bahan baku terlihat bahwa industri yang berpotensi di Kabupaten Lampung Timur adalah agroindustri (industri pertanian), yaitu suatu industri yang mengolah hasil pertanian menjadi produk jadi atau produk setengah jadi.

Dari misi ini juga mengamankan penciptaan iklim investasi yang kondusif dari waktu ke waktu di Kabupaten Lampung Timur. Iklim yang kondusif di suatu wilayah ditandai dengan keamanan dan ketertiban yang mantap, pengurusan perizinan usaha cepat, serta adanya dukungan pemerintah dan masyarakat kepada dunia usaha, sehingga produktivitas usaha dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu.

(4) Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Misi ini mengamankan peningkatan pelayanan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada masyarakatnya harus baik dan bersih. Pemerintahan yang baik adalah pelayanan pemerintah yang lebih menekankan pada upaya pembenahan sistem pelayanan yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sedangkan konsep pemerintahan yang bersih adalah upaya supaya tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Pada pembangunan lima tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akuntabel, mendengar aspirasi masyarakat, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi ideal tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih ditunjukkan oleh (1) Meningkatnya profesionalisme aparatur dan efisiensi birokrasi dalam kerangka reformasi birokrasi yang makin mantap, (2) Terwujudnya kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif, (3) Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah, dan (4) Meningkatkan aksesibilitas, transparansi, pengawasan masyarakat dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah.

(5) Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang agamis, berbudaya, dan demokratis.

Masyarakat yang agamis artinya tata kehidupan sosial yang makin dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai keyakinan masyarakat yang diakui dalam sistem keagamaan nasional. Kondisi ideal kehidupan agamis ditunjukkan dari: (1) Meningkatnya jatidiri dan karakter masyarakat yang makin beriman dan bertakwa dalam keragaman keyakinan beragama dan beribadat yang dijamin kelangsungannya oleh pemerintah, (2) Menguatnya kemitraan dan tanggungjawab dalam pembangunan pendidikan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan di daerah, dan (3) Menguatnya kesalehan sosial masyarakat dan aparatur pemerintah serta memperkuat silaturahmi antar dan inter umat beragama untuk menguatkan pengamalan agama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masyarakat yang berbudaya dan demokratis ditandai dengan kondisi lingkungan kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat yang makin dijiwai oleh supremasi dan kesadaran hukum, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik, partisipasi masyarakat berlandaskan kesetaraan gender yang makin dewasa dalam proses penetapan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pewarisan nilai-nilai kejuangan bangsa dan kearifan lokal masyarakat.

Kondisi ideal kehidupan berbudaya dan demokratis ditunjukkan dari (1) Terwujudnya penyelenggaraan akuntabilitas Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan yang proporsional, (2) Meningkatnya aksesibilitas, transparansi, pengawasan masyarakat dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah, (3) Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang makin efisien dan efektif serta peningkatan pelayanan prima pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, (4) Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat yang lebih baik, dan (5) Meningkatnya kecintaan terhadap seni dan budaya lokal.

(6) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang daerah menuju pembangunan berkelanjutan.

Maksud dari misi ini adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam membangun sarana dan prasarana wilayah harus tetap mentaati tata ruang daerah yang serasi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pada pembangunan lima tahun kedepan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berkomitmen untuk memperbaiki dan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah, pengelolaan sampah dan penataan tata ruang untuk perbaikan kualitas lingkungan, pemanfaatan IT, listrik, air bersih, dan RTBL bagi masyarakat, pengendalian kerusakakan lingkungan, dan perbaikan perumahan tidak layak huni dan pengelolaan TPU.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai keenam misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur tahun 2011 – 2015, maka dirumuskan tujuan dan sasaran masing-masing misi pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lampung Timur

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS		
Misi	Tujuan	Sasaran
<u>Misi 1:</u> Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas dan menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas
		2. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tiap jenjang pendidikan
	2. Peningkatan aksesibilitas kesehatan yang berkualitas	1. Meningkatnya angka harapan hidup masyarakat
		2. Meningkatnya infrastruktur dan manajemen kesehatan dasar bagi masyarakat
	3. Peningkatan kualitas dan kuantitas KB & kependudukan	Meningkatnya kualitas keluarga berencana & kependudukan
	4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja
	5. Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga	Meningkatnya kualitas pemuda dan kuantitas sarana dan prasarana masyarakat
	6. Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa	Meningkatnya fasilitas dan kualitas hidup masyarakat desa
<u>Misi 2:</u> Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan berbasis keunggulan kompetitif	1. Penguatan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi didukung oleh pembangunan pertanian dan infrastuktur yang memadai	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan
		2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perikanan & Kelautan
		3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Peternakan
		4. Meningkatnya kapasitas Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS		
Misi	Tujuan	Sasaran
	2. Penguatan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi didukung oleh Koperasi & UKM	1. Meningkatnya pertumbuhan & kualitas koperasi 2. Meningkatnya tingkat pencapaian swasembada bahan pokok pangan
	3. Penguatan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi didukung oleh pembangunan pariwisata	Meningkatnya jumlah dan lama tinggal kunjungan pariwisata
	4. Penguatan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi didukung oleh sektor perdagangan	Meningkatnya usaha perdagangan dan daya saing ekonomi lokal
	5. Penguatan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi didukung oleh sumberdaya hasil pertambangan	Meningkatnya usaha pertambangan yang terkendali
<u>Misi 3:</u> Mendorong berkembangnya industri melalui optimasi potensi lokal, dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif berkesinambungan	1. Peningkatan iklim investasi yang kondusif berkesinambungan	1. Berkembangnya ekspor komoditas non migas melalui kerjasama investasi 2. Berkembangnya keamanan dan ketertiban dalam menunjang aktivitas dunia usaha
	2. Peningkatan industri pertanian (Agroindustri) yang berbahan baku potensi lokal	Berkembangnya agroindustri unggulan yang kondusif berkesinambungan
<u>Misi 4:</u> Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Pengembangan tata pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya layanan dan kualitas kebijakan pemerintah daerah
	2. Pengembangan tata pemerintahan yang demokratis dan aman	1. Berkembangnya infra dan supra struktur politik
		2. Meningkatnya rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan
		3. Berkembangnya situasi dan kondisi daerah yang tertib dan aman

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS		
Misi	Tujuan	Sasaran
	3. Pengembangan tata pemerintahan yang tertib dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan, manajemen aset, keuangan dan kepegawaian
	4. Pengembangan tata pemerintahan berbasis IT	Tertatanya data dan informasi berbasis IT
	5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengamanan lingkungan
<u>Misi 5:</u> Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis	1. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang peduli terhadap masalah sosial dan hak-hak perempuan dan anak	1. Meningkatkan kemampuan lembaga kesejahteraan sosial dalam menangani rehabilitasi PMKS, Anak Jalanan, Anak Terlantar dan Anak berkebutuhan khusus
		2. Terlindunginya hak-hak perempuan dan anak dalam kebijakan pembangunan
	2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dlm manajemen mitigasi bencana	Meningkatnya manajemen mitigasi bencana
		1. Peningkatan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal
		2. Menurunnya penyebaran narkoba, serta obat-obatan terlarang
		3. Terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif
<u>Misi 6:</u> Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang daerah menuju pembangunan	1. Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal	Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi
	2. Perbaikan pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan	1. Membaiknya pengelolaan sampah
		2. Pengendalian jumlah ruang terbuka hijau di publik area dan private area
	3. Peningkatan manfaat listrik dan air bersih bagi masyarakat	1. Tersedianya sumber-sumber air baku
		2. Meningkatnya cakupan layanan listrik di perdesaan

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS		
Misi	Tujuan	Sasaran
berkelanjutan	4. Pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah	Tersedianya panduan tata ruang yang memadai
	5. Pengendalian kerusakakan lingkungan akibat pembangunan	1. Terkendalinya kerusakakan lingkungan akibat pembangunan
		2. Berfungsinya system jaringan drainase dan pengendalian banjir
	6. Perbaikan perumahan tidak layak huni dan pengelolaan TPU	1. Berkurangnya perumahan tidak layak huni
		2. Meningkatnya manajemen pengelola TPU

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pembangunan sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan untuk mengelola sumberdaya ekonomi daerah secara berdaya guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram, dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat dan martabat. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya yang memberikan kesempatan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Upaya untuk melaksanakan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat, dimana ketiganya mempunyai peran masing-masing. Dalam hal ini harus terjadi sinkronisasi dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan yang berbeda. Dunia usaha swasta mempunyai peran dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam menciptakan interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga unsur tersebut memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata pemerintahan yang baik.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Timur lima tahun ke depan (2011-2015) yaitu "Terwujudnya Kabupaten Lampung Timur sebagai Daerah Agribisnis yang didukung oleh Masyarakat yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Demokratis", terdapat 6 (enam) Misi yang akan ditempuh antara lain : (1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; (2) Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan berbasis keunggulan kompetitif; (3) Mendorong berkembangnya industri melalui optimalisasi potensi lokal, dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berkesinambungan; (4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih; (5) Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis; dan (6) meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang daerah menuju pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur 2011-2015 dimana merupakan Tahapan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Timur 2006-2026, maka strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD
Kabupaten Lampung Timur

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas dan menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas	Pengembangan sekolah murah	1. Subsidi satuan pendidikan sampai dengan pendidikan menengah
			2. Fasilitasi kegiatan PKBM, lembaga pendidikan ketrampilan, dan pendidikan anak usia dini
			3. Fasilitasi pendidikan nonformal
	2. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tiap jenjang pendidikan	Pengembangan kualitas layanan pendidikan	1. Pengembangan manajemen berbasis sekolah (MBS)
			2. Peningkatan kualitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
2. Peningkatan aksesibilitas kesehatan yang berkualitas	1. Meningkatnya angka harapan hidup masyarakat	1. Peningkatan akses dan cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	1. Peningkatan kualitas layanan puskesmas dan rumah sakit
		2. Pengurangan resiko terjadinya penyakit dan peningkatan layanan balita & lansia	2. Rintisan jaminan kesehatan seluruh masyarakat (<i>Universal Coverage</i>).
			1. Pengembangan paradigma hidup sehat,
			2. Fasilitasi dan pemberdayaan gizi masyarakat;
			3. Pengembangan posyandu anak balita;
			4. Pengembangan pelayanan kesehatan lansia;

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya infrastruktur dan manajemen kesehatan dasar bagi masyarakat	1. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dan manajemen kesehatan	1. Menyediakan sarana prasarana dan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas kesehatan;
			2. Fasilitasi pengawasan obat dan makanan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat
			3. Mengembangkan sistem penataan peraturan perundang-undangan
		2. Promosi pelayanan dan pendidikan kesehatan masyarakat	1. Pengembangan upaya kesehatan promotif 2. Fasilitasi standarisasi pelayanan kesehatan
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas KB & kependudukan	Meningkatnya kualitas keluarga berencana & kependudukan	1. Pengembangan dan peningkatan penyediaan pelayanan Keluarga Berencana	1. Fasilitasi pelayanan keselamatan ibu melahirkan dan anak
			2. Fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana
			3. Fasilitasi promosi kesehatan melalui kelompok kegiatan di masyarakat
			4. Peningkatan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
			5. Fasilitasi pengembangan model operasional BKP-Posyandu-Padu
			6. Penguatan jejaring operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat
			7. Fasilitasi dan pengembangan kesadaran masyarakat;
		2. Peningkatan manajemen administrasi kependudukan	1. Fasilitasi sarana prasana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); 2. Peningkatan penataan peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan.

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1. Fasilitasi pengembangan calon tenaga kerja yang berkualitas dan produktif
			2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penguatan lembaga/serikat perburuhan.
5. Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga	Meningkatnya kualitas pemuda dan kuantitas sarana dan prasarana masyarakat	1. Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan;
			2. Fasilitasi peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
		2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga	Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan internasional (<i>sport centre</i>).
		3. Pemasyarakatan olahraga	Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat;
6. Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa	Meningkatnya fasilitas dan kualitas hidup masyarakat desa	Peningkatan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	4. Pembinaan atlit dan pelaku olahraga
			Penguatan organisasi dan manajemen pengelolaan olahraga;
			1. Fasilitasi peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
			2. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
			3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
			4. Pemberdayaan perempuan pedesaan
			5. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
			6. Pengendalian administrasi kegiatan pembangunan
			7. Peningkatan tata tertib administrasi dan kinerja pemerintah daerah
			8. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS			
Misi 2 : <i>Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan berbasis keunggulan kompetitif</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Penguatan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi didukung oleh pembangunan pertanian dan infrastruktur yang memadai	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian tanaman pangan, hortikultura	1. Pengembangan produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan;
			2. Pengembangan dan penerapan teknologi pertanian;
			3. Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian/agroindustri;
			4. Pengembangan pemasaran pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan;
		2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perkebunan & kehutanan	1. Pengembangan produksi perkebunan dan kehutanan unggulan;
			2. Pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan dan kehutanan;
			3. Pengembangan pemasaran produk perkebunan dan kehutanan;
			4. Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan;
		3. Penguatan pertanian dan hutan lestari	1. Fasilitasi rehabilitasi hutan lestari;
			2. Pemanfaatan potensi sumberdaya kehutanan dan konservasi lingkungan;
			3. Pembinaan, perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan;
			4. Perencanaan dan pengembangan hutan;
		4. Pemberdayaan petani miskin	1. Pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
			2. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani;
	2. Meningkatnya pertumbuhan	1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat	1. Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat pesisir

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS			
Misi 2 : <i>Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan berbasis keunggulan kompetitif</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	ekonomi sektor perikanan & kelautan	pesisir	2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan & pengendalian sumberdaya kelautan
		2. Peningkatan produksi & pemasaran hasil kelautan dan perikanan	1. Peningkatan sarana dan penegakan hukum dalam pemberdayaan sumberdaya laut;
			2. Pengembangan bibit Ikan unggul dan kolam rakyat;
			3. Pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok, fasilitasi pembinaan perikanan tangkap;
			4. Pengembangan kawasan budidaya laut air payau dan tawar
			5. Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan/ pemasaran hasil olahan ikan
	3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Peternakan	Peningkatan produksi hasil peternakan	1. Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok peternak
			2. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
			3. Pengembangan bibit ternak unggul;
			4. Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan/ pemasaran, pengendalian mutu hasil olahan
			5. Peningkatan fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan
	4. Meningkatnya kapasitas Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.	Penguatan kelembagaan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.	1. Fasilitasi peningkatan kesejahteraan petani
			2. Peningkatan kualitas pemasaran hasil produksi
			3. Peningkatan penguasaan teknologi
			4. Pemberdayaan kelembagaan
			5. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS			
Misi 2 : <i>Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan berbasis keunggulan kompetitif</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			6. Peningkatan kapasitas budidaya perikanan
2. Penguatan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi didukung oleh Koperasi & UKM	1. Meningkatnya pertumbuhan & kualitas Koperasi	1. Pengembangan kelembagaan koperasi	Penerapan manajemen modern pada koperasi;
		2. Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan UMKM	1. Fasilitasi permodalan koperasidan UMKM;
		3. Pengembangan kualitas SDM koperasi	2. Peningkatan akses permodalan masyarakat miskin
	2. Meningkatnya tingkat pencapaian swasembada bahan pokok pangan	Pengembangan ketahanan, kemandirian, mutu dan keamanan pangan	Pengembangan SDM Kader dan Pengurus Koperasi
3. Penguatan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi didukung oleh pembangunan pariwisata	Meningkatnya jumlah dan lama tinggal kunjungan pariwisata	1. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Peningkatan ketahanan pangan petanian/ perkebunan
		2. Pengembangan kualitas obyek dan event-event pariwisata	Fasilitasi forum kerjasama dan komunikasi pemasaran pariwisata;
4. Penguatan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi didukung oleh sektor perdagangan	Meningkatnya usaha perdagangan dan daya saing ekonomi lokal	Pengembangan pola perpasaran tradisional dan modern	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
			1. Revitalisasi pasar-pasar tradisional;
			2. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
			3. Penataan PKL secara humanis dan beradab serta peningkatan keamanan dan ketertiban pasar
5. Penguatan perekonomian daerah	Meningkatnya usaha pertambangan yang terkendali	Peningkatan usaha pertambangan yang terkendali	4. Fasilitasi pengembangan data dan informasi
			1. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
			2. Peningkatan penataan pemahaman perundang-undangan di

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS			
Misi 2 : <i>Membangun struktur perekonomian yang kokoh dengan berbasis keunggulan kompetitif</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
yang berdaya saing tinggi didukung oleh sumberdaya hasil pertambangan			bidang pertambangan

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS			
--	--	--	--

Misi 3 : Mendorong berkembangnya industri melalui optimasi potensi lokal dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif berkesinambungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Peningkatan iklim investasi yang kondusif berkesinambungan	1. Berkembangnya ekspor komoditas non migas melalui kerjasama investasi	1. Pengembangan ekspor komoditas non migas	1. Perluasan cakupan kerjasama perdagangan
			2. Pengembangan iklim investasi yang kondusif dari segi permodalan, infrastruktur, kelembagaan
			3. Pengembangan pranata investasi
			4. Pengembangan pranata pelayanan perizinan investasi
	2. Berkembangnya keamanan dan ketertiban dalam menunjang aktivitas dunia usaha	2. Pengembangan kerjasama investasi yang strategis	1. Fasilitasi kerjasama optimalisasi aset daerah
			2. Pengembangan promosi dan kerjasama investasi daerah
2. Peningkatan industri pertanian (Agroindustri) yang berbahan baku potensi lokal	Berkembangnya agroindustri unggulan yang kondusif berkesinambungan	Pengembangan keamanan dan ketertiban dalam menunjang aktivitas dunia usaha dan investasi	3. Peningkatan kerjasama dalam penyusunan rencana program tahunan;
			1. Peningkatan cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
			2. Peningkatan kualitas SDM dalam masyarakat sekitar perusahaan
			3. Pengembangan sistem rantai pasok antara perusahaan dengan UKM dan masyarakat
			1. Pengembangan potensi agroindustri berbahan baku lokal;
			2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi berbasis teknologi.
		1. Pengembangan produk agroindustri unggulan	3. Peningkatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
			4. Percepatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan
		2. Penataan pertanahan untuk mendukung iklim investasi	

Visi	: TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS
Misi 4	: Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Pengembangan tata pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya layanan dan kualitas kebijakan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah	1. Fasilitasi dan penguatan pelayanan kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
			2. Fasilitasi peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
			3. Fasilitasi penataan peraturan perundang-undangan
			4. Peningkatan pengendalian administrasi kegiatan pembangunan
			5. Fasilitasi pengaturan jasa konstruksi
			6. Fasilitasi pengembangan data dan informasi
			7. Fasilitasi dokumentasi dan peliputan kegiatan pembangunan
			8. Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan
			9. Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional yang bebas KKN;
			10. Peningkatan pelayanan publik;
2. Pengembangan tata pemerintahan yang demokratis dan aman	1. Berkembangnya infra dan suprastruktur politik	1. Pengembangan infra dan supra struktur politik	1. Fasilitasi peran dan fungsi lembaga legislatif;
			2. Penguatan pendidikan politik masyarakat;
			3. Penguatan dan penataan peraturan perundang-undangan
		2. Pengembangan jaringan dan sistem informasi manajemen teknologi informatika	1. Pengembangan pelayanan publik berbasis <i>digital government service</i> ;
			2. Pengembangan komunikasi , informasi dan media massa
			3. Pengembangan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi.
			4. Pengembangan SDM bidang komunikasi dan informasi;
			5. Pengembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mandiri dan kontributif

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS			
Misi 4 : Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan	Penanaman rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan	1. Fasilitasi pendidikan politik dan wawasan kebangsaan
			2. Fasilitasi penguatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
	3. Berkembangnya situasi dan kondisi daerah yang tertib dan aman	Pengembangan situasi dan kondisi daerah yang tertib dan aman	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan
			2. Peningkatan kantranstibmas dan pencegahan tindak kriminal
3. Pengembangan tata pemerintahan yang tertib dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencana, manajemen aset, keuangan dan kepegawaian	1. Penguatan kapasitas kelembagaan perencana	Fasilitasi proses perencanaan taktis strategis bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan perencanaan pengembangan wilayah dan infrastruktur.
		2. Peningkatan manajemen asset daerah	Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan aset daerah
		3. Peningkatan manajemen keuangan daerah	Peningkatan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah
		4. Peningkatan manajemen pengelolaan kepegawaian	1. Pengembangan SDM kepegawaian terpadu;
		5. Peningkatan pengawasan internal	2. Pengembangan Jabatan Fungsional
			1. Pengembangan sistem pengawasan preventif;
			2. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
4. Pengembangan tata pemerintahan berbasis IT	Tertatanya data dan informasi berbasis IT	Pengembangan data dan informasi	1. Pengembangan data dan informasi terintegrasi.
			2. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan;

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS			
Misi 4 : <i>Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Perluasan cakupan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
			4. Fasilitasi manajemen pengelolaan arsip menuju pengelolaan berbasis IT
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengamanan lingkungan	Pengembangan pengamanan swakarsa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan dan asset negara/daerah;

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS			
Misi 5 : <i>Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis</i>			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang peduli terhadap masalah sosial dan hak-hak perempuan dan anak	1. Meningkatnya kemampuan lembaga kesejahteraan sosial dalam menangani rehabilitasi PMKS, Anak Jalanan, Anak Terlantar dan Anak berkebutuhan khusus	1. Penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial	1. Penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial
		2. Peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, Anak Jalanan, Anak Terlantar dan Anak berkebutuhan khusus	2. Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
			3. Fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak terlantar, anak jalanan dan anak berkebutuhan khusus;
			4. Fasilitasi dan bantuan para penyandang cacat dan trauma;
			5. Peningkatan kesadaran masyarakat eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan masalah sosial lainnya);
			6. Penguatan peran serta masyarakat dan lembaga peduli permasalahan (PMKS) dan masalah sosial lainnya.
	2. Terlindunginya hak-hak perempuan dan anak dalam kebijakan pembangunan	Perlindungan gender dan perlindungan anak, dengan kebijakan pembangunan	1. Penguatan kelembagaan perlindungan gender dan anak;
			2. Advokasi dan fasilitasi perlindungan Gender bagi perempuan;
			3. Fasilitasi peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dlm manajemen mitigasi bencana	Meningkatnya manajemen mitigasi bencana	Peningkatan manajemen mitigasi bencana	1. Pencegahan dini bencana kebakaran; 2. Pengembangan manajemen bencana alam berbasis masyarakat.
3. Meningkatkan tata kehidupan harmonis dan kondusif yang peduli terhadap penyebaran narkotika, serta obat-obatan	1. Peningkatan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal	Peningkatan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal	1. Fasilitasi pengelolaan kekayaan budaya kebudayaan lokal; 2. Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan keragaman budaya;
	2. Menurunnya penyebaran narkotika, serta obat-obatan	Peningkatan pencegahan penangkalan perkembangan, penyebaran narkotika,	1. Fasilitasi & Sosialisasi penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS			
Misi 5 : <i>Meningkatkan tata kehidupan sosial masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
terlarang	terlarang	serta obat-obatan terlarang	2. Fasilitasi peningkatan peran serta kepemudaan
	3. Terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif	Penciptaan kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif	Pengembangan sikap toleransi inter dan antar pemeluk agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS			
Misi 6 : <i>Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang daerah menuju pembangunan berkelanjutan</i>			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Percepatan pembangunan infrastruktur	Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan sistem transportasi yang terintegrasi	1. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan	1. Fasilitasi analisis kelayakan sarana dan prasarana wilayah
			2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah
		2. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan informasi fasilitas transportasi yang terintegrasi	1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas yang informatif;
			2. Pengendalian kelayakan angkutan;
		3. Pengembangan moda transportasi masal yang aman, nyaman serta tepat waktu dan terjangkau	3. Peningkatan sistem pengendalian dan pengamanan lalu lintas
			1. Fasilitasi dan bantuan pengembangan kelayakan dan kenyamanan angkutan massal;
2. Perbaikan pengelolaan sampah dan kualitas lingkungan	1. Membaiknya pengelolaan sampah	1. Pengembangan pengelolaan sampah	2. Penyediaan sarana prasarana perhubungan dan informasi fasilitas transportasi yang terintegrasi.
	2. Pengendalian jumlah ruang terbuka hijau di publik area dan <i>private area</i>	2. Pengendalian jumlah ruang terbuka hijau di publik area dan private area	Peningkatan pengelolaan sampah di TPA yang berkelanjutan;
			1. Penyusunan pranata kebijakan Ruang Tata Hijau (RTH) secara konsisten;
3. Peningkatan manfaat listrik dan air bersih bagi masyarakat	1. Tersedianya sumber-sumber air baku	Optimalisasi sumber-sumber air baku	2. Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas Ruang Tata Hijau (RTH);
	2. Meningkatnya cakupan layanan listrik di perdesaan	Peningkatan cakupan layanan listrik di perdesaan	Fasilitasi pengembangan sumber-sumber air baku yang baru;
4. Pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah	Tersedianya panduan tata ruang yang memadai	Pengendalian tata ruang berdasar pada panduan tata ruang	Penambahan jaringan listrik untuk masyarakat pedesaan
			1. Penyusunan Rencana Tata Ruang, Detail Tata Ruang serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
			2. Kajian pengembangan wilayah transmigrasi

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR SEBAGAI DAERAH AGRARIS YANG DIDUKUNG OLEH MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS			
Misi 6 : Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai dengan daya dukung lingkungan dan tata ruang daerah menuju pembangunan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5. Pengendalian kerusakan lingkungan akibat pembangunan	1. Terkendalinya kerusakan lingkungan akibat pembangunan	Pencegahan dan pengendalian dampak kerusakan lingkungan	1. Pengendalian polusi dan pencemaran lingkungan;
			2. Peningkatan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
			3. Penyusunan pranata pengendalian dampak kerusakan lingkungan;
			4. Pengendalian reklamasi pantai
			5. Monitoring dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
			6. Perluasan cakupan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
			7. Fasilitasi kajian rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam
6. Perbaikan perumahan tidak layak huni dan pengelolaan TPU	2. Berfungsinya sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	Peningkatan penanganan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	Normalisasi saluran drainase yang ada;
	1. Berkurangnya perumahan tidak layak huni	Peremajaan perumahan tidak layak huni	Fasilitasi dan bantuan pemugaran rumah tidak layak huni bagi warga miskin;
	2. Meningkatnya manajemen pengelola TPU,	Pengembangan manajemen pengelola TPU,	Pengembangan manajemen pengelola TPU milik pemerintah daerah

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya. Kriteria suatu rumusan kebijakan umum antara lain:

- (1) Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus;
- (2) Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
- (3) Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, sebagai berikut:

- (1) Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
- (2) Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
- (3) Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
- (4) Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur 2011-2015 dimana merupakan Tahapan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Timur 2006-2026, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2015 dapat diuraikan pada Tabel 7.1. s/d Tabel 7.6.

Tabel 7.1.
Perumusan Program Prioritas Pada Misi Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
1.	Pengembangan sekolah murah	1. Subsidi satuan pendidikan sampai dengan pendidikan menengah	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka rata-rata lama sekolah (thn)	7,06	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
		2. Fasilitasi kegiatan PKBM, lembaga pendidikan ketrampilan, dan pendidikan anak usia dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah siswa pada tingkat PAUD/TK (siswa)	16.833	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
		3. Fasilitasi pendidikan nonformal	1) Program Pendidikan Nonformal	Angka Melek Huruf (%)	94,24	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
			2) Program Pengembangan Perpustakaan Daerah	Angka Melek Huruf (%)	94,24	Kantor Pengel. Perpus. & Arsip Daerah
2.	Pengembangan kualitas layanan pendidikan	1. Pengembangan manajemen berbasis sekolah (MBS)	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (thn)	7,06	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
		2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase kelulusan siswa (%)		Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
		3. Fasilitasi siswa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi	Program Pendidikan Menengah	Penduduk usia lebih dari 15 tahun yang dimiliki ijazah SLTP (%)	16,80	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga
3.	Peningkatan akses dan cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat	1. Peningkatan kualitas layanan puskesmas dan rumah sakit	1) Program standarisasi pelayanan kesehatan	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	Dinas Kesehatan & RSUD
			2) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	RSUD

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
			3) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	RSUD
		2. Rintisan jaminan kesehatan seluruh masyarakat (<i>Universal Coverage</i>).	Program upaya kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	Dinas Kesehatan & RSUD
4.	Pengurangan resiko terjadinya penyakit dan peningkatan layanan balita & lansia	1. Pengembangan paradigma hidup sehat,	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Angka kesakitan penduduk (%)	15,12	Dinas Kesehatan
		2. Fasilitasi dan pemberdayaan gizi masyarakat;	Program perbaikan gizi masyarakat	Kasus gizi buruk (kasus)	42	Dinas Kesehatan
		3. Pengembangan posyandu anak balita;	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka kematian bayi/1000 kelahiran		Dinas Kesehatan
		4. Pengembangan pelayanan kesehatan lansia;	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	Dinas Kesehatan
5.	Peningkatan dan pemerataan infrastruktur dan manajemen kesehatan	1. Menyediakan sarana prasarana dan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas kesehatan;	1) Program obat dan perbekalan kesehatan 2) Program perintisan pengembangan pendidikan kesehatan	Rata-rata lama sakit (hari)	6,10	Dinas Kesehatan
		2. Fasilitasi pengawasan obat dan makanan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat	1) Program pengawasan obat dan makanan 2) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Prosentase kasus keracunan makanan (%)		Dinas Kesehatan
		3. Mengembangkan sistem penataan peraturan perundang-undangan	Program penataan peraturan perundang-undangan	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	Dinas Kesehatan
6.	Promosi pelayanan dan pendidikan kesehatan masyarakat	1. Pengembangan upaya kesehatan promotif	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Angka kesakitan penduduk (%)	15,12	Dinas Kesehatan
		2. Fasilitasi standarisasi pelayanan kesehatan	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	Dinas Kesehatan

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
7.	Pengembangan dan peningkatan penyediaan pelayanan Keluarga Berencana	1. Fasilitasi pelayanan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka kematian ibu melahirkan/ 100.000 kelahiran hidup		Dinas Kesehatan
		2. Fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana	1) Program keluarga berencana 2) Program kesehatan reproduksi 3) Program pelayanan kontrasepsi	Jumlah akseptor KB baru (orang)	64.235	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
		3. Fasilitasi promosi kesehatan melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Program promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Jumlah kelompok KB (grup)	246	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
		4. Peningkatan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
		5. Fasilitasi pengembangan model operasional BKP-Posyandu-Padu	Program pengembangan model operasional BKP-Posyandu-Padu	Keluarga sejahtera (KS II & III) (%)	42,62	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
		6. Penguatan jejaring operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat	Program penguatan jejaring operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat	Keluarga sejahtera (KS II & III) (%)	42,62	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
		7. Fasilitasi dan pengembangan kesadaran masyarakat;	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Jumlah kelompok KB (grup)	246	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
8.	Peningkatan manajemen administrasi kependudukan	1. Fasilitasi sarana prasana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);	Program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Prosentase penduduk berKTP (%)		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
		2. Peningkatan penataan peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan.	Program penataan peraturan perundang-undangan	Prosentase penduduk berKTP (%)		Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
9.	Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1. Fasilitasi pengembangan calon tenaga kerja yang berkualitas dan produktif	Program peningkatan kesempatan kerja	Kasus kecelakaan kerja (%)		Dinas Sosnakertrans
		2. Fasilitasi penyelesaian	Program perlindungan pengembangan	Lembaga		Dinas Sosnakertrans

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
		perselisihan hubungan industrial dan penguatan lembaga/serikat perburuhan.	lembaga ketenagakerjaan	ketenagakerjaan terasuransi (%)		
10.	Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan;	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah lembaga kepemudaan aktif/tahun (grup)		Dinas Pend. Pemuda, dan OR
		2. Fasilitasi peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Laju pertumbuhan UKM (%)	4,45	Dinas Pend. Pemuda, dan OR
11.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga	Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan internasional (<i>sport centre</i>).	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan rasio sarana dan prasarana OR thd penduduk (%)		Dinas Pend. Pemuda, dan OR; Setda
12.	Pemasyarakatan olahraga	Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat;	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	Dinas Pend. Pemuda, dan OR; Setda
13.	Pembinaan atlet dan pelaku olahraga	Penguatan organisasi dan manajemen pengelolaan olahraga;	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Jumlah atlet berprestasi nasional (%)		Dinas Pend. Pemuda, dan OR; Setda
14.	Peningkatan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	1. Fasilitasi peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	1) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rumah tangga miskin (%)	41,25	Badan PMPD
			2) Program peningkatan jalan perdesaan	Panjang jalan beraspal (Km)		Dinas PU
		2. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Koperasi berbasis di desa (Unit)	296	Badan PMPD
		3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Rumah tangga miskin (%)	41,25	Badan PMPD
		4. Pemberdayaan perempuan	Program peningkatan perempuan pedesaan	Rumah tangga miskin	41,25	Badan PMPD

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
		pedesaan		(%)		
		5. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah adm keuangan desa yang tertib (%)		Badan PMPD
		6. Pengendalian administrasi kegiatan pembangunan	Program pengendalian administrasi kegiatan pembangunan	Jumlah adm pembangunan desa yang tertib (%)		Badan PMPD
		7. Peningkatan tata tertib administrasi dan kinerja pemerintah daerah	Program peningkatan tata tertib administrasi dan kinerja pemerintah daerah	Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemda (%)		Badan PMPD
		8. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemda (%)		Badan PMPD

Tabel 7.2.
Perumusan Program Prioritas pada Misi Membangun Struktur Perekonomian yang Kokoh dengan Berbasis Keunggulan Kompetitif

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
1.	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian tanaman pangan, hortikultura	1) Pengembangan produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan;	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi padi (ribu ton)	457.318	Dinas Pertanian TPH
		2) Pengembangan dan penerapan teknologi pertanian;	Program peningkatan teknologi pertanian/perkebunan	Produktivitas padi sawah (Kw/Ha)	51,80	Dinas Pertanian TPH
		3) Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian/agroindustri;	Program pengembangan agroindustri	Unit usaha agroindustri		Dinas Pertanian TPH
		4) Pengembangan pemasaran pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan;	1. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Produksi padi (ribu ton)	457,31	Dinas Pertanian TPH, Setda
			2. Program pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	41,77	Dinas Pertanian TPH
2.	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perkebunan & kehutanan	1) Pengembangan produksi perkebunan dan kehutanan unggulan;	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi kakao (ton)	8.995	Disbunhut
		2) Pengembangan dan penerapan teknologi perkebunan dan kehutanan;	Program peningkatan teknologi pertanian/perkebunan	Produktivitas kakao (ton/Ha)	0,64	Disbunhut
		3) Pengembangan pemasaran produk perkebunan dan kehutanan;	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Kontribusi sektor pertanian pd PDRB (%)	41,77	Disbunhut
		4) Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan;	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Kasus gizi buruk (kasus)	42	Disbunhut & SETDA

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
3.	Penguatan pertanian dan hutan lestari	1) Fasilitasi rehabilitasi hutan lestari;	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas lahan kritis (Ha)	151.132,3	Disbunhut
		2) Pemanfaatan potensi sumberdaya kehutanan dan konservasi lingkungan;	Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Produksi Kayu (m3)	822,230	Disbunhut
		3) Pembinaan, perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan;	Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan	Luas hutan Kritis (Ha)	151.132,3	Disbunhut
		4) Perencanaan dan pengembangan hutan;	1. Program perencanaan dan pengembangan hutan	Produksi Kayu (m3)	822,230	Disbunhut
			2. Program pelestarian sumber air di wilayah <i>Chatmant Area</i> berbasis masyarakat	Luas hutan di wilayah <i>Chatmant Area</i> (%)		Disbunhut
4.	Pemberdayaan petani miskin	1) Pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	Luas Lahan Kritis (Ha)	151.132,3	Disbunhut
		2) Pengembangan kapasitas kelembagaan petani;	Program peningkatan kesejahteraan petani	Rumah tangga miskin (%)	41,25	Disbunhut
5.	Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	1) Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok masyarakat pesisir	1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Rumah tangga miskin (%)	41,25	Dinas Perikanan dan Kelautan
			2. Program pengembangan pengolahan hasil perikanan berbasis masyarakat	Unit usaha (unit)		Dinas Perikanan dan Kelautan
		2) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan & pengendalian sumberdaya kelautan	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan & pengendalian sumberdaya kelautan	Rumah tangga miskin (%)	41,25	Dinas Perikanan dan Kelautan
6.	Peningkatan produksi & pemasaran hasil kelautan dan perikanan	1) Peningkatan sarana dan penegakan hukum dalam pemberdayaan sumberdaya laut;	Program peningkatan kesarana dan penegakan hukum dalam pemberdayaan sumberdaya laut	Perda tentang perikanan & kelautan (%)		Dinas Perikanan dan Kelautan

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
		2) Pengembangan bibit ikan unggul dan perkolaman rakyat;	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan total (ton)	59.719,11	Dinas Perikanan dan Kelautan
		3) Pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok, fasilitasi pembinaan perikanan tangkap;	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	43.166	Dinas Perikanan dan Kelautan
		4) Pengembangan kawasan budidaya laut air payau dan tawar	Program pengembangan kawasan budidaya laut air payau dan tawar	Produksi perikanan budidaya (ton)	16.553	Dinas Perikanan dan Kelautan
		5) Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan/ pemasaran hasil olahan ikan	Program optimasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (%)	41,77	Dinas Perikanan dan Kelautan
7.	Peningkatan produksi hasil peternakan	1) Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok peternak	Program penataan peraturan perundang-undangan	Tersedianya perda tentang peternakan (%)		Dinas Peternakan
		2) Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Rasio kematian ternak/tahun (%)		Dinas Peternakan
		3) Pengembangan bibit ternak unggul;	Program peningkatan teknologi peternakan	Produksi peternakan (ton)	2.334	Dinas Peternakan
		4) Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan/ pemasaran, pengendalian mutu hasil olahan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi peternakan (ton)	2.334	Dinas Peternakan
		5) Peningkatan fasilitas pemasaran hasil produksi peternakan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (%)	41,77	Dinas Peternakan
8.	Penguatan kelembagaan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	1) Fasilitasi peningkatan kesejahteraan petani	Program peningkatan kesejahteraan petani	Rumah tangga miskin (%)	41,25	BP4K
		2) Peningkatan kualitas pemasaran hasil produksi	Program peningkatan pemasaran hasil produksi	Kontribusi sektor pertanian pd PDRB (%)	41,77	BP4K

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
		3) Peningkatan penguasaan teknologi	1. Program peningkatan teknologi pertanian/perkebunan	Produksi kelapa (ton)	21.124	BP4K
			2. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Produksi peternakan (ton)	2.334	
		4) Pemberdayaan kelembagaan	Program pemberdayaan penyuluh pertanian	Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (%)	41,77	BP4K
		5) Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Produksi Kayu (m3)	822.230	BP4K
		6) Peningkatan kapasitas budidaya perikanan	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan total (ton)	59.719,11	BP4K
9.	Pengembangan kelembagaan koperasi	Penerapan manajemen modern pada koperasi;	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Laju pertumbuhan UKM (%)	4,45	Dinas Koperasi dan UKM
10.	Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan UMKM	1) Fasilitasi permodalan koperasidan UMKM;	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Laju pertumbuhan UKM (%)	4,45	Dinas Koperasi dan UKM; Setda
		2) Peningkatan akses permodalan masyarakat miskin	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	Laju pertumbuhan UKM (%)	4,45	Dinas Koperasi dan UKM
11.	Pengembangan kualitas SDM koperasi	Pengembangan SDM Kader dan Pengurus Koperasi	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Prosentase peningkatan kualitas dan kompetensi UKM		Dinas Koperasi dan UKM
12.	Pengembangan ketahanan, kemandirian, mutu dan keamanan pangan	Peningkatan ketahanan pangan petanian/ perkebunan	Program peningkatan ketahanan pangan petanian/perkebunan	Kasus gizi buruk	42	Badan Ketahanan Pangan
13.	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Fasilitasi forum kerjasama dan komunikasi pemasaran pariwisata;	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan/tahun (orang)	10.627	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14.	Pengembangan kualitas obyek dan event-event pariwisata	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan/thn (orang)	10.627	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
15.	Pengembangan pola perpasaran tradisional dan modern	1) Revitalisasi pasar-pasar tradisional;	Program peningkatan dan penataan sarana dan prasarana pasar daerah	Jumlah toko,kios, los (unit)	1.942	Dinas Pasar, Pertamanan & Kebersihan
		2) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Peningkatan nilai perdagangan (%)		Dinas Pasar, Pertamanan & Kebersihan
		3) Penataan PKL secara humanis dan beradab serta peningkatan keamanan dan ketertiban pasar	Program peningkatan keamanan dan ketertiban pasar	Peningkatan nilai perdagangan (%)		Dinas Pasar, Pertamanan & Kebersihan
		4) Fasilitasi pengembangan data dan informasi	Program pengembangan data dan informasi	Peningkatan nilai perdagangan (%)		Dinas Pasar, Pert. & Kebersihan
16.	Peningkatan usaha pertambangan yang terkendali	1) Fasilitasi pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Produksi pertambangan (x 1000 m3)	559.390	Dinas Pertambangan dan Energi
		2) Peningkatan penataan pemahaman perundang-undangan di bidang pertambangan	Program penataan peraturan perundang-undangan	Produksi pertambangan (x 1000 m3)	559.390	Dinas Pertambangan dan Energi

Tabel 7.3.
Perumusan Program Prioritas Pada Misi Mendorong Berkembangnya Industri Melalui Optimalisasi Potensi Lokal, dengan Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif Berkesinambungan

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
1.	Pengembangan ekspor komoditas non migas	1) Perluasan cakupan kerjasama perdagangan	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	Nilai ekspor (US \$ x 1000)	67.521	Dinas Perindag
		2) Pengembangan iklim investasi yang kondusif dari segi permodalan, infrastruktur, kelembagaan	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, prasarana daerah	Peningkatan jumlah investor (%)		Kantor Penanaman Modal
		3) Pengembangan pranata investasi	Program penataan peraturan perundang-undangan	Peningkatan jumlah investor (%)		Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
		4) Pengembangan pranata pelayanan perizinan investasi	Program peningkatan pelayanan perizinan	Ketepatan waktu sesuai SPM		Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
2.	Pengembangan kerjasama investasi yang strategis	1) Fasilitasi kerjasama optimalisasi aset daerah	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Peningkatan nilai perdagangan (%)		Dinas Perindag
		2) Pengembangan promosi dan kerjasama investasi daerah	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Peningkatan jumlah investor (%)		Kantor Penanaman Modal
		3) Peningkatan kerjasama dalam penyusunan rencana program tahunan;	Program rencana penyusunan program tahunan	Laju pertumbuhan industri (%)	4,45	Dinas Perindag ;
3.	Pengembangan keamanan dan ketertiban dalam menunjang aktivitas dunia usaha dan investasi	1) Peningkatan cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Peningkatan nilai perdagangan (%)		Dinas Perindag
		2) Peningkatan kualitas SDM dalam masyarakat sekitar perusahaan	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Kenaikan daya saing industri (%)		Dinas Perindag

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
		3) Pengembangan sistem rantai pasok antara perusahaan dengan UKM dan masyarakat	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Laju pertumbuhan UKM (%)	4,45	Dinas Perindag
4.	Pengembangan produk agroindustri unggulan	1) Pengembangan potensi agroindustri berbahan baku lokal;	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Kenaikan daya saing industri (%)		Dinas Perindag
		2) Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi berbasis teknologi.	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Kenaikan daya saing industri (%)		Dinas Perindag
5.	Penataan pertanahan untuk mendukung iklim investasi	1) Peningkatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Kenaikan sertifikasi tanah (%)		Setda
		2) Percepatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kasus pertanahan (kasus)	5	Setda

Tabel 7.4.
Perumusan Program Prioritas Pada Misi Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
1.	Peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah	1) Fasilitasi dan penguatan pelayanan kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	IPM	70,07	SETDA
		2) Fasilitasi peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Tingkat kerjasama antar pemerintah daerah (%)		SETDA
		3) Fasilitasi penataan peraturan perundang-undangan	Program penataan peraturan perundang-undangan	Prosentase ketersediaan peraturan perundang-undangan (%)		SETDA
		4) Peningkatan pengendalian administrasi kegiatan pembangunan	Program pengendalian administrasi kegiatan pembangunan	Prosentase Kepuasan masyarakat (%)		SETDA
		5) Fasilitasi pengaturan jasa konstruksi	Program pengaturan jasa konstruksi	Prosentase Kepuasan masyarakat (%)		SETDA
		6) Fasilitasi pengembangan data dan informasi	Program pengembangan data dan informasi	Prosentase Kepuasan masyarakat (%)		SETDA
		7) Fasilitasi dokumentasi dan peliputan kegiatan pembangunan	Program dokumentasi dan peliputan kegiatan pembangunan	Prosentase Kepuasan masyarakat (%)		SETDA
		8) Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Program peningkatan kapasitas organisasi/kelembagaan dan tatalaksana	Prosentase Kepuasan masyarakat (%)	80,00	SETDA
		9) Pengembangan budaya kerja aparatur yang profesional yang bebas KKN;	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase Kepuasan masyarakat (%)		SETDA
		10) Peningkatan pelayanan publik;	1. Pemekaran wilayah demi peningkatan	Prosentase Kepuasan		SETDA

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
			pelayanan publik;	masyarakat (%)		
			2. Program peningkatan tata tertib administrasi dan kinerja pemerintah daerah			SETDA
			3. Program pembinaan dan pengembangan aparatur			Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
2.	Pengembangan infra dan supra struktur politik	1) Fasilitasi peran dan fungsi lembaga legislatif;	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Kepuasan Kinerja DPRD (%)		Sekretariat DPRD
		2) Penguatan pendidikan politik masyarakat;	Program pendidikan politik masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam politik (%)	60	Badan Kesbang Linmas & Pol.
		3) Penguatan dan penataan peraturan perundang-undangan	Program penataan peraturan perundang-undangan	Kepuasan Kinerja DPRD (%)		Sekretariat DPRD
3.	Pengembangan jaringan dan sistem informasi manajemenTeknologi Informatika	1) Pengembangan pelayanan publik berbasis <i>digital government service</i> ;	Program kerjasama informasi dan media massa	Kepuasan kinerja lembaga (%)		Dishub & Kominfo
		2) Pengembangan komunikasi , informasi dan media massa	Program pengembangan komunikasi , informasi dan media massa	Kepuasan kinerja lembaga (%)		Dishub & Kominfo
		3) Pengembangan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi.	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Kepuasan kinerja lembaga (%)		Dishub & Kominfo
		4) Pengembangan SDM bidang komunikasi dan informasi;	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Kepuasan kinerja lembaga (%)		Dishub & Kominfo
		5) Pengembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mandiri dan kontributif	Program dokumentasi dan peliputan kegiatan pembangunan	Kepuasan kinerja lembaga (%)		Dishub & Kominfo
4.	Penanaman rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan	1) Fasilitasi pendidikan politik dan wawasan kebangsaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kepuasan kinerja lembaga (%)		Badan Kesbang Linmas & Pol.
		2) Fasilitasi penguatan kemitraan pengembangan wawasan	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Kepuasan kinerja lembaga (%)		Badan Kesbang Linmas & Pol.

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
		kebangsaan				
5.	Pengembangan situasi dan kondisi daerah yang tertib dan aman	1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penurunan jumlah tindak pidana (%)		Badan Kesbang Linmas & Pol.
		2) Peningkatan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Program pemeliharaan kantranstibmas dan pencegahan tindak kriminal	Angka kriminalitas yang ditangani (kasus)	396	Badan Kesbang Linmas & Pol.
		3) Fasilitasi keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat	Program pemberdayaan masy. untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Keluarga sejahtera (KS II & III) (%)	42,62	Badan Kesbang Linmas & Pol.
6.	Penguatan kapasitas kelembagaan perencana	Fasilitasi proses perencanaan taktis strategis bidang pemerintahan, sosbud, ekonomi dan perencanaan peng. wilayah dan infrastruktur.	1. Program kerjasama pembangunan	Tingkat kerjasama pembangunan (%)		BAPPEDA
			2. Program perencanaan pembangunan daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,10	BAPPEDA
			3. Program perencanaan pembangunan ekonomi	Indeks daya beli	58,59	BAPPEDA
			4. Program perencanaan sosial budaya	Keluarga sejahtera (KS II & III) (%)	42,62	BAPPEDA
			5. Program perencanaan prasarana wilayah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,10	BAPPEDA
7.	Peningkatan manajemen asset daerah	Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan aset daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan PAD/tahun (%)		DP2KAD; SETDA
8.	Peningkatan manajemen keuangan daerah	Peningkatan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah	1) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Peningkatan PAD/tahun (%)		DP2KAD
			2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan			DP2KAD
9.	Peningkatan manajemen pengelolaan kepegawaian	1) Pengembangan SDM kepegawaian terpadu;	Program pendidikan kedinasan	Jumlah pegawai lulus pendidikan kedinasan		Badan Kepegawaian & Diklat Daerah

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
				(%)		
		2) Pengembangan Jabatan Fungsional	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Kepuasan pengguna (%)		Badan Kepegawaian & Diklat Daerah
10.	Peningkatan pengawasan internal	1) Pengembangan sistem pengawasan preventif;	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan PAD/tahun (%)		Inspektorat
		2) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Kepuasan masyarakat (%)		Inspektorat
11.	Pengembangan data dan informasi	1) Pengembangan data dan informasi terintegrasi.	Program pengembangan data dan informasi	Tersedianya data dan informasi (%)		BAPPEDA
		2) Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan;	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Tersedianya SOP tatalaksana lembaga (%)		Kantor Pengel. Perpus. & Arsip Daerah
		3) Perluasan cakupan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Dokumen/arsip daerah terselamatkan (%)		Kantor Pengel. Perpus. & Arsip Daerah
		4) Fasilitasi manajemen pengelolaan arsip menuju pengelolaan berbasis IT	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Tingkat kepuasan pengguna (%)		Kantor Pengel. Perpus. & Arsip Daerah
12.	Pengembangan pengamanan swakarsa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan dan asset negara/daerah;	Program pemeliharaan kantranstibmas dan pencegahan tindak kriminal	Angka kriminalitas yang ditangani (kasus)	396	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 7.5.
Perumusan Program Prioritas Pada Misi Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Demokratis

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
1.	Penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial	Penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah lembaga kesos (satuan)	73	SETDA
2.	Peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, Anak Jalanan, Anak Terlantar dan Anak berkebutuhan khusus	1) Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);	Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Keluarga fakir miskin (%)	39,02	Dinas Sosnakertrans; SETDA
		2) Fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak terlantar, anak jalanan dan anak berkebutuhan khusus;	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Penduduk PMKS terlayani (%)		Dinas Sosnakertrans
		3) Fasilitasi dan bantuan para penyandang cacat dan trauma;	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah penyandang trauma (orang)	2.173	Dinas Sosnakertrans
		4) Peningkatan kesadaran masyarakat eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan masalah sosial lainnya);	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan masalah sosial lainnya)	Wanita rawan sosial ekonomi (%)	0,59	Dinas Sosnakertrans
		5) Penguatan peran serta masyarakat dan lembaga peduli permasalahan (PMKS) dan masalah sosial lainnya.	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (satuan)	73	Dinas Sosnakertrans

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
3.	Perlindungan gender dan perlindungan anak, dengan kebijakan pembangunan	1) Penguatan kelembagaan perlindungan gender dan anak;	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (satuan)	73	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
		2) Advokasi dan fasilitasi perlindungan Gender bagi perempuan;	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Kasus KDRT (kasus)	8	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
		3) Fasilitasi peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Wanita rawan sosial ekonomi (%)	0,59	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
4.	Peningkatan manajemen mitigasi bencana	1) Pencegahan dini bencana kebakaran;	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Penanganan (kasus)		Sekr. Badan Penanggulangan Bencana Alam
		2) Pengembangan manajemen bencana alam berbasis masyarakat.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Korban bencana alam (orang)	446	Sekr. Badan Penanggulangan Bencana Alam
5.	Peningkatan kecintaan terhadap seni dan budaya lokal	1) Fasilitasi pengelolaan kekayaan budaya kebudayaan lokal;	Program pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah grup seni dan budaya (grup)	125	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2) Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan keragaman budaya;	Program pengelolaan keragaman budaya	Jumlah grup seni dan budaya (grup)	125	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6.	Peningkatan pencegahan penangkalan perkembangan, penyebaran narkoba, serta obat-obatan terlarang	1) Fasilitasi & Sosialisasi penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Korban narkoba dan PMS (orang)	49	Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
		2) Fasilitasi peningkatan peran serta kepemudaan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan kelompok pemuda pelopor (%)		SETDA
7.	Penciptaan kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif	Pengembangan sikap toleransi inter dan antar pemeluk agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	Program fasilitasi dan pembinaan keagamaan	Kasus SARA (kasus)	0	SETDA

Tabel 7.6.

Perumusan Program Prioritas Pada Misi Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Sesuai Dengan Daya Dukung Lingkungan dan Tata Ruang Daerah Menuju Pembangunan Berkelanjutan

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
1.	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan	1) Fasilitasi analisis kelayakan sarana dan prasarana wilayah	Program pengembangan data dan informasi sarana dan prasarana wilayah	T erSEDianya data dan informasi PU (%)		Dinas PU
		2) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah	Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan total (x 1000 km)	1.073	Dinas PU
			Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jalan beraspal kondisi baik (%)	73,07	Dinas PU
			Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Jalan beraspal kondisi baik (%)	73,07	Dinas PU
2.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan informasi fasilitas transportasi yang terintegrasi	1) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas yang informatif;	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Kerugian materiil (x Rp.1000)	348.144	Dinas Perhub. dan Kominfo
		2) Pengendalian kelayakan angkutan;	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah armada angkutan (unit)	3.346	Dinas Perhub. dan Kominfo
		3) Peningkatan sistem pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah kecelakaan lakalantas (kali)	96	Dinas Perhub. dan Kominfo
3.	Pengembangan moda transportasi massal yang aman, nyaman serta tepat waktu dan terjangkau	1) Fasilitasi dan bantuan pengembangan kelayakan dan kenyamanan angkutan massal;	Program peninkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Jalan beraspal kondisi baik (%)	73,07	Dinas PU
			Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Kondisi Jalan Beraspal (Km)	85.640	Dinas PU
		2) Penyediaan sarana prasarana perhubungan dan informasi fasilitas transportasi yang terintegrasi.	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah kecelakaan lakalantas (kali)	96	Dinas Perhub. dan Kominfo

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
4.	Pengembangan pengelolaan sampah	Peningkatan pengelolaan sampah di TPA yang berkelanjutan;	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Kinerja pengelolaan persampahan (%)		Dinas Pasar, Pert. & Kebersihan
5.	Pengendalian jumlah ruang terbuka hijau di publik area dan private area	1) Penyusunan pranata kebijakan Ruang Tata Hijau (RTH) secara konsisten;	Program penataan peraturan perundang-undangan	Tertatanya peraturan perundang-undangan (%)		Dinas Pasar, Pert. & Kebersihan
		2) Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas Ruang Tata Hijau (RTH);	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah RTH (%)		Dinas Pasar, Pert. & Kebersihan
6.	Optimalisasi sumber-sumber air baku	Fasilitasi pengembangan sumber-sumber air baku yang baru;	1. Program pengelolaan dan penyediaan air baku	Jumlah pemakaian air minum (x100 M3)	575,3	Dinas PU
			2. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danai, dan sumberdaya air lainnya	Jumlah air tersedia (%)		Dinas PU
			3. Program kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah pelanggan air minum	13.590	Dinas PU
7.	Pengendalian tata ruang berdasar pada panduan tata ruang	1) Penyusunan Rencana Tata Ruang, Detail Tata Ruang serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);	1. Program perencanaan tata ruang	Kesesuaian peruntukkan lahan (%)		Dinas PU, Bappeda
			2. Program pengembangan data dan informasi tata ruang	Kesesuaian peruntukkan lahan (%)		Dinas PU
		2) Kajian pengembangan wilayah transmigrasi	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Luas ruang per rumah tangga (m2)	19,60	Dinas Sosnakertras
8.	Peningkatan cakupan layanan listrik di pedesaan	Penambahan jaringan listrik untuk masyarakat pedesaan	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rumah tangga teraliri listrik (%)	77,6	Dinas Pertambangan dan Energi
9.	Pencegahan dan pengendalian dampak kerusakakan lingkungan	1) Pengendalian polusi dan pencemaran lingkungan;	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat kerusakan lingkungan hidup (%)		Badan Lingkungan Hidup
		2) Peningkatan pengawasan dan	Program pengawasan dan penertiban kegiatan	Tingkat kerusakan		Dinas Pertambangan

No	Strategi	Arah kebijakan	Program Pembangunan Daerah/ Program Prioritas	Indikator Kinerja	Kinerja Awal	S K P D Penanggung Jawab
		penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;	rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	lingkungan hidup (%)		dan Energi
		3) Penyusunan pranata pengendalian dampak kerusakan lingkungan;	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Tersedianya data kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup (%)		Badan Lingkungan Hidup
		4) Pengendalian reklamasi pantai	Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Tingkat kerusakan lingkungan hidup (%)		Badan Lingkungan Hidup
		5) Monitoring dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Kawasan hutan konservasi (%)	23,51	Badan Lingkungan Hidup
		6) Perluasan cakupan perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Tingkat kerusakan lingkungan hidup (%)		Badan Lingkungan Hidup
		7) Fasilitasi kajian rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam	Panjang saluran irigasi (x 1000 km)	2.361	Dinas PU
10.	Peningkatan penanganan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir	Normalisasi saluran drainase yang ada;	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Panjang saluran irigasi (x 1000 km)	2.361	Dinas PU
11.	Peremajaan perumahan tidak layak huni	Fasilitasi dan bantuan pemugaran rumah tidak layak huni bagi warga miskin;	Program pengembangan perumahan	Luas ruang per rumah tangga (m2)	19,97	Dinas PU
12.	Pengembangan manajemen pengelola TPU,	Pengembangan manajemen pengelola TPU milik pemerintah daerah	Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio TPU persatuan penduduk per 1000 penduduk		Dinas PU

BAB VIII

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menguraikan indikator kinerja RPJMD. Indikator kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja SKPD dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah tidak lain merupakan akumulasi kinerja SKPD. Indikator kinerja daerah ini merupakan target Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur yang harus dikejar dan didukung SKPD. Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya.

Oleh karena itu indikator kinerja daerah untuk RPJMD ini memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak langsung, tetapi sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari program-program yang dilaksanakan SKPD. Karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dimaksud terdiri dari indikator-indikator:

- a. *Exact*: ukuran yang (secara langsung) ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaran strategis yang diharapkan.
- b. *Proxy*: indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut.
- c. *Activity*: indikator kinerja yang mengukur jumlah, biaya, dan waktu dari kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan.

Sebagian besar indikator kinerja daerah untuk RPJMD merupakan indikator *exact* dan *proxy*. Sementara indikator *activity* lebih banyak dipakai untuk mengukur kinerja SKPD. Namun pada aspek, fokus dan urusan tertentu, indikator kinerja SKPD langsung dijadikan indikator RPJMD. Disadari bahwa penentuan indikator kinerja RPJMD dengan sejumlah target tertentu bukanlah hal yang mudah. Karena hal ini dipengaruhi capaian kegiatan atau program tertentu dengan sasaran tertentu pula, yang dilaksanakan SKPD maupun lintas SKPD. Indikator kinerja RPJMD ini dibuat sebagai acuan indikator kinerja SKPD, meski demikian penyusunannya bersifat timbal balik. Dengan kata lain meski menjadi acuan SKPD, tetapi penentuan indikator kinerja RPJMD juga memperhatikan kemampuan SKPD berdasarkan analisa SWOT.

Indikator kinerja RPJMD pada dasarnya merupakan kompromi antara apa yang diinginkan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur dengan kemampuan dan kesanggupan SKPD. Indikator kinerja ini memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat serta memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada. Salah satu rujukan ukuran kemampuan daerah adalah melihat kondisi eksisting pencapaian indikator kepemimpinan sebelumnya. Pertimbangan demikian perlu dilakukan karena bagaimanapun juga apa yang diinginkan oleh Bupati dan Wakil Bupati itu tidak akan terlaksana secara baik tanpa dukungan kemampuan SKPD, partisipasi masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh daerah.

Dengan kondisi yang ada kepemimpinan yang baru tertantang untuk berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Karenanya kepemimpinan yang baru membutuhkan semangat dan loyalitas aparatnya. Semangat dan loyalitas ini salah satunya tercermin dari komitmen bersama antara pimpinan dan birokrasi dalam menentukan indikator kinerja. Indikator kinerja ini membutuhkan dukungan pula dari masyarakat serta DPRD secara objektif dan rasional.

Oleh karena itu keseluruhan tahapan penyusunan RPJMD termasuk penentuan indikator kinerjanya telah diupayakan memenuhi aspek politik dan aspek formal yang disyaratkan. Aspek politik menyangkut proses yang melibatkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam konsultasi publik dan Musrenbang penyusunan RPJMD. Aspek formal meliputi pemenuhan atas prosedur, tahapan, dan administratif sesuai ketentuan yang ada. Aspek formal tersebut diantaranya menyangkut perumusan indikator kinerja dan capaian kinerja dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. *Relevant*, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis.
- b. *Well Defined*, yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
- c. *Measurable*, yaitu indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
- d. *Appropriate*, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
- e. *Reliable*, yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
- f. *Verifiable*, yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
- g. *Cost-effective*, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Kriteria di atas sebagian dipakai untuk menentukan indikator RPJMD, namun sebagian yang lain dipakai dalam menentukan indikator kinerja SKPD. Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja SKPD, indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator kinerja RPJMD ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2011 sampai 2015. Bahkan sebagai referensi digambarkan pula kondisi lima tahun sebelumnya, sebagai pembandingan.

Target kinerja menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Spesifik sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Terukur (*Measurable*) karena memiliki angka pencapaian tertentu. Terjangkau (*achievable*) karena telah memperhitungkan kemampuan dan kondisi daerah melalui analisa SWOT. Relevan (*relevant*) karena telah berusaha menyesuaikan aspirasi dan dinamika masyarakat. Terikat waktu (*time bond*) karena memiliki batasan periode tahun 2011-2015 serta target tahunannya. Peningkatan yang berkelanjutan (*continuously improve*) karena berusaha melakukan peningkatan secara terus menerus dan bertahap setiap tahunnya. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 8.1.

Tabel 8.1.
Indikator Kinerja Daerah dan Target Capaian Setiap Tahun

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kinerja Akhir Periode
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.	Fokus Kesejahteraan & Pemerataan Ekonomi							
1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,10	5,36	5,62	5,90	6,20	6,51	
1.2	PDRB atas dasar harga konstant (x Rp.1.000.000)	4.330.053	4.557.381	4.796.643	5.048.467	5.313.512	5.592.471	
1.3	Laju Inflasi (%)	10,03	9,61	9,19	8,77	8,35	7,93	
1.4	Pendapatan perkapita (x Rp.1.000.000)	11,37	13,12	15,15	17,48	20,18	23,29	
1.5	Rumah tangga miskin (%)	41,25	39,75	38,25	36,75	35,25	33,75	
1.6	Angka kriminalitas yang tertangani (kasus)	396	384	373	361	351	340	
1.7	IPM	70,73	71,08	71,44	71,80	72,16	72,52	
1.8	Kasus pertanahan (kasus)	5	4	4	3	3	3	
1.9	Laju pertambahan penduduk (%)	0,31	0,28	0,25	0,22	0,19	0,16	
2.	Fokus Kesejahteraan Sosial							
2.1	Angka melek huruf (%)	94,24	95,16	96,08	97	97,92	98,84	
2.2	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	7,06	7,14	7,22	7,3	7,38	7,46	
2.3	Angka partisipasi kasar (%)							
	- SD/MI	104,28	103,75	103,24	102,72	102,21	101,70	
	- SLTP/MTs	86,07	87,36	88,67	90,00	91,35	92,72	
	- SMA/SMK/MA	68,82	69,85	70,90	71,96	73,04	74,14	
2.4	Angka partisipasi murni (%)							
	- SD/MI	96,00	97,30	98,60	99,90	100,00	100,00	
	- SLTP/MTs	71,25	71,60	71,95	72,30	72,65	73,00	
	- SMA/SMK/MA	47,75	48,20	48,65	49,10	49,55	50,00	
2.5	Penduduk usia tertentu menurut ijasah tertinggi yang dimiliki (%)							

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun				Kinerja Akhir Periode
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Tidak Punya	35,35	33,80	32,25	30,70	29,15	27,60
	- SD Sederajat	21,65	19,70	17,75	15,80	13,85	11,90
	- SLTP Sederajat	16,80	17,40	18,00	18,60	19,20	19,80
	- SLTA Sederajat	25,60	28,00	30,40	32,80	35,20	37,60
	- Perguruan Tinggi	2,90	2,93	2,96	2,99	3,02	3,05
2.6	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	70,44	70,65	70,86	71,07	71,28
2.7	Angka kelangsungan hidup bayi/1000 kelahiran hidup (bayi)		27	26	25	24	23
2.8	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)	71,81	75,62	79,63	83,85	88,29	92,97
3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga						
3.1	Jumlah grup kesenian (grup).	125	135	145	155	165	175
3.2	Jumlah gedung kesenian (gedung).		6	8	10	12	14
3.3	Jumlah klub olahraga (klub).	118	130	142	154	166	178
3.4	Jumlah lapangan olahraga (unit).	118	130	142	154	166	178
3.5	Jumlah atlet berprestasi nasional (orang)		4	6	8	10	12
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1.	Fokus Pelayanan Urusan Wajib						
1.1	Pendidikan						
1.1.1	Rasio penduduk umur sekolah/jumlah sekolah	198	198	198	198	198	198
	- SD/MI	212	212	212	212	212	212
	- SLTP/MTs	241	241	241	241	241	241
	- SMA/SMK/MA						
1.1.2	Rasio jumlah murid/guru	16,43	15,99	15,56	15,12	14,69	14,25
	- SD/MI	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76
	- SLTP/MTs	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52
	- SMA/SMK/MA						
1.1.3	TK/PAUD	16.833	16.885	16.938	16.990	17.043	17.096
	Jumlah siswa pada tingkat PAUD/TK (siswa)						
1.2	Kesehatan						
1.2.1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk x 1000	4,47	4,15	3,88	3,64	3,43	3,25
1.2.2	Rasio dokter per satuan penduduk x 1000	15,10	13,93	12,95	12,11	11,39	10,76
1.2.3	Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000	1,14	1,06	0,99	0,92	0,87	0,82
1.2.4	Rata-rata lama sakit (hari)	6,1	6	5,9	5,8	5,7	5,6
1.2.5	Angka kesakitan penduduk (%)	15,12	14,44	13,76	13,08	12,4	11,72

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun				Kinerja Akhir Periode
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6	Kasus gizi buruk (kasus)	42	40	38	36	34	32
1.2.7	Penolong kelahiran balita oleh medis (%)	75,09	76,20	77,33	78,47	79,63	80,80
1.2.8	Angka kematian bayi/1000 kelahiran (bayi)		27	26	25	24	23
1.2.9	Angka kematian ibu melahirkan/100.000 kelahiran hidup (orang)		234	232	230	228	226
1.3	Pekerjaan Umum						
1.3.1	Panjang jalan total (x 1000 km)	1.073	1.106	1.139	1.174	1.209	1.245
1.3.2	Kondisi Jalan Beraspal (Km)	85.640	88.210	90.856	93.582	96.389	99.281
	- Kondisi baik (%)	73,07	75,26	77,52	79,84	82,24	84,71
	- Kondisi Rusak ringan (%)	3,52	3,69	3,88	4,07	4,28	4,49
	- Kondisi rusak sedang (%)	10,30	9,26	8,19	7,08	5,93	4,75
	- Kondisi rusak berat (%)	13,11	11,79	10,42	9,01	7,55	6,05
1.3.3	Rasio TPU persatuan penduduk per 1000 penduduk		2,00	2,02	2,04	2,06	2,08
1.3.4	Panjang saluran irigasi						
	- Primer (km)	243.845	249.942	256.190	262.595	269.160	275.889
	- Sekunder (km)	448.189	459.394	470.879	482.651	494.717	507.085
	- Tersier (km)	1.668.510	1.710.223	1.752.979	1.796.803	1.841.723	1.887.766
1.4	Perumahan						
1.4.1	Luas lantai per rumah tangga (m2)	19,97	20,35	20,74	21,13	21,53	21,94
1.4.2	Luas lantai bukan tanah (m2)	82,60	83,10	83,60	84,10	84,60	85,10
1.4.3	Persentase desa teraliri listrik PLN (%)	73,30	75,86	78,52	81,26	84,11	87,05
1.4.4	Rasio air bersih/penduduk (litr/orag/thn)	0,18	0,19	0,21	0,23	0,26	0,28
1.4.5	Rasio rumah tangga menggunakan Gas LPG untuk memasak (%)	6,00	8,50	11,00	13,50	16,00	18,50
1.5	Perencanaan Pembangunan Daerah						
1.5.1	Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan tahunan (%)		100	100	100	100	100
1.5.2	Tersediannya dokumen perencanaan pembangunan strategis (%)		100	100	100	100	100
1.6	Perhubungan						
1.6.1	Jumlah pelabuhan rakyat (unit)	4	4	5	5	5	5
1.6.2	Jumlah terminal (unit)	1	1	1	2	2	2
1.6.3	Jumlah armada angkutan darat roda empat (unit)	3.343	3.493	3.651	3.815	3.987	4.166
1.6.4	Jumlah armada angkutan laut (unit)	3	3	4	4	4	4

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun				Kinerja Akhir Periode
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.5	Kapal nelayan (unit)	329	336	344	352	360	368
1.7	Kependudukan dan Catatan Sipil						
1.7.1	Rasio penduduk berKTP (%)		45,00	50,00	55,00	60,00	65,00
1.7.2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)		30,00	32,60	35,20	37,80	40,40
1.7.3	Rasio pasangan berakte nikah (%)		55,00	57,00	59,00	61,00	63,00
1.8	Keluarga Berencana						
1.8.1	Jumlah kelompok KB (grup)	246	251	256	261	266	271
1.8.2	Jumlah akseptor KB baru (orang)	64.235	77.724	94.046	113.796	137.694	166.609
1.8.3	Keluarga pra sejahtera (%)	33,46	32,36	31,52	30,57	29,60	28,68
1.8.4	Keluarga sejahtera I (%)	25,37	25,28	25,71	25,92	26,10	26,37
1.8.5	Peserta KB aktif (orang)	136.869	136.939	137.009	137.079	137.149	137.219
1.8.6	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	2,70	2,67	2,65	2,62	2,59	2,57
1.8.7	Keluarga sejahtera (KS II & III) (%)	42,62	44,11	45,66	47,25	48,91	50,62
1.9	Sosial						
1.9.1	Sarana sosial (unit)		12	15	18	21	24
1.9.2	Rasio pemeluk agama/tempat ibadah						
	- Masjid	747,19	747,19	747,19	747,19	747,19	747,19
	- Gereja protestan	256,46	256,46	256,46	256,46	256,46	256,46
	- Gereja katolik	172,65	172,65	172,65	172,65	172,65	172,65
	- Pura	706,79	706,79	706,79	706,79	706,79	706,79
	- Vihara	103,93	103,93	103,93	103,93	103,93	103,93
1.9.3	Jumlah kelembagaan kesejahteraan sosial (satuan)	73,00	76,00	79,00	82,00	85,00	88,00
1.9.4	Kasus KDRT (kasus)	8	7	6	5	4	3
1.9.5	Wanita rawan sosial ekonomi (%)	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
1.9.6	Keluarga fakir miskin (%)	39,02	36,88	36,88	34,85	34,85	32,93
1.9.7	Tersedianya SOP pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		100	100	100	100	100
1.9.8	Jumlah penyandang trauma (orang)	2173	1955,7	1955,7	1760,13	1760,13	1584,117
1.9.9	Wanita rawan sosial ekonomi (%)	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
1.9.10	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (satuan)	73	76	76	79	79	82
1.9.11	Kasus kebakaran (kasus)		20	17	14	11	9
1.9.12	Kurban bencana alam (orang)	446	423,7	424	403	403	382
1.9.13	Indeks daya beli	58,59	59,34	60,09	60,84	61,59	62,34
1.9.14	Pengeluaran riil per kapita (Rp.000)	612,19	614,05	615,91	617,77	619,63	621,49

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun				Kinerja Akhir Periode
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Fokus Layanan Urusan Pilihan						
2.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura						
2.1.1	Produksi padi (ton)	457.318	480.184	504.193	529.403	555.873	583.667
2.1.2	Produktivitas padi sawah (Kw/Ha)	51,80	52,57	53,36	54,16	54,97	55,80
2.1.3	Produksi jagung (ton)	658.529	698.041	739.923	784.319	831.378	881.261
2.1.4	Produktivitas jagung (Kw/Ha)	50,07	51,03	51,99	52,98	53,99	55,01
2.1.5	Produksi ubi kayu (ton)	955.743	1.017.866	1.084.027	1.154.489	1.229.531	1.309.450
2.1.6	Produktivitas ubi kayu (Kw/Ha)	246,47	250,90	255,42	260,02	264,70	269,46
2.1.7	Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (%)	41,77	42,21	42,65	43,09	43,53	43,97
2.2	Perkebunan dan Kehutanan						
2.2.1	Produksi kakao (ton)	8.995	9.445	9.917	10.413	10.934	11.481
2.2.2	Produksi kelapa (ton)	21.124	24.293	27.937	32.127	36.947	42.489
2.2.3	Produksi kelapa sawit (ton)	2.725	2.930	3.149	3.385	3.639	3.912
2.2.4	Produksi Lada (ton)	2.776	2.843	2.911	2.981	3.052	3.126
2.2.5	Produksi Kayu (m3)	822.230	865.808	911.696	960.016	1.010.896	1.064.474
2.2.6	Produktivitas kakao (ton/Ha)	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,79
2.2.7	Luas kawasan hutan (%)	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53	30,53
2.2.8	Kawasan hutan konservasi (%)	23,51	23,51	23,51	23,51	23,51	23,51
2.2.9	Kondisi lahan kritis (Ha)	151.132,30	151.132,30	151.132,30	151.132,30	151.132,30	151.132,30
2.3	Peternakan						
2.3.1	Daging (ton)	1.467	1.577	1.696	1.823	1.960	2.107
2.3.2	Telur (ton)	867	1.430	2.359	3.893	6.423	10.598
2.3.3	Produksi peternakan (ton)	2.334	3.007	4.055	5.716	8.382	12.704
2.4	Perikanan dan Kelautan						
2.4.1	Produksi perikanan tangkap (ton)	43.166	45.324	47.590	49.970	52.468	55.092
2.4.2	Produksi perikanan budidaya (ton)	16.553	27.313	45.066	74.359	122.693	202.444
2.4.3	Produksi perikanan total (ton)	59.719	72.637	92.657	124.329	175.161	257.535
2.5	Investasi & Industri						
2.5.1	Nilai Industri Hasil Pertanian & Kehutanan (IHPK) (Rp.1000.000)	43.544	45.939	48.466	51.131	53.943	56.910
2.5.2	Nilai Industri Logam, Mesin, dan Elektronika (ILME) (Rp.1000.000)	1.415	1.458	1.501	1.546	1.593	1.641
2.5.3	Nilai Industri Kimia dan Aneka (IKA) (Rp.1000.000)	103.044	139.110	187.798	253.527	342.262	462.053
2.5.4	Jumlah industri (unit)	5.349	5.643	5.953	6.281	6.626	6.991
2.5.5	Tenaga kerja terserap pada industri (orang)	18.533	19.645	20.824	22.073	23.398	24.801

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kinerja Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun				Kinerja Akhir Periode
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.6	Nilai produksi (Rp.1.000.000)	2.342	2.494	2.656	2.829	3.013	3.209
2.5.7	Kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB (%)	6,07	6,21	6,21	6,34	6,34	6,48
2.5.8	Jumlah koperasi (unit)	296	297	298	299	300	301
2.6	Ketenagakerjaan						
2.6.1	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,14	4,99	4,84	4,69	4,55	4,41
2.6.2	Persentasi jam kerja lebih dari 35 jam/mg (%)	56,35	58,15	60,01	61,93	63,91	65,96
2.6.3	Rasio daya serap tenaga kerja (orang/industri)	3,46	3,48	3,50	3,51	3,53	3,55
C.	ASPEK DAYA SAING						
1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
1.1	Peningkatan produktivitas total daerah (%)		4,50	5,10	5,70	6,30	6,90
2	Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur						
2.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	321	317	312	308	303	299
2.2	Rasio penduduk/angkutan umum	285	273	262	252	242	232
2.3	Luas sawah produktif (Ha)	94.884	102.000	109.650	117.874	126.715	136.218
2.4	Jumlah Ruko, Toko, Kios, Los, Tenda, Lapak (unit)	3.608	3.969	4.366	4.802	5.282	5.811
2.5	Jumlah restoran (unit)	94	103	114	125	138	151
2.6	Jumlah penginapan/hotel (unit)	10	12	14	16	18	20
2.7	Ketersediaan listrik/rumah tangga (%)	77,6	79,6	81,6	83,6	85,6	87,6
3	Fokus Iklim Berinvestasi						
3.1	Angka kriminalitas/jumlah penduduk (%)	0,042	0,040	0,039	0,038	0,036	0,035
3.2	Lama proses perizinan (hari)		50	40	30	20	10
3.3	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha (satuan)		4	5	6	7	8
4	Fokus Sumber Daya Manusia						
4.1	Kualitas tenaga kerja (S1)	2,90	2,93	2,96	2,99	3,02	3,05
4.2	Rasio ketergantungan (%)	53,09	52,03	50,99	49,97	48,97	47,99

BAB IX
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN

Tabel 9.1.
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1			Urusan Wajib													
1	01		Pendidikan													
1	01	01	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Angka rata-rata lama sekolah (thn)	7,06	7,14	56.332.394	7,22	61.706.504	7,30	67.593.305	7,38	74.041.706	7,46	81.105.285	Dinas Pend. Pemuda & OR
1	01	02	Program pendidikan anak usia dini	Jumlah siswa pada tingkat PAUD/TK (siswa)	16.833	16.883	600.000	16.938	657.240	16.990	719.941	17.043	788.623	17.096	863.858	Dinas Pend. Pemuda & OR
1	01	03	Program pendidikan nonformal	Angka melek huruf (%)	94,24	95,16	175.000	96,08	191.695	97,00	209.983	97,92	230.015	98,84	251.958	Dinas Pend. Pemuda & OR
1	01	04	Program menejemen pelayanan pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (thn)	7,06	7,14	7.841.062	7,22	8.589.099	7,30	8.467.649	7,38	9.275.463	7,46	10.160.342	Dinas Pend. Pemuda & OR
1	01	05	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Prosentase angka kelulusan siswa (%)		96,25	1.445.000	97,23	1.582.853	98,21	1.733.857	99,20	1.899.267	100,00	2.080.457	Dinas Pend. Pemuda & OR
1	01	06	Program pendidikan menengah	Penduduk usia lebih dari 15 tahun yang dimiliki ijazah SLTP (%)	16,80	17,40	1.375.000	18,00	1.506.175	18,60	1.649.864	19,20	1.807.261	19,80	1.979.674	Dinas Pend. Pemuda & OR
1	02		Kesehatan													
1	02	01	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	70,44	570.857	70,65	625.317	70,86	684.972	71,07	750.318	71,28	821.899	Dinas Kesehatan & RSUD
1	02	02	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Angka kesakitan penduduk (%)	15,12	14,44	5.010.698	13,76	5.488.719	13,08	4.208.640	12,40	4.610.144	11,60	5.049.952	RSUD
1	02	03	Program pemeliharaan sarana	Angka kesakitan	15,12	14,44	370.786	13,76	406.159	13,08	444.907	12,40	487.351	11,60	533.844	RSUD

Kode	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas			Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	penduduk (%)												
1	02	04	Program upaya kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	70,44	5.478.080	70,65	6.000.689	70,86	6.573.155	71,07	7.200.233	71,28	7.887.136	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program pencegahan dan penanggulangan peny. menular	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	70,44	745.000	70,65	816.073	70,86	893.926	71,07	979.207	71,28	1.072.623	Dinas Kesehatan
1	02	06	Program perbaikan gizi masyarakat	Kasus gizi buruk (kasus)	42	40	580.000	38	635.332	36	695.943	34	762.336	32	835.062	Dinas Kesehatan
1	02	07	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka kematian bayi/1000 kelahiran			40.000		43.816		47.996		52.575		57.591	Dinas Kesehatan
1	02	08	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	70,44	60.000	70,65	65.724	70,86	71.994	71,07	78.862	71,28	86.386	Dinas Kesehatan
1	02	09	Program obat dan perbekalan kesehatan	Rata-rata lama sakit (hari)	6,10	6,00	5.740.200	5,9	6.287.815	5,80	6.887.673	5,70	7.544.757	5,60	8.264.526	Dinas Kesehatan
1	02	10	Program pengawasan obat dan makanan	Prosentase kasus keracunan makanan (%)		0%	40.000	0%	43.816	0%	47.996	0%	52.575	0%	57.591	Dinas Kesehatan
1	02	11	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Prosentase kasus keracunan makanan (%)		0%	50.000	0%	54.770	0%	59.995	0%	65.719	0%	71.988	Dinas Kesehatan
1	02	12	Program penataan peraturan perundang-undangan	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	70,44	150.000	70,65	164.310	70,86	179.985	71,07	197.156	71,28	215.964	Dinas Kesehatan
1	02	13	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Angka kesakitan penduduk (%)	15,12	14,44	220.000	13,76	240.988	13,08	263.978	12,40	289.162	11,72	316.748	Dinas Kesehatan
1	02	14	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Angka kesakitan penduduk (%)	15,12	14,44	220.000	13,76	240.988	13,08	263.978	12,40	289.162	11,72	316.748	Dinas Kesehatan
1	02	15	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka kematian ibu melahirkan/ 100.000 kelahiran hidup			60.000		65.724		71.994		78.862		86.386	Dinas Kesehatan
1	02	16	Program perintisan pengembangan pendidikan kesehatan	Rata-rata lama sakit (hari)	6,10						1.262.592		1.383.043	6,00	1.514.985	Dinas Kesehatan

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil													
1	10	01	Program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio penduduk berKTP (%)		60,00	1.311.292	70,00	1.436.389	80,00	1.573.421	90,00	1.723.525	100	1.887.949	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
1	10	02	Program penataan peraturan perundang-undangan	Rasio penduduk berKTP (%)		60,00	150.000	70,00	164.310	80,00	179.985	90,00	197.156	100	215.964	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
1	14		Ketenagakerjaan													
1	14	01	Program peningkatan kesempatan kerja	Kasus kecelakaan kerja (kasus)			120.000		131.448		143.988		157.725		172.772	Dinas Sosnakertrans
1	14	02	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Lembaga ketenagakerjaan terasuransi (%)		75,00	805.000	80,00	881.797	85,00	965.920	90,00	1.058.069	95	1.159.009	Dinas Sosnakertrans
1	18		Kepemudaan dan Olahraga													
1	18	01	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Laju pertumbuhan UKM (%)	4,45	4,84	95.000	5,22	104.063	5,61	113.991	6,00	124.865	6,39	136.777	Dinas Pend. Pemuda, dan OR
1	18	02	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan rasio sarana dan prasarana OR thd penduduk (%)		2,00	265.000	3,00	290.281	4,00	317.974	5,00	348.309	6,00	381.537	Dinas Pend. Pemuda, OR, dan SETDA
1	18	03	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	70,44	220.000	38,00	240.988	36,00	263.978	34,00	289.162	32,00	316.748	Dinas Pend. Pemuda, dan OR
1	18	04	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Prosentase angka harapan hidup (%)	70,23	70,44	522.840	38,00	572.719	36,00	627.356	34,00	687.206	32,00	752.766	SETDA
1	18	05	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Prosentase jumlah atlet berprestasi nasional (%)		2,00	75.000	4,00	82.155	6,00	89.993	8,00	98.578	10,00	107.982	Dinas Pend. Pemuda, dan OR

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
1	22	01	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rumah tangga miskin (%)	41,25	39,75	3.475.000	38,25	3.806.515	36,75	4.169.657	35,25	4.567.442	33,75	5.003.176	Badan PMPD
1	22	02	Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	Koperasi berbasis di desa (Unit)	296	297,00	150.000	298,00	164.310	299,00	179.985	300,00	197.156	301,00	215.964	Badan PMPD
1	22	03	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Rumah tangga miskin (%)	41,25	39,75	1.200.000	38,25	1.314.480	36,75	1.439.881	35,25	1.577.246	33,75	1.727.715	Badan PMPD
1	22	04	Program peningkatan perempuan pedesaan	Rumah tangga miskin (%)	41,25	39,75	150.000	38,25	164.310	36,75	179.985	35,25	197.156	33,75	215.964	Badan PMPD
1	22	05	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah adm keuangan desa yang tertib (%)		60	280.000	70	306.712	80	335.972	90	368.024	100	403.134	Badan PMPD
1	22	06	Program pengendalian administrasi kegiatan pembangunan	Jumlah adm pembangunan desa yang tertib (%)		60	75.000	70	82.155	80	89.993	90	98.578	100	107.982	Badan PMPD
1	22	07	Program peningkatan tata tertib administrasi dan kinerja pemerintah daerah	Prosentase peningkatan tata tertib administrasi dan kinerja pemerintah daerah (%)		60	350.000	70	383.390	80	419.965	90	460.030	100	503.917	Badan PMPD
1	22	08	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (%)		60	2.000.000	70	2.190.800	80	2.399.802	90	2.628.743	100	2.879.526	Badan PMPD
1	12		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera													
1	12	01	Program keluarga berencana	Jumlah akseptor KB baru (orang x 1000)	64.235	77,72	742.278	94,04	813.091	113,79	890.660	137,69	975.629	166,60	1.068.704	BPP dan KB

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	12	02	Program kesehatan reproduksi	Jumlah akseptor KB baru (orang x 1000)	64.235	77,72	35.000	94,04	38.339	113,79	41.997	137,69	46.003	166,60	50.392	BPP dan KB
1	12	03	Program pelayanan kontrasepsi	Jumlah akseptor KB baru (orang x 1000)	64.235	77,72	100.000	94,04	109.540	113,79	119.990	137,69	131.437	166,60	143.976	BPP dan KB
1	12	04	Program promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Jumlah kelompok KB (grup)	246	251	30.000	256	32.862	261	35.997	266	39.431	271,00	43.193	BPP dan KB
1	12	05	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Angka harapan hidup (tahun)	70,23	70,44	237.380	70,65	260.026	70,86	284.833	71,07	312.006	71,28	341.771	BPP dan KB
1	12	06	Program pengembangan model operasional BKP-Posyandu-Padu	Keluarga sejahtera (KS II & III) (%)	42,62	44,11	35.000	45,65	38.339	47,25	41.997	48,90	46.003	50,61	50.392	BPP dan KB
1	12	07	Program penguatan jejaring operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat	Keluarga sejahtera (KS II & III) (%)	42,62	44,11	527.900	45,65	578.262	47,25	633.428	48,90	693.857	50,61	760.051	BPP dan KB
1	12	08	program pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Jumlah kelompok KB (grup)	246	251	40.000	256	43.816	261	47.996	266	52.575	271	57.591	BPP dan KB
1	26		PERPUSTAKAAN													
1	26	01	Program pengembangan perpustakaan daerah	Angka melek huruf (%)	94,24	95,16	0	96,08	0	97,00	846.765	97,92	927.546	98,84	1.016.034	Kantor Pengel. Perpus. & Arsip Daerah

Tabel 9.2.
Misi 2 : Membangun Struktur Perekonomian yang Kokoh dengan Berbasis Keunggulan Kompetitif

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung g Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1			Urusan Wajib													
1	15		Koperasi dan UMKM													
2	15	01	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi berbadan hukum (unit)	4,45	4,84	429.600	5,22	470.584	5,61	515.478	6,00	564.654	6,39	618.522	Dinas Koperasi dan UKM
2	15	02	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Laju pertumbuhan UKM (%)	4,45	4,84	510.000	5,22	558.654	5,61	611.950	6,00	670.330	6,39	734.279	Dinas Koperasi dan UKM; SETDA
2	15	03	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	0	4,45	4,84	403.600	5,22	442.103	5,61	484.280	6,00	530.480	6,39	581.088	Dinas Koperasi dan UKM
2	15	04	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Tingkat kualitas dan kompetensi UKM (%)		80	365.800	85	400.697	90	438.924	95	480.797	100	526.665	Dinas Koperasi dan UKM
1	21		Ketahanan Pangan													
1	21	01	Program peningkatan ketahanan pangan petanian/perkebunan	Kasus gizi buruk (kasus)	42	40	1.690.000	38	1.851.226	36	2.027.833	34	2.221.288	32	2.433.199	Badan Ketahanan Pangan
2			Urusan Pilihan													
2	01		Pertanian													
2	01	01	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi padi (ribu ton)	457,31	480.18	391.000	504,19	428.301	529,40	469.161	555,87	513.919	583,66	562.947	Dinas Pertanian
2	01	02	Program peningkatan	Produktivitas padi	51,80	52,57	240.000	53,36	262.896	54,16	287.976	54,97	315.449	55,80	345.543	Dinas

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			teknologi pertanian/perkebunan	sawah (Kw/Ha)												Pertanian
2	01	03	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Produksi padi (ribu ton)	457.318	480.18	2.258.900	504,19	2.474.399	529,40	1.355.228	555,87	1.484.517	583,66	1.626.140	Dinas Pertanian &SETDA
2	01	04	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	41,77	42,21	245.000	42,65	268.373	43	293.976	43,53	322.021	43,97	352.742	Dinas Pertanian
2	01	05	Program pengembangan agroindustri	Unit usaha agroindustri (unit)						10	1.355.228	20	1.484.517	30	1.626.140	Dinas Pertanian
2	01	06	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi kakao (ton)	8.995	9.445	530.000	9.917	580.562	10.413	635.948	10.934	696.617	11.481	763.074	Disbunhut
2	01	06	Program peningkatan teknologi pertanian/perkebunan	Produktivitas kakao (ton/Ha)	0,64	0,66	150.000	0,69	164.310	0,72	179.985	0,75	197.156	0,78	215.964	Disbunhut
2	01	07	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (%)	41,77	42,21	225.000	42,65	246.465	43	269.978	43,53	295.734	43,97	323.947	Disbunhut
2	01	08	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan	Kasus gizi buruk (kasus)	42	40	250.000	38	273.850	36	299.975	34	328.593	32	359.941	Disbunhut
2	01	09	Program penataan peraturan perundang-undangan	Tersedianya perda tentang peternakan (%)		100	100.000	100	109.540	100	119.990	100	131.437	100	143.976	Dinas Peternakan
2	01	10	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Rasio kematian ternak/tahun (%)		10	190.000	9	208.126	8	227.981	7	249.731	6	273.555	Dinas Peternakan
2	01	11	Program peningkatan teknologi peternakan	Produksi peternakan (ton)	2.334	3.007	480.000	4.055	525.792	5.716	575.953	8.382	630.898	12.704	691.086	Dinas Peternakan
2	01	12	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Produksi peternakan (ton)	2.334	3.007	660.000	4.055	722.964	5.716	791.935	8.382	867.485	12.704	950.243	Dinas Peternakan
2	01	13	Program peningkatan pemasaran hasil produksi	Kontribusi sektor pertanian pada	41,77	42,21	175.000	42,65	191.695	43	209.983	43,53	230.015	43,97	251.958	Dinas

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
			peternakan	PDRB (%)												Peternakan
2	01	14	Program peningkatan kesejahteraan petani	Rumah tangga miskin (%)	41,25	39,75	786.500	38,25	861.532	36,75	943.722	35,25	1.033.753	33,75	1.132.373	BP4K & Disbunhut
2	01	15	Program peningkatan pemasaran hasil produksi	Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (%)	41,77	42,21	204.000	42,65	223.462	43	244.780	43,53	268.132	43,97	293.712	BP4K
2	01	16	Program peningkatan teknologi pertanian/perkebunan	Produksi kelapa (ton)	21.124	24.293	180.000	27.937	197.172	32.127	215.982	36.947	236.587	42.489	259.157	BP4K
2	01	17	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Produksi peternakan (ton)	2.334	3.007	77.000	4.055	84.346	5.716	92.392	8.382	101.207	12.704	110.862	BP4K
2	01	18	Program pemberdayaan penyuluh pertanian	Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (%)	41,77	42,21	926.900	42,65	1.015.326	43	1.112.188	43,53	1.218.291	43,97	1.334.516	BP4K
2	01	19	Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Produksi Kayu (m3)	822.230	865.808	175.000	911.696	191.695	960.016	209.983	1.010,89	230.015	1.064,47	251.958	BP4K
2	01	20	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan total (ribu ton)	59,72	72637,043	75.000	92,66	82.155	124,33	89.993	175,17	98.578	257,54	107.982	BP4K
2	02		Kehutanan													
2	02	01	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Luas lahan kritis (ribu Ha)	151.132,3	143,57	1.691.650	136,39	1.853.033	129,57	1.014.906	123,09	1.111.728	116,94	1.217.787	Disbunhut
2	02	02	Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	Produksi Kayu (ribu m3)	822.230	865,80	125.000	911,69	136.925	960,01	149.988	1.010	164.296	1.064	179.970	Disbunhut
2	02	03	Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan	Luas lahan kritis (ribu Ha)	151.132	143,57	675.000	136,39	739.395	129,57	809.933	123,09	887.201	116,94	971.840	Disbunhut
2	02	04	Program perencanaan dan pengembangan hutan	Produksi Kayu (ribu m3)	822.230	865,80	320.000	911,69	350.528	960,01	383.968	1.010	420.599	1.064	460.724	Disbunhut

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	02	05	Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	Luas lahan kritis (ribu Ha)	151.132	143,57	675.000	136,39	739.395	129,57	809.933	123,09	887.201	116,94	971.840	Disbunhut
2	02	06	Program pelestarian sumber air di wilayah <i>Chatmant Area</i> berbasis masyarakat	Luas hutan di wilayah <i>Chatmant Area</i> (%)						30	1.014.906	35	1.111.728	40	1.217.787	Disbunhut
2	03		Energi dan Sumberdaya Mineral													
2	03	01	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Produksi pertambangan (x 1000 m3)	559.390	615.329	170.000	676.862	186.218	744.548	203.983	819.003	223.443	900.903	244.760	Dinas Pertambangan & Energi
2	03	02	Program penataan peraturan perundang-undangan	Produksi pertambangan (x 1000 m3)	559.390	615.329	100.000	676.862	109.540	744.548	119.990	819.003	131.437	900.903	143.976	Dinas Pertambangan & Energi
2	04		Pariwisata													
2	04	01	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan/tahun (orang)	10.627	11.690	300.000	12.859	328.620	14.145	359.970	15.559	394.312	17.115	431.929	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
2	04	02	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan/tahun (orang)	10.627	11.690	200.000	12.859	219.080	14.145	239.980	15.559	262.874	17.115	287.953	Dinas Kebudayaan & Pariwisata
2	05		Perikanan dan Kelautan													
2	05	01	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Rumah tangga miskin (%)	41,25	39,75	133.755	38,25	146.515	36,75	160.493	35,25	175.804	33,75	192.575	Dinas Kelautan & Perikanan
2	05	02	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan & pengendalian sumberdaya kelautan	Rumah tangga miskin (%)	41,25	39,75	147.134	38,25	161.171	36,75	176.546	35,25	193.389	33,75	211.838	Dinas Kelautan & Perikanan
2	05	03	Program peningkatan	Perda tentang		100	134.824	100	147.686	100	161.775	100	177.209	100	194.115	Dinas

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung g Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			kesarana dan penegakan hukum dalam pemberdayaan sumberdaya laut	perikanan & kelautan (%)												Kelautan & Perikanan
2	05	04	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan total (ribu ton)	59.719	72.637	1.275.450	92.656	1.397.128	124.329	1.530.414	175.161	1.676.415	257.535	1.836.345	Dinas Kelautan & Perikanan
2	05	05	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perinanan tangkap (ton)	43.166	45.324	2.686.455	47.590	2.942.743	49.970	2.417.610	52.468	2.648.250	55.092	2.900.893	Dinas Kelautan & Perikanan
2	05	06	Program pengembangan kawasan budidaya laut air payau dan tawar	Produksi perikanan budidaya (ton)	16.553	27.313	79.145	45.066	86.695	74.359	94.966	122.693	104.026	202.444	113.950	Dinas Kelautan & Perikanan
2	05	07	Program optimasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Kontribusi sektor pertanian pada PDRB (%)	41,77	42,21	277.446	42,65	303.914	43,09	332.908	43,53	364.667	43,97	399.456	Dinas Kelautan & Perikanan
2	05	08	Program pengembangan pengolahan hasil perikanan berbasis masyarakat	Unit usaha (unit)						20	805.870	40	882.750	60	966.964	Dinas Kelautan & Perikanan
2	06		Perdagangan													
2	06	01	Program peningkatan dan penataan sarana dan prasarana pasar daerah	Jumlah toko, kios, los (unit)	1942	2178	220.000	2414	240.988	2650	263.978	2886	289.162	3122	316.748	Dinas Pasar, Pertmnan & Kebersihan
2	06	02	Program peningkatan keamanan dan ketertiban pasar	Peningkatan nilai perdagangan (%)		6,00	167.140	7	183.085	8	200.551	9	219.684	10	240.642	Dinas Pasar, Pertmnan & Kebersihan
2	06	03	Program pengembangan data dan informasi	Peningkatan nilai perdagangan (%)		6,00	100.000	7	109.540	8	119.990	9	131.437	10	143.976	Dinas Pasar, Pertmnan & Kebersihan

Tabel 9.3.

Misi 3 : Mendorong Berkembangnya Industri Melalui Optimasi Potensi Lokal, dengan Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif Berkesinambungan

Kode	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1			Urusan Wajib												
1	09		Pertanahan												
1	09	01	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Kenaikan sertifikasi tanah (%)	10,00	875.000	12,00	922.250	14,00	972.052	16,00	1.024.542	18,00	1.079.868	SETDA
1	09	02	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kasus pertanahan (kasus)	4	250.000	3	263.500	2	277.729	1	292.726	0	308.534	SETDA
1	16		Penanaman Modal												
1	16	01	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, prasarana daerah	Peningkatan jumlah investor (%)	7,50	150.000	8,00	158.100	8,50	166.637	9,00	175.636	10,00	185.120	Kantor Penanaman Modal
1	16	02	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Peningkatan jumlah investor (%)	15	460.000	8,00	484.840	8,50	511.021	9,00	538.617	10	567.702	Kantor Penanaman Modal
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian												
1	20	01	Program penataan peraturan perundang-undangan	Peningkatan jumlah investor (%)	7,5	45.000	8,00	47.430	8,50	49.991	9,00	52.691	10,00	55.536	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung g Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	20	02	Program peningkatan pelayanan perizinan	Ketepatan waktu sesuai SPM		80	575.000	85	606.050	90	638.777	95	673.271	100	709.627	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
2			Urusan Pilihan													
2	06		Perdagangan													
2	06	01	Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional	Nilai ekspor (US \$ x 1000)	67.521	74.273	90.000	81.701	94.860	89.871	99.982	98.858	105.381	108.744	111.072	Dinas Perindag
2	06	02	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Peningkatan nilai perdagangan (%)		6,00	8.041.410	7,00	8.550.166	8,00	9.093.504	9,00	9.673.970	10,00	10.294.312	Dinas Perindag; Dinas Pasar, Pertmnan & Kebersihan
2	06	03	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Peningkatan nilai perdagangan (%)		6,00	438.000	7,00	461.652	8,00	486.581	9,00	512.857	10,00	540.551	Dinas Perindag
2	07		Industri													
2	07	01	Program rencana penyusunan program tahunan	Laju pertumbuhan industri (%)	4,45	4,84	69.830	8,00	73.601	8,50	77.575	9,00	81.764	9,50	86.180	Dinas Perindag
2	07	02	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Kenaikan daya saing industri (%)		6,00	67.000	7,00	70.618	8,00	74.431	9,00	78.451	10,00	82.687	Dinas Perindag
2	07	03	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Laju pertumbuhan UKM (%)	4,45	4,84	80.000	5,22	84.320	5,61	88.873	6,00	93.672	6,39	98.731	Dinas Perindag
2	07	04	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Kenaikan daya saing industri (%)		6,00	91.400	7,00	96.336	8,00	101.538	9,00	107.021	10,00	112.800	Dinas Perindag
2	07	05	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Kenaikan daya saing industri (%)		6,00	110.000	7,00	115.940	8,00	122.201	9,00	128.800	10,00	135.755	Dinas Perindag

Tabel 9.4.
Misi 4 : Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Kode	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1			Urusan Wajib												
1	03		Pekerjaan Umum												
1	03	01	Program pengaturan jasa konstruksi	Kepuasan masyarakat (%)	80	70.000	82,5	76.678	85	83.993	87,5	92.006	90	100.783	SETDA
1	06		Perencanaan Pembangunan												
1	06	01	Program pengembangan data dan informasi	Kepuasan masyarakat (%)	80	160.000	82,5	175.264	85	191.984	87,5	210.299	90	230.362	SETDA
1	06	02	Program kerjasama pembangunan	Prosentase tingkat kerja sama pembangunan (%)	10	300.000	10	328.620	10	359.970	10	394.312	10	431.929	BAPPEDA
1	06	03	Program perencanaan pembangunan daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,10	1.505.000	5,62	1.648.577	5,90	1.805.851	6,20	1.978.129	6,51	2.166.843	BAPPEDA
1	06	04	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Indeks daya beli	58,59	1.650.000	60,09	1.807.410	60,84	1.979.837	61,59	2.168.713	62,34	2.375.609	BAPPEDA
1	06	05	Program perencanaan sosial budaya	Keluarga sejahtera (KS II & III) (%)	42,62	250.000	45,66	273.850	47,25	299.975	48,91	328.593	50,62	359.941	BAPPEDA
1	06	06	Program perencanaan prasarana wilayah	Laju pertumbuhan ekonomi (%)	5,10	1.000.000	5,62	1.095.400	5,90	1.199.901	6,20	1.314.372	6,51	1.439.763	BAPPEDA
1	06	07	Program pengembangan data dan informasi	Tersedianya data dan informasi (%)	85	1.205.000	87,5	1.319.957	90	1.445.881	92,5	1.583.818	95	1.734.914	BAPPEDA
1	19		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri												
1	19	01	Program pendidikan politik masyarakat		65	735.000	70	805.119	75	881.927	80	966.063	85	1.058.226	Badan Kesbanglinma

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																s & Pol.
1	19	02	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Kepuasan kinerja lembaga (%)		90	520.000	92	569.608	94	623.949	96	683.473	98	748.677	Badan Kesbanglinmas & Pol.
1	19	03	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Kepuasan kinerja lembaga (%)		90	295.000	92	323.143	94	353.971	96	387.740	98	424.730	Badan Kesbanglinmas & Pol.
1	19	04	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penurunan jenis tindak pidana (%)		10	910.000	10	996.814	10	1.091.910	10	1.196.078	10	1.310.184	Badan Kesbanglinmas & Pol.
1	19	05	Program pemeliharaan kantranstibmas dan pencegahan tindak kriminal	Angka kriminalitas yang ditangani (kasus)	396	384	100.000	373	109.540	361	119.990	351	131.437	340	143.976	Badan Kesbanglinmas & Pol.
1	19	06	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Keluarga sejahtera (KS II & III) (%)	42,62	44,11	575.000	45,66	629.855	47,25	689.943	48,91	755.764	50,62	827.864	Badan Kesbanglinmas & Pol.
1	19	07	Program pemeliharaan kantranstibmas dan pencegahan tindak kriminal	Angka kriminalitas yang ditangani (kasus)	468	445	750.640	423	822.251	402	900.694	381	986.620	362	1.080.744	Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja
1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian													
1	20	01	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	IPM	70,07	71,22	1.548.560	71,73	1.696.293	72,24	1.858.119	72,75	2.035.383	73,227	2.229.559	SETDA
1	20	02	Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	Prosentase peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah (%)		80	250.000	85	273.850	90	299.975	95	328.593	100	359.941	SETDA

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	20	03	Program penataan peraturan perundang-undangan	Tersedianya peraturan perundang-undangan (%)		100	2.780.000	100	3.045.212	100	3.335.725	100	3.653.953	100	4.002.541	SETDA
1	20	04	Program pengendalian administrasi kegiatan pembangunan	Kepuasan masyarakat (%)		80	1.170.000	82,5	1.281.618	85	1.403.884	87,5	1.537.815	90	1.684.522	SETDA
1	20	05	Program peningkatan kapasitas organisasi/kelembagaan dan tatalaksana	Kepuasan masyarakat (%)		80	690.000	82,5	755.826	85	827.932	87,5	906.916	90	993.436	SETDA
1	20	06	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kepuasan masyarakat (%)		90	1.175.000	92	1.287.095	94	1.409.884	96	1.044.387	98	1.091.721	SETDA
1	20	07	Pemekaran wilayah demi peningkatan pelayanan publik;	Kepuasan masyarakat (%)		90						96	500.000	98	600.000	SETDA
1	20	08	Program peningkatan tata tertib administrasi dan kinerja pemerintah daerah	Kepuasan masyarakat (%)			668.000	92	731.727	94	801.534	96	878.000	98	961.762	SETDA
1	20	09	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Kepuasan masyarakat thd Kinerja DPRD (%)		70	12.771.245	75	13.989.622	80	15.324.232	85	16.786.163	90	18.387.563	Sekretariat DPRD
1	20	10	Program penataan peraturan perundang-undangan	Kepuasan Kinerja DPRD (%)		70	126.887	75	138.992	80	152.252	85	166.777	90	182.687	Sekretariat DPRD
1	20	11	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan PAD/tahun (%)		10	16.713.245	10	18.307.689	10	20.054.242	10	21.967.417	10	24.063.108	DP2KAD
1	20	12	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan PAD/tahun (%)		10	660.000	10	722.964	10	791.935	10	867.485	10	950.243	SETDA
1	20	13	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Tesedianya SOP tatalaksana lembaga (%)		100	150.000	100	164.310	100	179.985	100	197.156	100	215.964	DP2KAD
1	20	14	Program pembinaan dan	Peningkatan		10	1.340.000	10		10		10		10	1.929.282	SETDA

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
			fasilitasi pengelolaan keuangan	PAD/tahun (%)					1.467.836		1.607.868		1.761.258			
1	20	15	Program pendidikan kedinasan	Jumlah pegawai lulus pendidikan kedinasan (%)		100	264.250	100	289.459	100	317.074	100	347.323	100	380.457	BKD
1	20	16	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Kinerja aparatur Pemda (%)		90	2.075.000	92	2.272.955	94	2.489.795	96	2.727.321	98	2.987.508	BKD & Sekr. Dewan Pengurus KORPRI
1	20	17	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Peningkatan Ppendapatan daerah /tahun (%)		10	2.914.108	10	3.192.114	10	3.496.642	10	3.830.221	10	4.195.624	Inspektorat
1	20	18	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tingkat kepuasan pengguna (%)		85	88.500	87,5	96.943	90	106.191	92,5	116.322	95	127.419	Inspektorat
1	24		Kearsipan													
1	24	01	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Tesedianya SOP tatalaksana lembaga (%)		100	50.000	100	54.770	100	59.995	100	65.719	100	71.988	Kantor Pengelolaan Perpus. & Arsip Daerah
1	24	02	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Dokumen/arsip daerah terselamatkan (%)		80	70.000	85	76.678	90	83.993	95	92.006	100	100.783	Kantor Pengelolaan Perpus. & Arsip Daerah
1	24	03	Program peninkatan kualitas pelayanan informasi	Tingkat kepuasan pengguna (%)		85	145.000	87,5	158.833	90	173.986	92,5	190.584	95	208.766	Kantor Pengelolaan Perpus. & Arsip Daerah
1	25		Komunikasi dan Informatika													

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	25	01	Program dokumentasi dan peliputan kegiatan pembangunan	Kepuasan masyarakat (%)		80	1.245.887	82,5	1.364.745	85	1.494.941	87,5	1.637.559	90	1.793.782	SETDA
1	25	02	Program kerjasama informasi dan media massa	Kepuasan kinerja lembaga (%)		90	3.200.000	92	3.505.280	94	3.839.684	96	4.205.990	98	4.607.241	Dishub & Kominfo
1	25	03	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Tesedianya SOP tatalaksana lembaga (%)		100	375.000	100	410.775	100	449.963	100	492.889	100	539.911	Dishub & Kominfo
1	25	04	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Kepuasan kinerja lembaga (%)		80	500.000	85	547.700	90	599.951	95	657.186	100	719.881	Dishub & Kominfo
1	25	05	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Kepuasan kinerja lembaga (%)		80	125.000	85	136.925	90	149.988	95	164.296	100	179.970	Dishub & Kominfo
1	25	06	Program dokumentasi dan peliputan kegiatan pembangunan	Dokumentasi dan peliputan kegiatan pembangunan (%)		100	175.000	100	191.695	100	209.983	100	230.015	100	251.958	Dishub & Kominfo

Tabel 9.5.

Misi 5 : Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Masyarakat yang Agamis, Berbudaya dan Demokratis

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung g Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1			Urusan Wajib													
1	11		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
1	11	01	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (satuan)	73	76	60.000	79	63.240	82	66.655	85	70.254	88	74.048	Badan PP dan KB
1	11	02	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Kasus KDRT (kasus)	8	7	30.000	6	31.620	5	33.327	4	35.127	3	37.024	Badan PP dan KB
1	11	03	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Wanita rawan sosial ekonomi (%)	0,59	0,53	95.000	0,48	100.130	0,43	105.537	0,39	111.236	0,35	117.243	Badan PP dan KB
1	13		Sosial													
1	13	01	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (satuan)	73	76	800.000	79	843.200	82	888.733	85	936.724	88	987.307	Dinas Sosnaker-trans; SETDA
1	13	02	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS)	Keluarga fakir miskin (%)	39,02	36,88	980.000	34,85	1.032.920	32,93	1.088.698	31,12	1.147.487	29,41	1.209.452	Dinas Sosnaker-trans; SETDA
1	13	03	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Penduduk PMKS terlayani (%)		70	65.000	75	68.510	80	72.210	85	76.109	90	80.219	Dinas Sosnaker-trans;
1	13	04	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Jumlah penyandang trauma (ribu orang)	2,173	1,956	215.000	1,760	226.610	1,584	238.847	1,425	251.745	1,283	265.339	Dinas Sosnaker-trans;

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung g Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	13	05	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan masalah sosial lainnya)	Wanita rawan sosial ekonomi (%)	0,59	0,53	200.000	0,48	210.800	0,43	222.183	0,39	234.181	0,35	246.827	Dinas Sosnaker-trans;
1	13	06	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kasus kebakaran (kasus)		20	235.000	17	247.690	14	261.065	11	275.163	9	290.022	Sekr. Badan Penangg. Bencana Alam
1	13	07	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kurban bencana alam (orang)	446	423,7	850.000	403	895.900	382	944.279	363	995.270	345	1.049.014	Sekr. Badan Penangg. Bencana Alam
1	13	08	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Korban narkoba dan PMS (orang)	49	47,04	565.000	45	595.510	42	627.668	40	661.562	38	697.286	Pel. Harian Badan Narkotika Kabupaten
1	13	09	Program fasilitasi dan pembinaan keagamaan	Kasus SARA (kasus)		0	2.472.000	0	2.605.488	0	2.746.184	0	2.894.478	0	3.050.780	SETDA
1	17		Kebudayaan													
1	17	01	Program pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah grup seni dan budaya (grup)	125	130	115.000	135	121.210	140	127.755	145	134.654	150	141.925	Dinas Kebud. dan Pariwisata
1	17	02	Program pengelolaan keragaman budaya	Jumlah grup seni dan budaya (grup)	125	130	400.000	135	421.600	140	444.366	145	468.362	150	493.654	Dinas Kebud. dan Pariwisata
1	18		Kepemudaan dan Olahraga													
			Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan kelompok pemuda pelopor (%)		2	821.895	4	881.802	6	946.426	8	1.016.161	10	1.091.440	SETDA ; Dinas Pend. Pemuda, dan OR

Tabel 9.6.

Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Sesuai Dengan Daya Dukung Lingkungan dan Tata Ruang Daerah Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Kode	Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas		Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1			Urusan Wajib												
1	03		Pekerjaan Umum												
1	03	01	Program pengembangan data dan informasi sarana dan prasarana wilayah	T erSEDiAnya data dan informasi PU (%)	100	837.500	100	917.398	100	1.004.917	100	1.100.786	100	1.205.801	Dinas PU
1	03	02	Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan total (x 1000 km)	1.186	7.680.000	1.299	8.412.672	1.412	9.215.241	1.525	10.094.375	1.638	11.057.378	Dinas PU
1	03	03	Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan	Jalan beraspal kondisi baik (%)	73,07	4.660.000	77,52	5.104.564	79,84	5.591.539	82,24	6.124.972	84,71	6.709.295	Dinas PU
1	03	04	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Jalan beraspal kondisi baik (%)	73,07	75,26	77,52	136.925	79,84	149.988	82,24	164.296	84,71	179.970	Dinas PU
1	03	05	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Jalan beraspal kondisi baik (%)	73,07	75,26	77,52	104.063	79,84	113.991	82,24	124.865	84,71	136.777	Dinas PU
1	03	06	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Kondisi Jalan Beraspal (Km)	85.640	88.210	90.856	17.399.991	93.582	19.059.950	96.389	20.878.269	99.281	22.870.056	Dinas PU
1	03	07	Program pengelolaan dan penyediaan air baku	Jumlah pemakaian air minum (x100 M3)	575,3	632,83	696,113	219.080	765,724	239.980	842,296	262.874	926,526	287.953	Dinas PU
1	03	08	Program pengembangan, pengelolaan, dan koservasi sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya	Jumlah air tersedia (%)	40	1.491.895	50	1.634.222	60	1.790.127	70	1.960.905	80	2.147.975	Dinas PU
1	03	09	Program kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah pelanggan air minum	13.591	14.950	16.445	2.436.213	18.089	2.668.628	19.898	2.923.215	21.888	3.202.090	Dinas PU
1	03	10	Program perencanaan tata ruang	Tersedianya perencanaan pembangunan	100	75.000	100	82.155	100	89.993	100	98.578	100	107.982	Dinas PU, Bappeda

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
				daerah (%)												
1	03	11	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Panjang saluran irigasi (x 1000 km)	2.361	2.420	1.491.895	2.480	1.634.222	2.542	1.790.127	2.606	1.960.905	2.671	2.147.975	Dinas PU
1	03	12	Program pengelolaan areal pemakaman	Rasio TPU persatuan penduduk per 1000 penduduk		2,00	165.000	2,02	180.741	2,04	197.984	2,06	216.871	2,08	237.561	Dinas PU
1	04		Perumahan													
1	04	01	Program pengembangan perumahan	Luas lantai per rumah tangga (m2)	19,97	20,35	200.000	20,74	219.080	21,13	239.980	21,53	262.874	21,94	287.953	Dinas PU
1	07		Perhubungan													
1	07	01	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah kecelakaan lakalantas (kali)	96	96	280.000	92	306.712	88	335.972	85	368.024	82	403.134	Dinas Perhub. Dan Kominfo
1	07	02	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Kerugian materiil (x Rp.1000)	348.144	334.218	325.000	320.850	356.005	308.016	389.968	295.695	427.171	283.867	467.923	Dinas Perhub. Dan Kominfo
1	07	03	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah armada angkutan (unit)	3.346	3.496	845.000	3.654	925.613	3.819	1.013.916	3.991	1.110.644	4.170	1.216.600	Dinas Perhub. Dan Kominfo
1	07	04	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah kecelakaan lakalantas (kali)	96	96	275.000	92	301.235	88	329.973	85	361.452	82	395.935	Dinas Perhub. Dan Kominfo
1	08		Lingkungan Hidup													
1	08	01	Program pengembangan kinerja pengelolaan	Rasio TPA/1000 jumlah penduduk		80	484.430	85	530.645	90	581.268	95	636.721	100	697.464	Dinas Pasar, Pertamanan

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung g Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			persampahan													Dan Kebersihan
1	08	03	Program penataan peraturan perundang-undangan	Tertatanya peraturan perundang-undangan (%)		100	91.600	100	100.339	100	109.911	100	120.396	100	131.882	Dinas Pasar, Pertamanan Dan Kebersihan
1	08	04	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah RTH (%)		30	425.000	32,5	465.545	35	509.958	37,5	558.608	40	611.899	Dinas Pasar, Pertmnan & Kebersihan
1	08	05	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Tingkat kerusakan lingkungan hidup (%)		30	3.148.600	25	3.448.976	20	3.778.009	15	4.138.431	10	4.533.237	Dinas PU
1	08	06	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Tersedianya data kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup (%)		100	75.000	100	82.155	100	89.993	100	98.578	100	107.982	Badan Lingkungan Hidup
1	08	07	Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Kerusakan ekosistem pesisir dan laut (%)		40	80.000	37,5	87.632	35	95.992	32,5	105.150	30	115.181	Badan Lingkungan Hidup
1	08	08	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Tingkat kerusakan lingkungan hidup (%)		40	405.000	37,5	443.637	35	485.960	32,5	532.321	30	583.104	Badan Lingkungan Hidup
1	08	09	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Kawasan hutan konservasi (%)	23,51	23,51	1.790.000	23,51	1.960.766	23,51	2.147.823	23,51	2.352.725	23,51	2.577.175	Badan Lingkungan Hidup
1	08	10	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam	Tingkat kerusakan lingkungan hidup (%)		40	70.000	37,5	76.678	35	83.993	32,5	92.006	30	100.783	Badan Lingkungan Hidup
1	22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													

Kode			Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	target	(Rp.X1000)	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	22	01	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rumah tangga miskin (%)	41,25	39,75	15.884.600	38,25	17.399.991	36,75	19.059.950	35,25	20.878.269	33,75	22.870.056	Dinas PU
2			Urusan Pilihan													
2	03		Energi dan Sumberdaya Mineral													
2	03	01	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Rumah tangga menggunakan listrik (%)	77,6	79,6	2.626.397	81,6	2.876.955	83,6	3.151.417	85,6	3.452.062	87,6	3.781.389	Dinas Pertambangan Dan Energi
2	03	02	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Tingkat kerusakan lingkungan hidup (%)		40	170.000	37,5	186.218	35	203.983	32,5	223.443	30	244.760	Dinas Pertambangan & Energi
2	08		Ketransmigrasian													
2	08	01	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Luas ruang per rumah tangga (m2)	19,60	19,97	100.000	20,35	109.540	20,74	119.990	21,13	131.437	21,53	143.976	Disosnaker-trans

BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2016 (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, maka dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Kepala Daerah untuk masa bakti 2011 - 2015, perlu disusun rancangan program indikatif Tahun 2016 sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016, sebelum Kepala Daerah masa bakti 2016 – 2020 terpilih.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Selanjutnya perlu diperhatikan koordinasi antar program, agar tercipta efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaan. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pemerintahan yang baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih pelaksanaan antar program. Selain itu, tujuan adanya kaidah ini adalah kelanjutan program yang dilakukan. Dengan tata pemerintahan yang baik, diharapkan implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya.

(1) RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD

Dokumen RPJM Daerah ini, yang disusun mulai Tahun 2011 – 2015 merupakan penerjemahan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. Dengan demikian setelah dokumen ini tersusun dan dikeluarkan menjadi peraturan daerah, maka dokumen ini perlu diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah. Walaupun demikian perlu ditegaskan disini, bahwa satuan kerja yang ada diharapkan bekerja dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas. Dengan SKPD yang program dan kegiatannya selalu berpedoman pada RPJM Daerah maka tata pemerintahan yang baik (efisiensi dan efektifitas) akan mudah tercipta.

(2) RPJM Daerah akan digunakan dalam penyusunan RKPD

Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah sebagai pedoman untuk penyusunan program-program dan kegiatan tahunan. Untuk itu, kegiatan-kegiatan yang diusulkan didalam RKPD harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan RPJM Daerah, terutama dengan tahapan dan prioritas bidang pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Tahapan dan prioritas pembangunan tersebut akan menjadi tema dalam penyusunan dokumen RKPD. Dengan kata lain, penetapan prioritas program dan kegiatan akan muncul dalam RKPD yang diusulkan baik oleh eksekutif maupun legislatif. Dalam RPJM Daerah, program-program yang ditawarkan memiliki dimensi umum dan masih perlu diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan riil. Setelah kegiatan riil dijadwalkan dalam RKPD, maka pembiayaan dapat disusun. Sumber pembiayaan yang ada saat ini masih bersumber pada pemerintah (APBD). Dengan sumber pembiayaan hanya dari APBD yang terbatas, berdampak pada pilihan-pilihan kegiatan yang diusulkan. Untuk itu, di masa mendatang pembiayaan dari pihak ketiga, yakni swasta maupun masyarakat, perlu digali dan dimanfaatkan. Dengan semakin

banyaknya alternatif sumber-sumber pembiayaan, maka kegiatan yang diusulkan akan semakin besar cakupan dan area/luasan programnya.

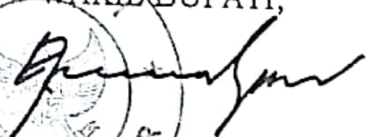
(3) Penguatan peran para pelaku pembangunan dalam pelaksanaan RPJMD

Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah ini disusun dengan menggunakan proses partisipasi publik. Dimulai dengan pembentukan tim kerja yang melibatkan perwakilan antar dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan koordinasi oleh Bappeda. Setelah itu, hasil kerjanya ini disosialisasikan kepada stakeholders baik dari kalangan perguruan tinggi, LSM maupun masyarakat.

Setelah adanya masukan dan kritik, perbaikan laporan dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar untuk penajaman konsep. Setelah itu, dokumen RPJM Daerah ini disosialisasikan kembali kepada masyarakat (*stakeholders*) dan masukan masyarakat di terjemahkan kembali dalam program-program yang diusulkan. Dengan melalui beberapa proses tersebut, diharapkan terjadi proses penguatan kapasitas masyarakat. Stakeholders yang kuat, akan mendorong proses penyusunan program yang transparan dan akuntabel, munculnya kesadaran mengawasi proses penyusunan dan implementasi program dari mereka. Dengan demikian, *stakeholders* yang kuat akan mendorong demokratisasi dan tentunya hal ini akan menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan.

(4) Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan

Dengan adanya dokumen RPJM Daerah ini, akan sangat membantu kepala daerah untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan serta penerjemahan visi dan misi, yang telah ditetapkan. Dengan adanya pandangan tersebut, diharapkan RPJM Daerah ini menunjukkan indikator-indikator yang jelas dan terukur agar diperoleh cara yang mudah untuk melihat keberhasilan pemimpin/kepala daerah. Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah ini juga akan menjadi acuan bagi RKPD yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan demikian kepala daerah nantinya akan mampu melihat tingkat keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja tahunan maupun lima tahunan yang sudah ada dalam RPJMD.

Pt. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,

ERWIN ARIFIN